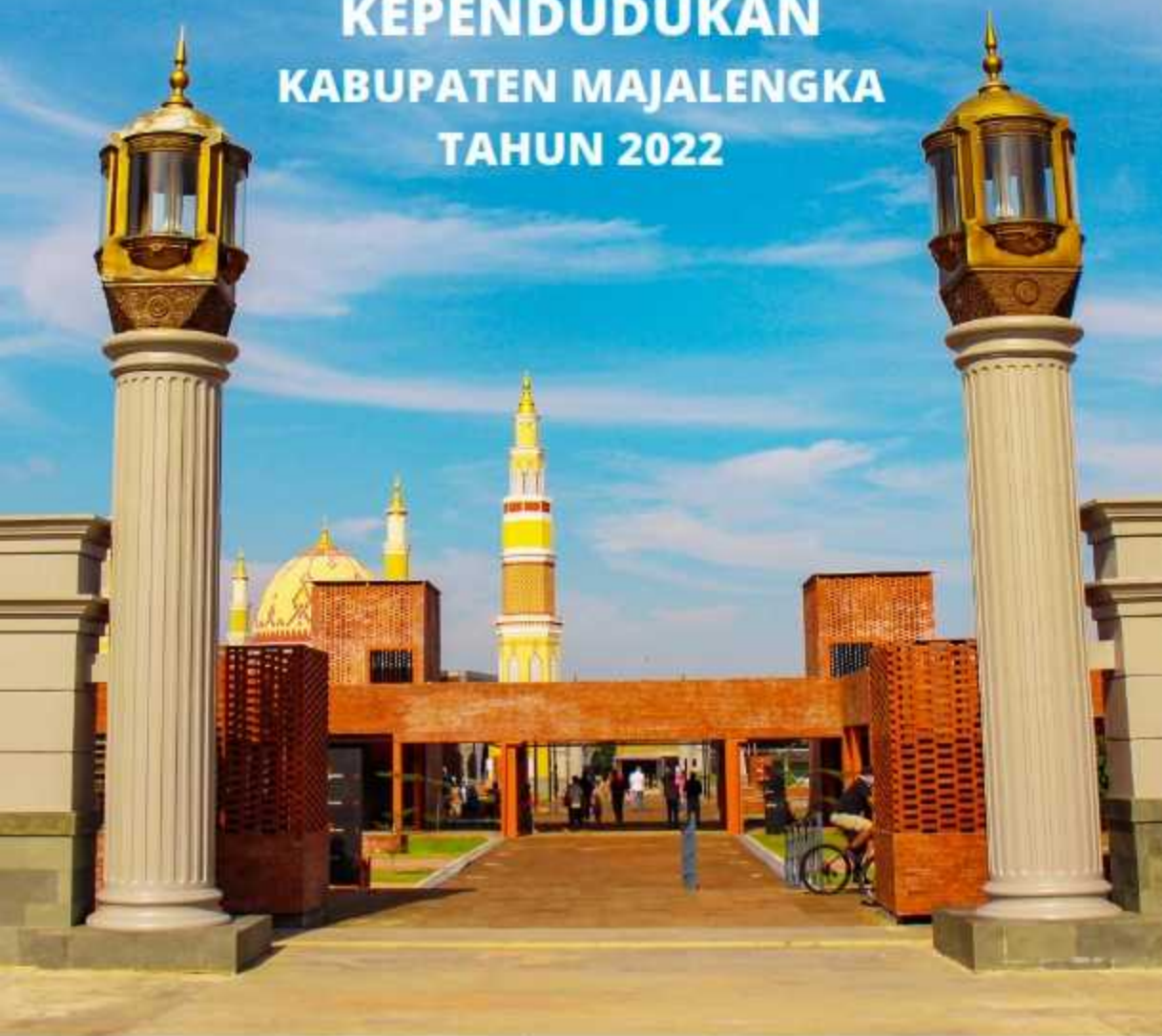




Bappedalitbang
#TERENCANA

PROFIL PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022



LAPORAN AKHIR



PT. ANDRA CIPTA CONSULT

PLANNING | DESIGN ENGINEERING | MANAGEMENT CONSULTANT

Jl. Siliwangi VII No. 42 Cijagra Kec. Buahbatu Kota Bandung 40295 Jawa Barat

SPK No : Ku/03/432-Litbang Tanggal 17 Mei 2022

Kode Rekening : 5.1.02.02.09.0003 Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Sasaran	6
1.5. Ruang Lingkup	7
1.6. Kedudukan	8
1.7. Pendekatan Pengembangan Dokumen.....	14
1.8. Batasan Pengertian.....	18
 BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN	
2.1. Kuantitas Penduduk	22
2.1.1. Jumlah Penduduk.....	22
2.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	25
2.1.3 <i>Total Fertility Rate</i> (TFR).....	26
2.1.4. Ratio Beban Ketergantungan atau Dependency Ratio (DR).....	27
2.1.5. Penduduk Lanjut Usia	29
2.2. Kualitas Penduduk	30
2.2.1. Pendidikan	30
2.2.2. Kesehatan	35
2.2.3. Ekonomi.....	42
2.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk.....	46
2.3.1. Persebaran Penduduk.....	47
2.3.2. Mobilitas Penduduk	48
2.4. Pembangunan Keluarga	49
2.4.1. Status Perkawinan	49
2.5. Administrasi Kependudukan	50

2.5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga.....	50
2.5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	51
2.5.3. Kepemilikan Akta.....	52

BAB III PROYEKSI PENDUDUK

3.1. Kuantitas Penduduk.....	56
3.1.1. Pertumbuhan Penduduk	56
3.1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	57
3.1.3. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR).....	58
3.1.4. Ratio Beban Ketergantungan atau <i>Dependency Ratio</i> (DR).....	59
3.1.5. Penduduk Lanjut Usia	61
3.2. Kualitas Penduduk	62
3.2.1. Pendidikan	63
3.2.2. Kesehatan	67
3.2.3. Ekonomi.....	73
3.3. Persebaran dan Mobilitas	76
3.3.1. Persebaran	77
3.3.2. Mobilitas.....	77
3.4. Pembangunan Keluarga	78
3.4.1. Status Perkawinan	78
3.5. Administrasi Kependudukan	79
3.5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga.....	79
3.5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	80
3.5.3. Kepemilikan Akta Kelahiran	81
3.5.4. Kepemilikan Akta Perkawinan.....	82
3.5.5. Kartu Identitas Anak.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	85
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2021	14
Tabel 2.2 Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Kabupaten Majalengka tahun 2021....	24
Tabel 2.3 Jumlah Rumah Sakit dan Poliklinik di Kabupaten Majalengka.....	27
Tabel 2.4 Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Majalengka ..	27
Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Majalengka Tahun 2017 - 2021	28
Tabel 2.6 Jumlah Dokter di Kabupaten Majalengka Tahun 2017 - 2021	28
Tabel 2.7 Jumlah Dokter Menurut Unit Kerja Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka...	29
Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Tujuan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka ...	4
Gambar 1.2 Kedudukan dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan	6
Gambar 1.3 Kedudukan dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah	7
Gambar 1.4 Kedudukan Dokumen Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah	7
Gambar 1.5 Kedudukan Dokumen Dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Pemerintah Daerah	8
Gambar 1.6 Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi Dokumen	10
Gambar 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2021	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2019-2021	14
Grafik 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2017 sampai tahun 2021	16
Grafik 2.3 Total Fertility Rate Kabupaten Majalengka Tahun 2017 sampai tahun 2021	17
Grafik 2.4 <i>Dependency Ratio</i> Kabupaten Majalengka	18
Grafik 2.5 Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kabupaten Majalengka	19
Grafik 2.6 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka	21
Grafik 2.7 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka	21
Grafik 2.8 APK dan APM PAUD Kabupaten Majalengka	22
Grafik 2.9 APK dan APM SD Kabupaten Majalengka	23
Grafik 2.10 APK dan APM SMP Kabupaten Majalengka	23
Grafik 2.11 Angka Kematian Bayi Kabupaten Majalengka	25
Grafik 2.12 Angka Kematian Balita Kabupaten Majalengka Tahun 2017 sampai tahun 2021	25
Grafik 2.13 Angka Kematian Ibu Kabupaten Majalengka	25
Grafik 2.14 Angka Harapan Hidup Kabupaten Majalengka	26
Grafik 2.15 Jumlah Posyandu Kabupaten Majalengka	27
Grafik 2.16 PDRB ADHB Kabupaten Majalengka	31
Grafik 2.17 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Majalengka	32
Grafik 2.18 IPM Kabupaten Majalengka	32
Grafik 2.19 Jumlah Migrasi di Kabupaten Majalengka	35
Grafik 2.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Kabupaten Majalengka tahun 2021	36
Grafik 2.21 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Majalengka	37
Grafik 2.22 Jumlah Kepemilikan KTP di Kabupaten Majalengka	38
Grafik 2.23 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Majalengka	39
Grafik 2.24 Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Majalengka	39
Grafik 2.25 Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Majalengka	40
Grafik 3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	41

Grafik 3.2 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	42
Grafik 3.3 Proyeksi TFR di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	43
Grafik 3.4 Proyeksi <i>Dependency Ratio</i> di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 ...	44
Grafik 3.5 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Lanjut Usia di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	45
Grafik 3.6 Proyeksi Angka Harapan Sekolah Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	46
Grafik 3.7 Proyeksi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	46
Grafik 3.8 Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang PAUD Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	47
Grafik 3.9 Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD sederajat Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	48
Grafik 3.10 Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP sederajat Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	48
Grafik 3.11 Proyeksi Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	49
Grafik 3.12 Proyeksi Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	50
Grafik 3.13 Proyeksi Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	50
Grafik 3.14 Proyeksi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	51
Grafik 3.15 Proyeksi Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	51
Grafik 3.16 Proyeksi Jumlah Posyandu di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 ..	52
Grafik 3.17 Proyeksi Jumlah Tenaga Kesehatan dan Dokter di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	53
Grafik 3.18 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	53
Grafik 3.19 Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	54
Grafik 3.20 Proyeksi IPM di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	55

Grafik 3.21 Proyeksi Kepemilikan KK di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	57
Grafik 3.22 Proyeksi Kepemilikan KTP di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 ...	58
Grafik 3.23 Proyeksi Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	59
Grafik 3.24 Proyeksi Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046	59
Grafik 3.25. Proyeksi Kepemilikan KIA di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 ...	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka 2005-2025 salah satunya adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing. Dalam hal ini, Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Majalengka diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Untuk itu, dalam mewujudkan Kabupaten Majalengka dengan struktur penduduk seimbang yang ditandai dengan TFR di angka 2,2, Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk mencapai momentum demografi berupa kesempatan untuk

mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Hal inilah yang disebut dengan *demographic deviden* yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk pada fase ini betul-betul menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Pertanyaan besar adalah kapan dan bagaimana mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang tersebut. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu dalam mewujudkannya diperlukan suatu *grand design* atau rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk agar kondisi penduduk tumbuh seimbang segera terwujud yang dimulai dengan kajian situasi kependudukan daerah.

Hal pokok yang perlu dilaksanakan agar struktur penduduk tumbuh seimbang dapat terwujud adalah kepedulian semua pihak, baik unsur pemerintah, sektor swasta, maupun unsur masyarakat. Melalui kerja keras, terintegrasi dan berkesinambungan sejalan dengan semangat otonomi daerah, implementasi prinsip "Pembangunan Berwawasan Kependudukan" secara konsisten dan berkelanjutan merupakan paradigma yang tidak dapat ditawar lagi. Lebih dari itu, dengan menggabungkan amanat UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, telah memberikan gambar bahwa aspek-aspek kependudukan beserta matranya dan lingkungan hidup, perlu digaungkan dengan prinsip "Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan".

Sebagai simpulan, diperlukan suatu rencana besar yang memuat kebijakan dan program operasional baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang mampu menjadi dasar dan tolok ukur pembangunan

kependudukan di Kabupaten Majalengka. Prinsip Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan adalah paradigma dari rencana besar yang disusun tersebut. Untuk itu, perlu dibuat pengantar rancangan induk pembangunan kependudukan dalam bentuk “Profil Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Majalengka”. Arah dan target capaian pengendalian kuantitas penduduk adalah pilar utama dalam rancangan induk tersebut yang dimulai dengan kajian situasi kependudukan daerah.

1.2. Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33 dan pasal 34);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025);
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
19. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jawa Barat 2015- 2035;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka; dan

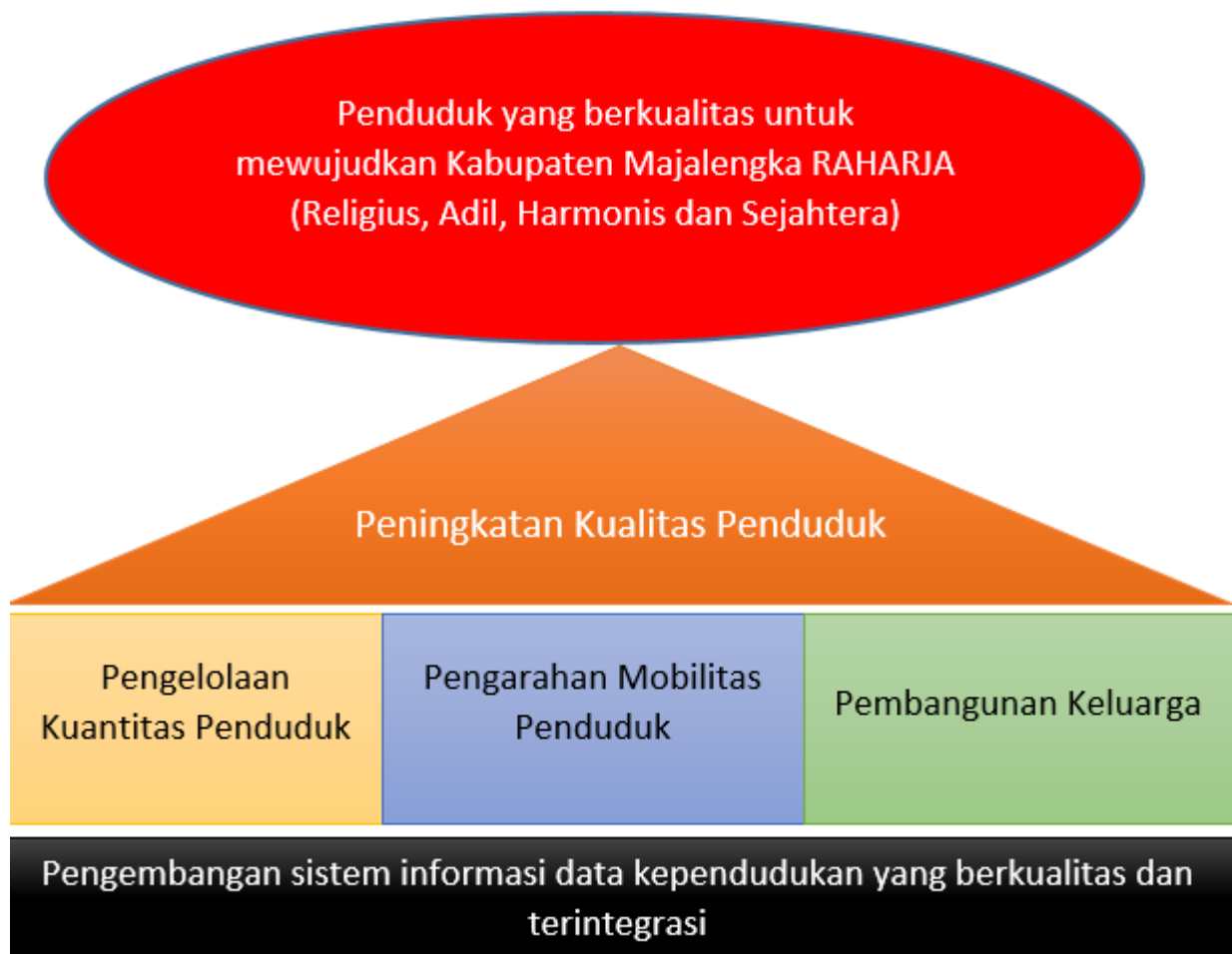
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka.

1.3. Tujuan

A. Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi untuk mencapai Majalengka RAHARJA (Religius, Adil, Makmur dan Sejahtera). Tujuan umum tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1. Memperkuat akses pelayanan Keluarga Berencana yang merata dan berkualitas.
2. Meningkatkan pembinaan peserta Keluarga Berencana, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP.
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
4. Penguatan pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Keluarga.
5. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk.
6. Mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengelolaan urbanisasi.
7. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.

B. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan. Secara konseptual, tujuan pembangunan kependudukan Majalengka selama 2020-2045 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Skema Tujuan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka

1.4. Sasaran

1. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).
2. Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun).
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR).
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need).

5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).
7. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
8. Pencapaian bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan produktivitas.
9. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi dan berbudaya tinggi.
10. Pembangunan administrasi kependudukan di Kabupaten Majalengka melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya dan terintegrasi.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang tertuang pada dokumen ini mencakup:

1. 5 Pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan.
2. Dokumen ini berlaku bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan merencanakan Pembangunan Daerah serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, lembaga non pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Majalengka.

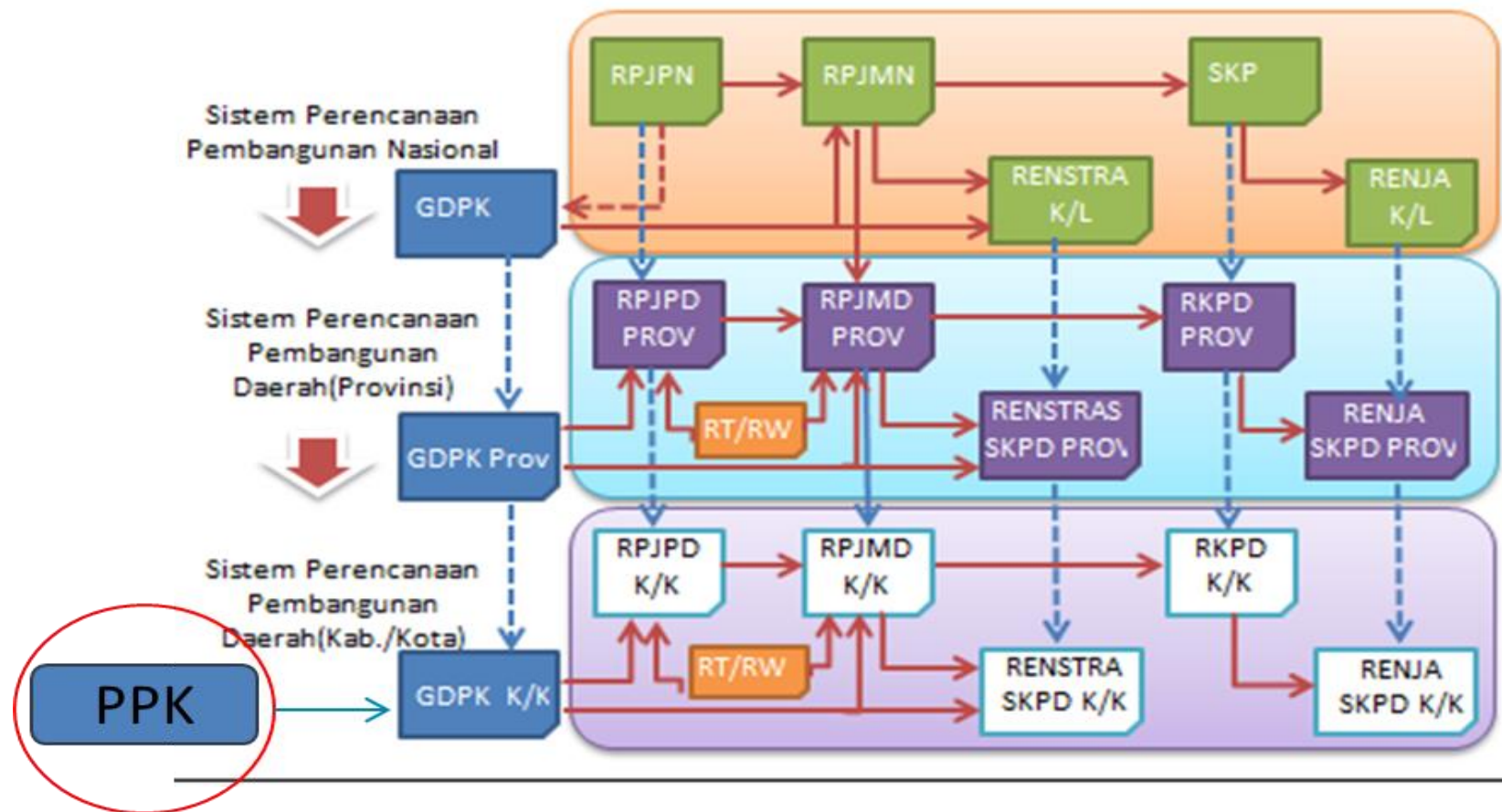
1.6. Kedudukan

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sebagai kerangka utama maka dokumen ini merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, sub kegiatan dengan program-program yang telah ditetapkan.

Selain dilatar belakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, dokumen ini juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan, tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan tersebut serta posisinya yang menjadi acuan antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah maka grand design diharapkan pula menjadi bagian dari tata aturan pemerintahan baik nasional maupun daerah.

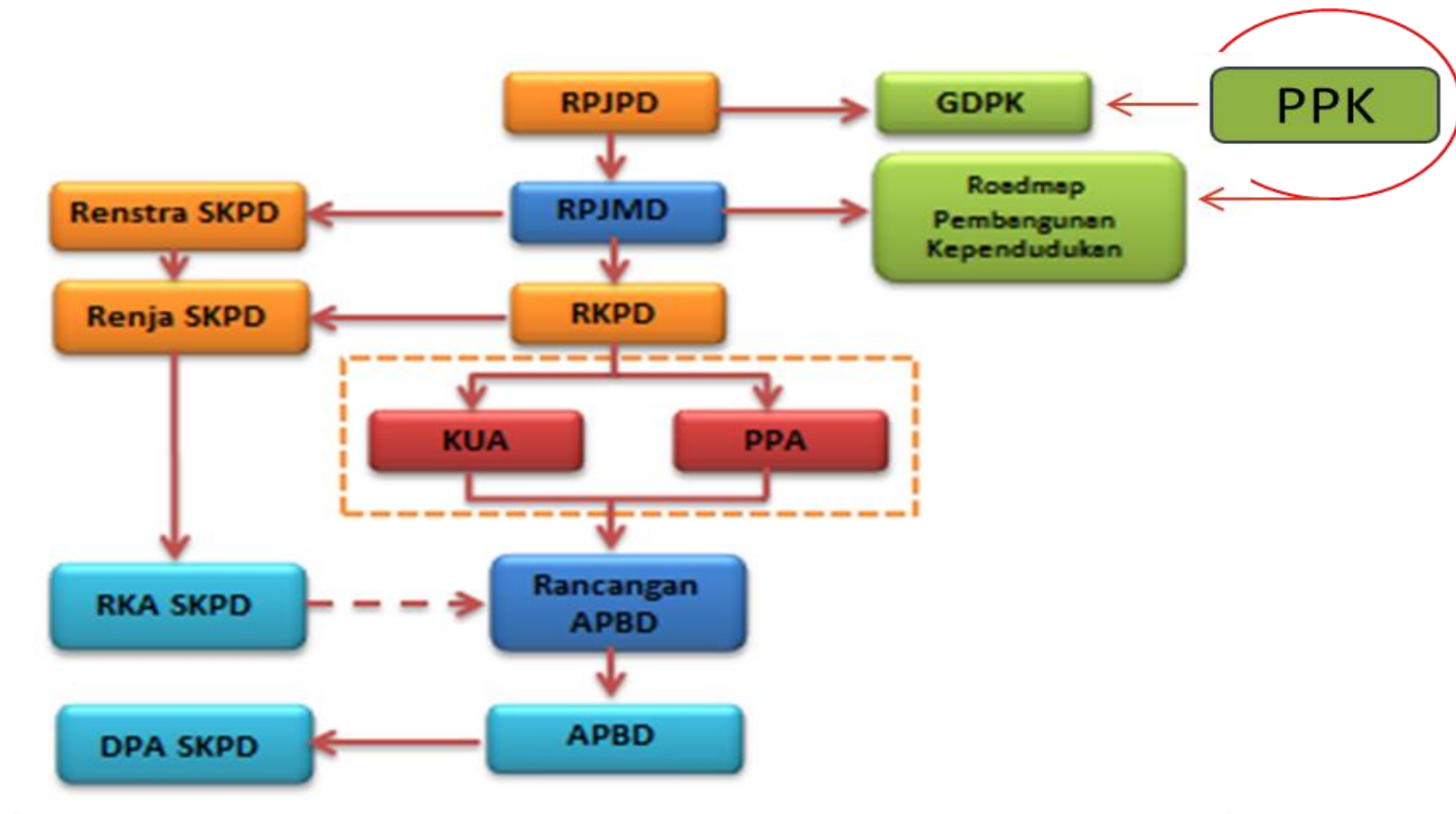
Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa dokumen ini adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional. Dokumen ini merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153

Tahun 2014, untuk menjadi acuan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan dokumen ini pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden) dan penajaman dari RPJPN.



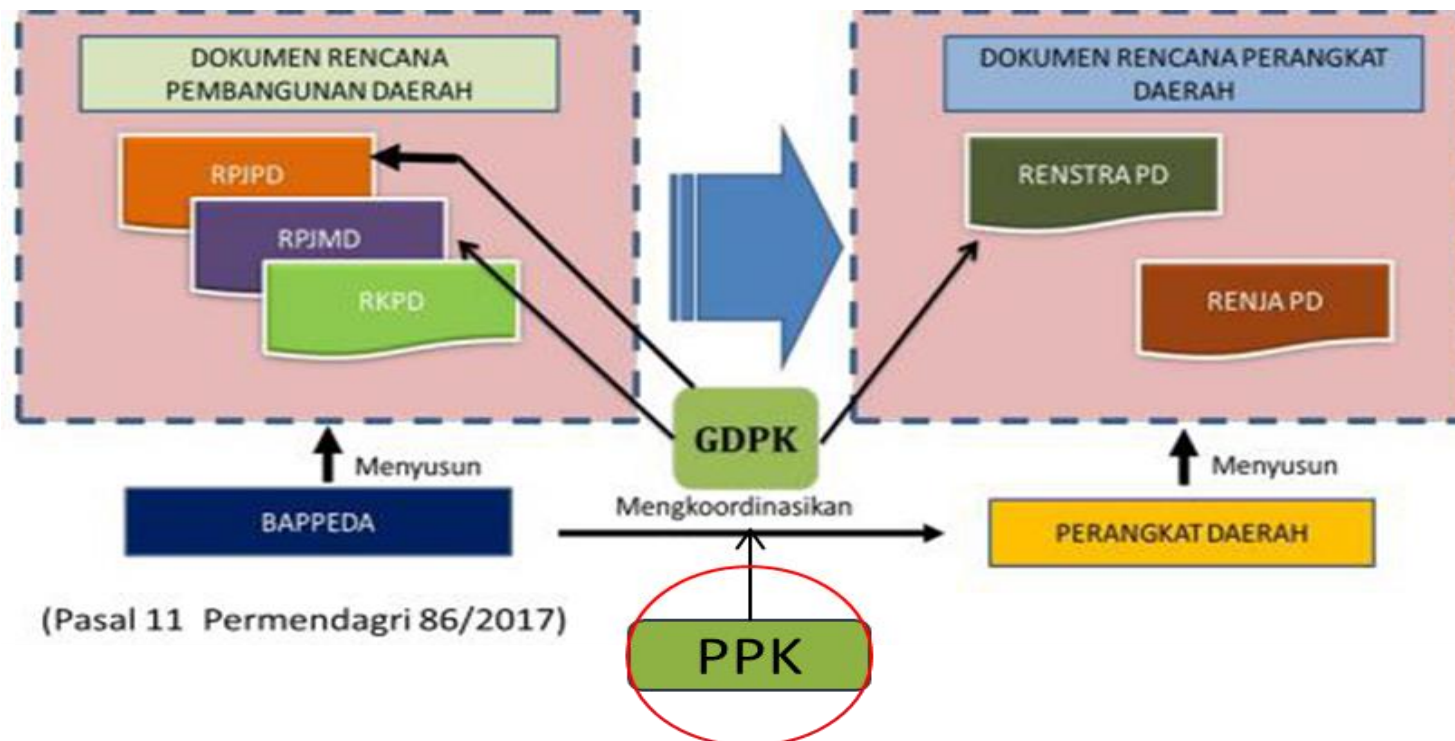
Gambar 1.2. Kedudukan dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan

Kedudukan profil pembangunan kependudukan dalam kaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



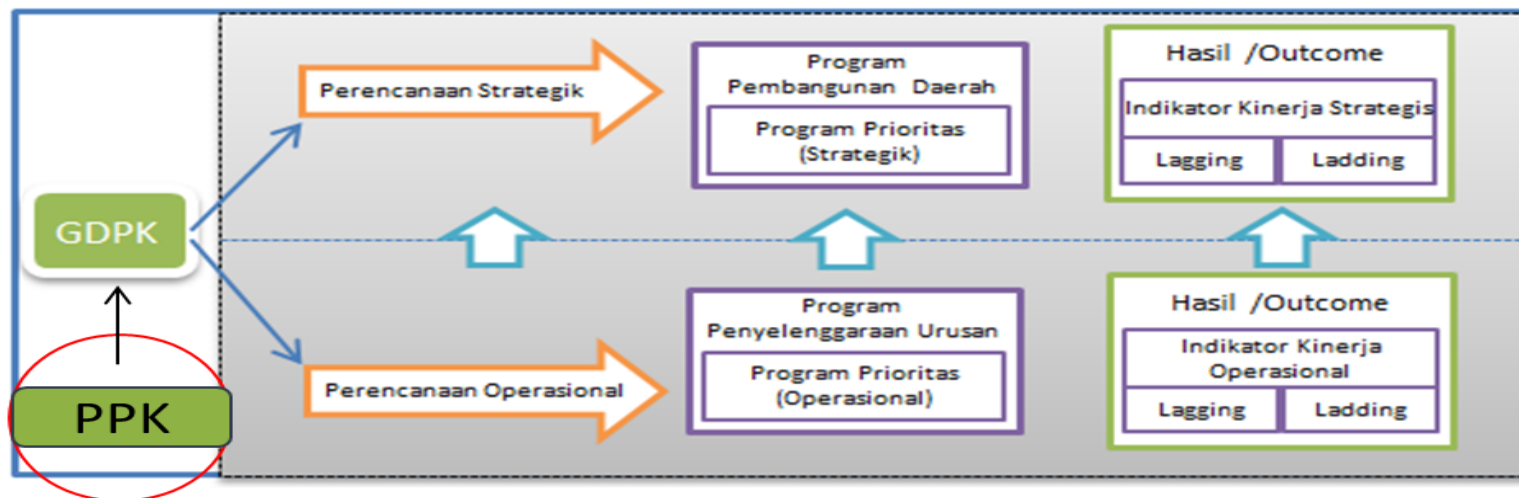
Gambar 1.3 Kedudukan dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah

Yang harus dipahami dan betul-betul diperhatikan oleh tim penyusun dokumen ini adalah hendaknya setiap jenjang wilayah mempunyai benang merah, baik dalam kerangka isu, data maupun strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan. Mengingat kedudukan dokumen ini sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, apabila antar wilayah tidak mempunyai keterkaitan maka tidak bisa disebut sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan.



Gambar 1.4 Kedudukan Dokumen Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah

Oleh karena itu, setiap jenjang (nasional, provinsi dan kabupaten) dalam menyusun GDPK 5 pilar memperhatikan data-data, isu strategis, serta strategi dan kebijakan yang berada di lingkup atas maupun di bawahnya secara berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Karena nantinya GDPK 5 Pilar nasional merupakan gambaran besar dari GDPK 5 Pilar seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, GDPK 5 Pilar Provinsi merupakan gambaran besar GDPK 5 Pilar seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya serta dalam menentukan strategi dan kebijakan mengacu pada strategi nasional, sedangkan GDPK 5 Pilar Kabupaten/Kota akan menjadi dokumen yang lebih operasional dalam menangani berbagai persoalan kependudukan yang muncul, dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi. Dengan keterpautan inilah maka GDPK 5 Pilar akan menjadi dokumen rujukan pembangunan kependudukan yang terpercaya.



Gambar 1.5 Kedudukan Dokumen Dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Pemerintah Daerah

1.7. Pendekatan Pengembangan Dokumen

Pendekatan yang digunakan dalam pembuatan dokumen ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang bersumber pada data Sekunder. Dalam penyusunan dokumen ini sumber data merupakan bagian paling penting sehingga dalam hal ini dokumen ini mengambil data dari DP3AKB, Disdukcapil, Dinkes, Disdik, dan data dari dinas terkait lainnya. Berdasarkan kedudukan dokumen ini terlihat bahwa RPJPN berperan sebagai rujukan utama sumber derivasi.

Selain itu dapat ditemukan pula dokumen yang berperan sebagai pedoman terkait penyelenggaraan pembangunan kependudukan, yakni Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan (Stranas Lansia, Stranas Penurunan Stunting, Stranas Pendidikan, Stranas Tata Ruang dll). Selain itu dapat pula ditemui fakta bahwa sejumlah pelaku pembangunan non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor dan agensi internasional yang secara independen mengimplementasikan strategi yang berdampak positif bagi penerima manfaat bidang pembangunan kependudukan, meskipun tanpa merujuk pada dokumen kebijakan pembangunan pemerintah di bidang kependudukan. Pada sisi yang lain juga penting kiranya melihat sejumlah program pembangunan di bidang kependudukan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya yang memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan di bidang kependudukan.

Pertimbangan terhadap kondisi tersebut serta kebutuhan untuk memperkecil gap/inkoherensi yang terdapat dalam dokumen kebijakan pembangunan kependudukan kemudian memunculkan strategi formulasi Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi 3 jalur yakni:

1. Kajian dokumen kebijakan,
2. Kajian program unggulan dan praktik unggulan model pembangunan bidang kependudukan,
3. Kajian akademik.

Sebagaimana tertera pada gambar 1-2, proses formulasi tersebut dimulai melalui kajian dokumen kebijakan yang diarahkan guna menelaah dokumen RPJPN serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan sehingga isu, visi dan strategi bidang pembangunan kependudukan, yang akan menjadi sumber derivasi, dapat teridentifikasi.

Selanjutnya, kajian program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah dikaji untuk mencermati tentang efektivitas program eksisting terhadap penyelesaian persoalan bidang kependudukan yang telah dideskripsikan dalam dokumen RPJPN serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan.

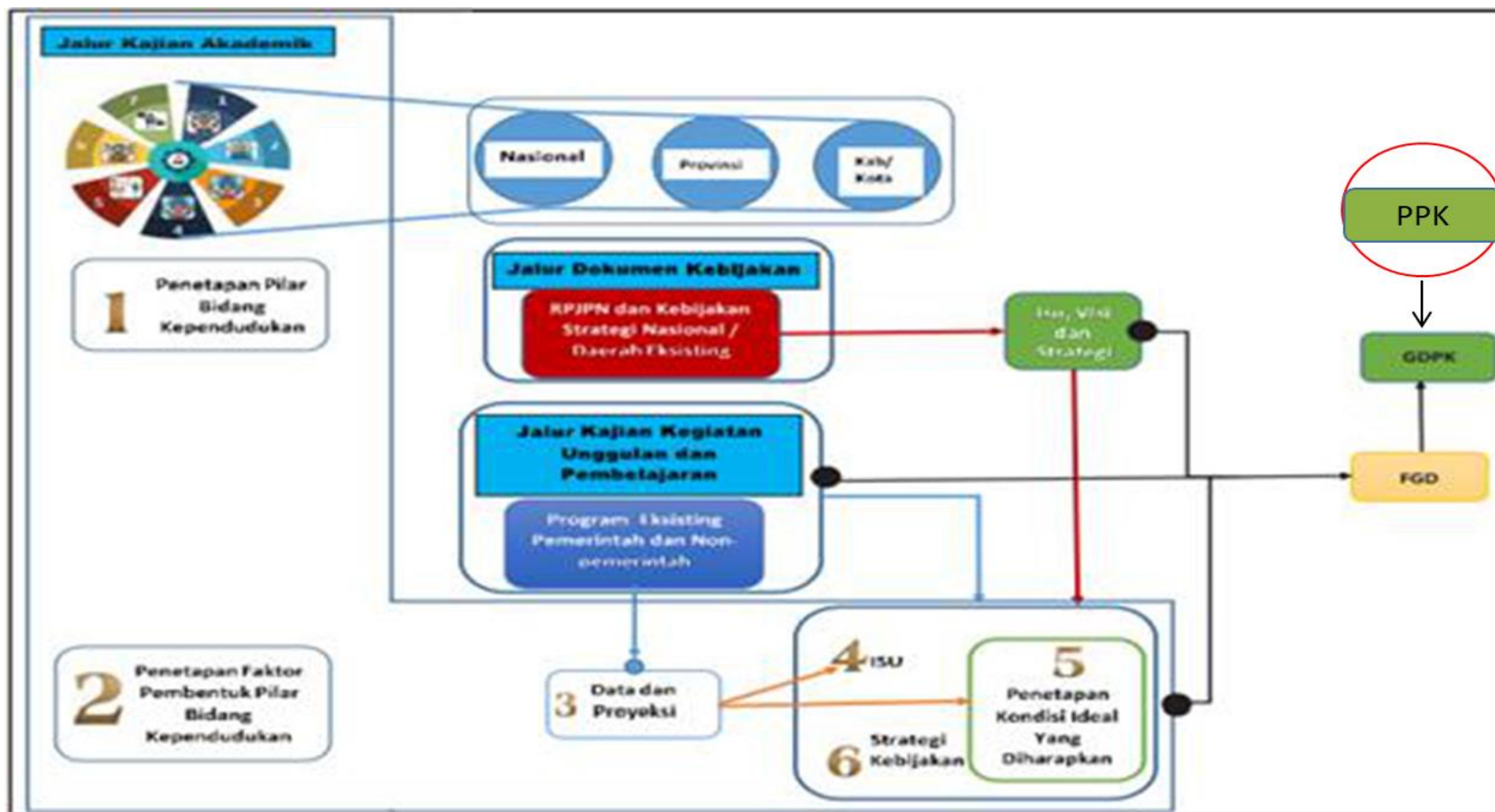
Pada sisi lain, kajian akademik dibangun untuk:

1. Mengurai kompleksitas persoalan bidang kependudukan ke dalam pilar dan faktor pembentuk pilar bidang kependudukan, serta
2. Memberi alur logika yang koheren atas derivasi di tingkat dokumen *grand design*.

Sehingga dapat diambil gambaran bahwa penetapan isu strategis dalam pembangunan kependudukan dilakukan melalui analisis korelasi antara tren faktor pembentuk pilar kependudukan dengan tren realisasi program pemerintah (analisis gap). Sementara visi dibentuk melalui hasil kajian dokumen kebijakan yang didukung verifikasi atas realisasi program yang tengah berjalan. Adapun strategi atau kebijakan dikembangkan berdasar preseden program unggulan dan praktik model

pembangunan bidang kependudukan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan (didapatkan dari kajian atau pandangan secara akademis).

Hasil yang diperoleh dari 3 (tiga) jalur kajian tersebut pada hakikatnya bersifat teknokratis. Oleh karena itu, diperlukan forum konsultasi/*Focussed Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan untuk memverifikasi hasil kajian lalu menghasilkan konsensus yang menjadi materi dasar Grand Design Pembangunan Kependudukan. FGD dilaksanakan dengan mendistribusikan peserta berdasar kedekatan lingkup kelembagaan dan kontribusi ke dalam kelompok kerja penyusunan GDPK 5 pilar.



Gambar 1.6 Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi Dokumen

1.8. Batasan Pengertian

Beberapa batasan pengertian dalam dokumen ini, antara lain:

1. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam *roadmap* Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
2. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
4. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
6. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
7. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.

8. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
10. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
18. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
19. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
20. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
21. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
22. *Roadmap* merupakan bentuk operasionalisasi grand design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, *roadmap* bersifat *living document* dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN

DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Visi yang diemban oleh Kabupaten Majalengka dalam RPJMD 2018-2023, yaitu Mewujudkan Tatahan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis, dan Sejahtera. Bagaimana pembangunan manusia Kabupaten Majalengka diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berbudaya sehingga memiliki daya saing. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Majalengka merupakan masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat dan mandiri serta mampu bersaing dalam kehidupan sehingga menjadi potensi yang memiliki kapabilitas untuk memenuhi pasar kerja lokal, nasional dan internasional.

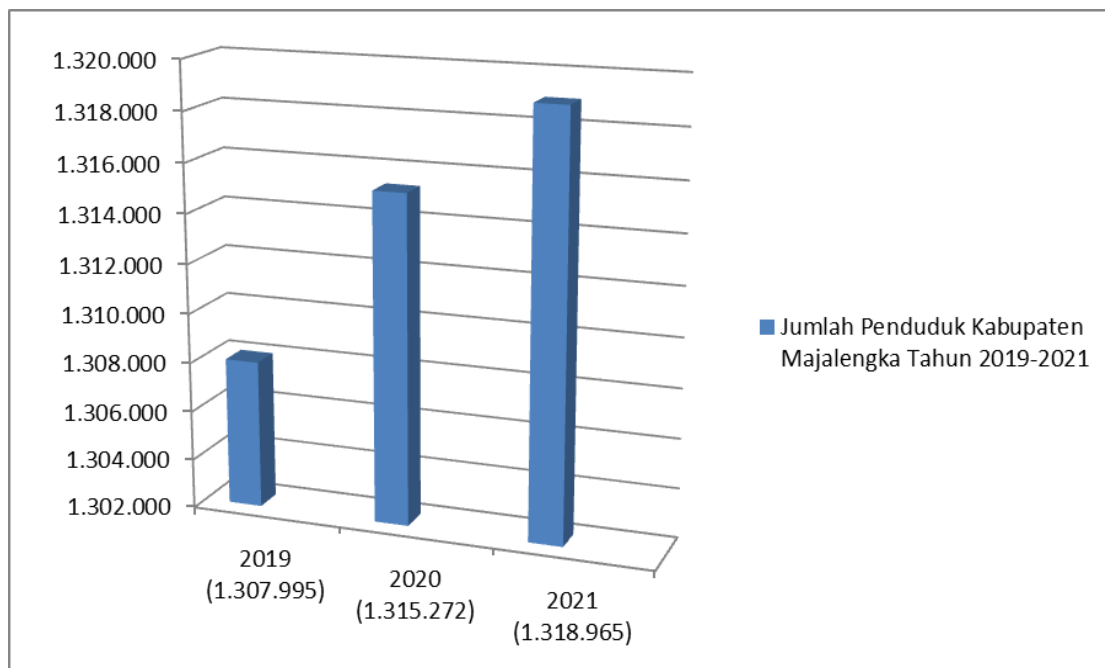
Pada bagian ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 5 pilar GDPK yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, ketahanan keluarga dan administrasi kependudukan.

2.1. Kuantitas Penduduk

Penduduk Kabupaten Majalengka saat ini sebesar 1.318.965 jiwa (BPS Kab. Majalengka, 2021) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38% pada tahun 2020 sampai tahun 2021 dengan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,32. Dalam kurun waktu jangka panjang, kondisi yang diharapkan adalah penduduk tumbuh seimbang dan dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan positif dan bukan menjadi beban bagi pembangunan di Kabupaten Majalengka. Berikut ini adalah gambaran dari beberapa hal yang berkaitan dengan kuantitas penduduk Kabupaten Majalengka seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR), angka beban ketergantungan atau Dependency Ratio (DR), kepadatan penduduk dan penduduk lanjut usia.

2.1.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.1. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2019-2021

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka mengalami pertambahan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu banyaknya kelahiran dan migrasi masuk karena banyak pendirian pabrik sehingga menarik penduduk wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya untuk migrasi ke Kabupaten Majalengka.

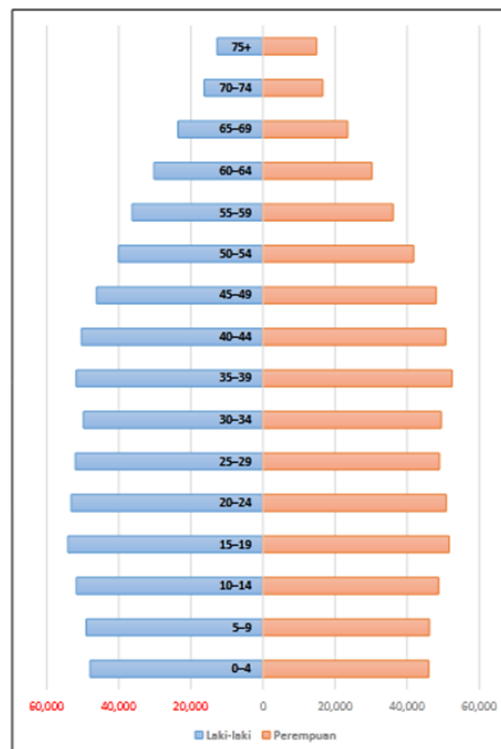
Tabel berikut ini menggambarkan komposisi penduduk di Kabupaten Majalengka pada tahun 2021:

Tabel 2.1. Komposisi Penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2021

Usia	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
0-4	47.828	46.014	93.842
5-9	48.861	46.155	95.016
10-14	51.591	48.705	100.296
15-19	53.963	51.657	105.620
20-24	53.069	50.867	103.936
25-29	51.904	48.958	100.862
30-34	49.627	49.424	99.051
35-39	51.646	52.447	104.093
40-44	50.215	50.702	100.917
45-49	45.993	48.055	94.048
50-54	39.881	41.781	81.662
55-59	36.148	36.087	72.235
60-64	30.087	30.249	60.336
65-69	23.427	23.481	46.908
70-74	16.140	16.566	32.706
75+	12.571	14.866	27.437
Jumlah	662.951	656.014	1.318.965

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

Dari tabel komposisi penduduk tersebut dapat digambarkan pada piramida penduduk berikut ini:



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka 2021

Gambar 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2021

Dari gambar piramida tersebut dapat dilihat bahwa bentuk piramida penduduk mulai mengalami pergeseran dari piramida penduduk muda (ekspansif) ke piramida stationer (seimbang). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kelahiran dan program KB yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka berhasil menekan angka kelahiran. Disisi lain dapat dilihat bahwa jumlah terbesar yang digambarkan oleh piramida penduduk diatas berada pada usia 15-19 tahun, hal ini akan berdampak pada penyediaan fasilitas pendidikan menengah dan penciptaan lapangan kerja di masa depan yang lebih banyak mengingat jumlah usia yang cukup besar pada rentang usia tersebut.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Majalengka cenderung mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kinerja yang ditunjukkan DP3AKB Kabupaten Majalengka harus lebih ditingkatkan kembali agar laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka dapat mencapai laju pertumbuhan penduduk ideal di masa yang akan datang.



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

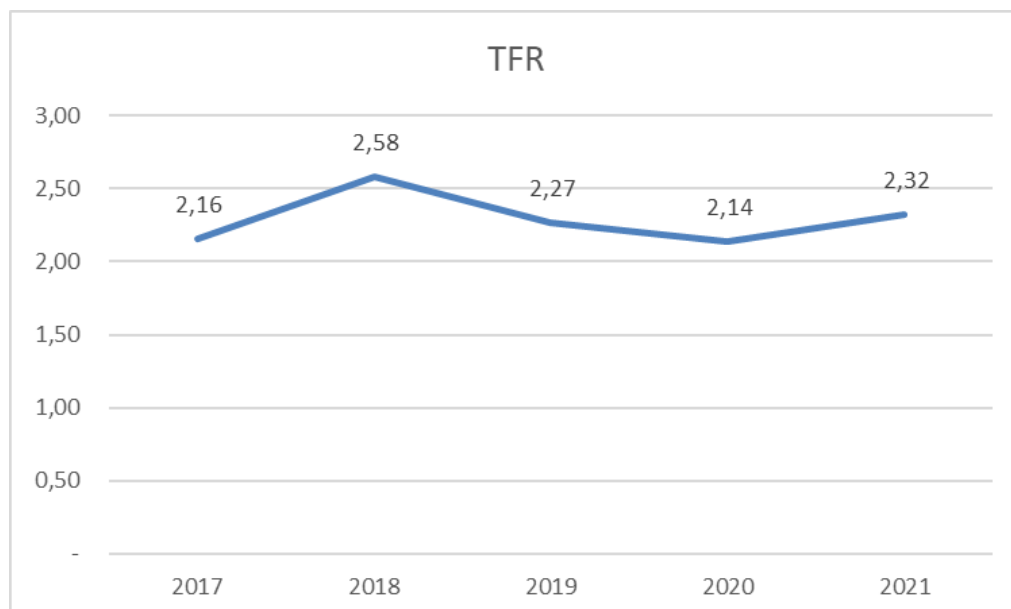
Grafik 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Majalengka
Tahun 2017 sampai tahun 2021

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka cenderung mengalami penurunan yaitu 2,29 % pada tahun 2019 menjadi 0,56 % pada tahun 2020 dan naik kembali 0,65 % pada tahun 2021. Upaya untuk terus menekan angka laju pertumbuhan penduduk ini harus tetap ditingkatkan mengingat kondisi ideal laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 0,5 %.

2.1.3 Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total merupakan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan hidup oleh seorang perempuan dari mulai usia reproduksi sampai akhir masa reproduksinya (usia 15-49 tahun). TFR ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka sehingga perlu adanya upaya untuk menekan angka TFR ini agar berada pada kondisi yang ideal.

TFR Kabupaten Majalengka dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Sumber: DP3AKB Kabupaten Majalengka 2021

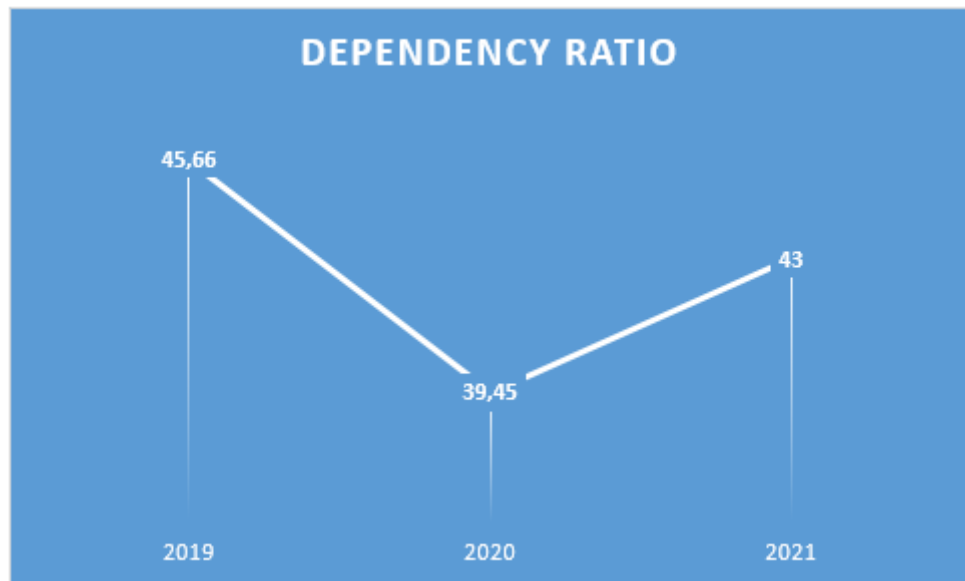
Grafik 2.3. *Total Fertility Rate* Kabupaten Majalengka
Tahun 2017 sampai tahun 2021

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan angka *Total Fertility Rate* (TFR) dari tahun 2018 yaitu 2.58 dan di tahun 2021 menjadi 2.32. Tentu saja hal ini cukup menggembirakan, namun upaya untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) menghendaki prasyarat tingkat fertilitas yang lebih rendah

lagi, yaitu ke tingkat *replacement level* ideal yang merata di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten Majalengka.

2.1.4. Ratio Beban Ketergantungan atau Dependency Ratio (DR)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Ratio beban ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR) Kabupaten Majalengka dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Sumber : Profil Pembangunan Daerah 2022 dan Majalengka dalam Angka 2022 (diolah)

Grafik 2.4. *Dependency Ratio* Kabupaten Majalengka

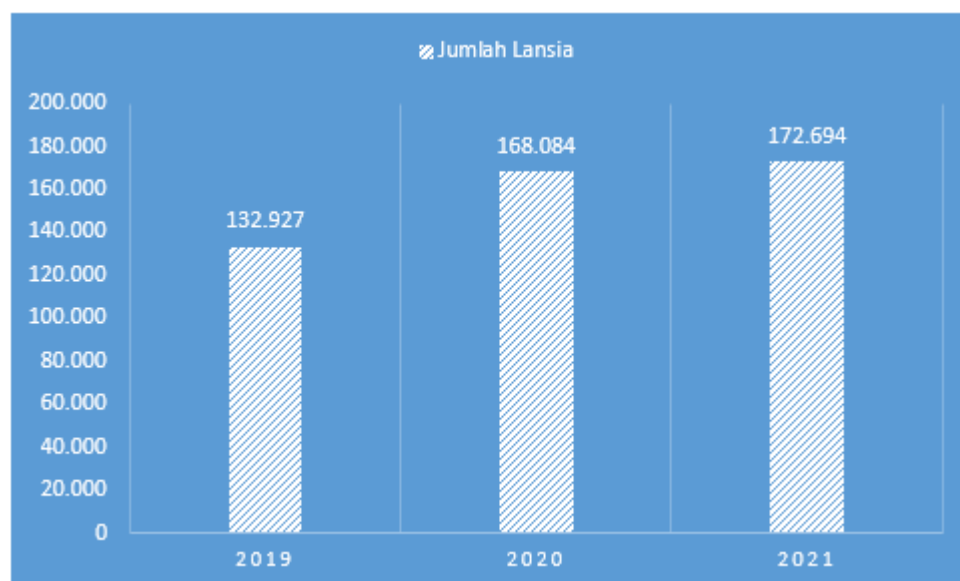
Rasio beban ketergantungan ideal berada pada angka 41 yang berarti 100 penduduk usia produktif berbanding 41 penduduk usia non produktif. Dari grafik tersebut dapat dilihat ratio beban ketergantungan di Kabupaten Majalengka tahun 2019 berada pada angka 45,66 kemudian mengalami penurunan angka pada tahun 2020 menjadi 39,45 tahun 2021 ratio beban ketergantungan di Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan menjadi 43. Hal ini menunjukkan bahwa bonus demografi telah mulai terjadi di Kabupaten Majalengka.

Hal ini harus menjadi perhatian serius karena angka ini hanya menunjukkan perbandingan usia bukan secara nyata menunjukkan produktivitas (menghasilkan barang dan jasa/bekerja) pada usia produktif. Apabila rasio beban ketergantungan ini dimanfaatkan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk (bonus demografi), namun apabila tidak dapat dimanfaatkan maka justru akan menjadi beban bagi pemerintah Kabupaten Majalengka dengan semakin bertambahnya penduduk usia produktif yang justru tidak produktif (bencana demografi).

2.1.5. Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan tahap tua dalam perkembangan individu dengan batasan usia 60 tahun ke atas, Lanjut usia adalah usia yang rentan terhadap berbagai macam masalah kesehatan baik fisik maupun psikis. Peningkatan jumlah penduduk lansia memberikan konsekuensi yang tidak sederhana. Berbagai macam tantangan akibat penuaan penduduk telah menyentuh berbagai aspek kehidupan. Untuk menyikapi kondisi ini dibutuhkan suatu program pembangunan kelanjutusiaan yang mampu mengayomi kehidupan para lansia.

Jumlah lansia dari tahun 2019 sampai tahun 2021 di Kabupaten Majalengka disajikan dalam grafik berikut ini:



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.5. Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kabupaten Majalengka

Dari tabel tersebut jelas terlihat bahwa jumlah penduduk lanjut usia semakin meningkat, dengan Umur Harapan Hidup saat ini di Kabupaten Majalengka saat ini 70,27 tentunya hal ini menjadi indikator semakin baiknya tingkat kesehatan

masyarakat. Namun hal ini perlu disikapi agar penduduk lanjut usia tetap dapat dilayani dengan baik dan mendapat fasilitas yang dibutuhkan.

2.2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk Kabupaten Majalengka yang akan dibahas dalam bagian ini mencakup pendidikan, kesehatan dan keadaan ekonomi. Dari hasil pembahasan ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kualitas penduduk Kabupaten Majalengka dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang tinggi merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa sekarang dan yang akan datang.

2.2.1. Pendidikan

Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah Kabupaten Majalengka secara serius meningkatkan mutu pendidikan demi menunjang sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sangat penting dilakukan agar Kabupaten Majalengka memiliki sumber daya manusia yang handal, mandiri dan mampu memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Dalam pembahasannya akan dilihat angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.

A. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2021

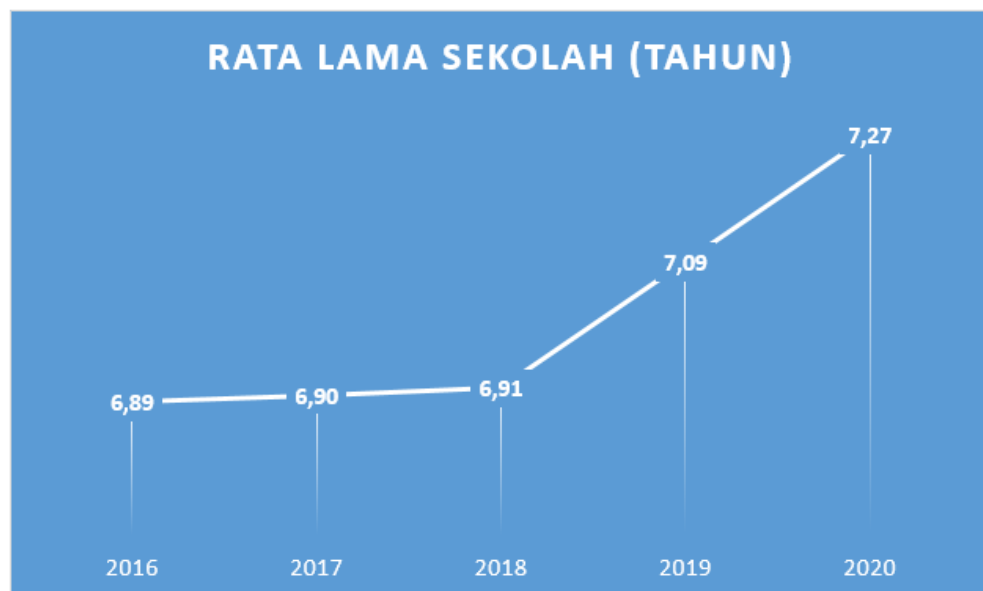
Grafik 2.6. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa angka harapan lama sekolah selalu mengalami kenaikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Majalengka, hal ini perlu ditingkatkan kembali.

B. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam

kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.7. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka

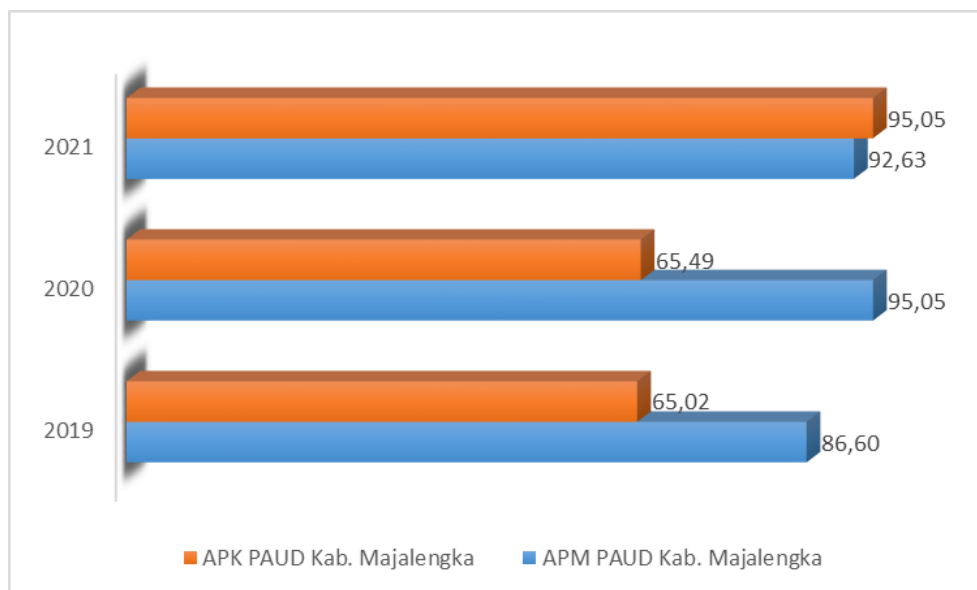
Perkembangan Rata Lama Sekolah tahun 2016-2020 menunjukkan grafik yang menaik yaitu dari 6, 89 tahun pada tahun 2016 menjadi 7, 27 tahun pada 2020. Angka ini bisa didefinisikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Majalengka secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7, 27 tahun atau hampir setara dengan SMP kelas 1.

C. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan

yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

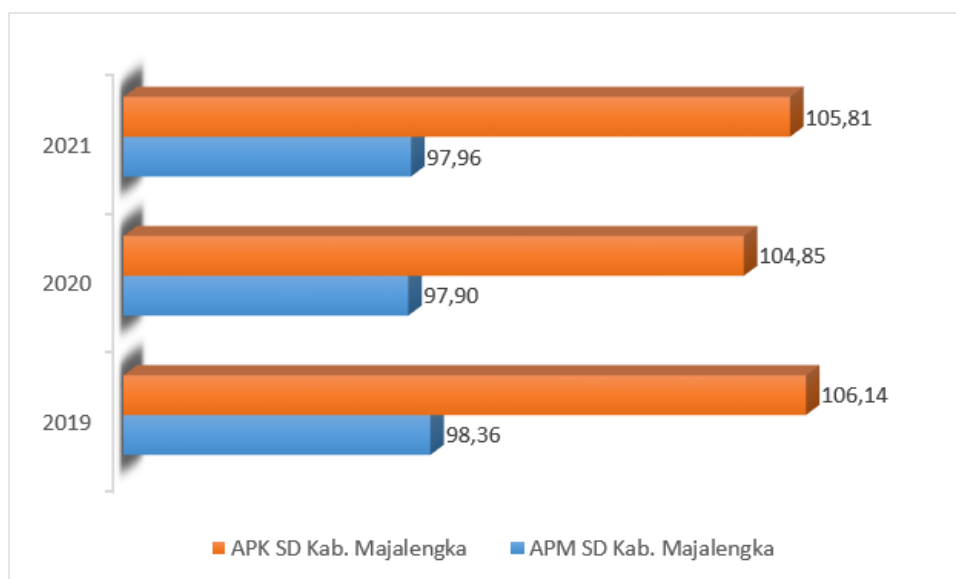
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Majalengka pada jenjang pendidikan PAUD dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.8. APK dan APM PAUD Kabupaten Majalengka

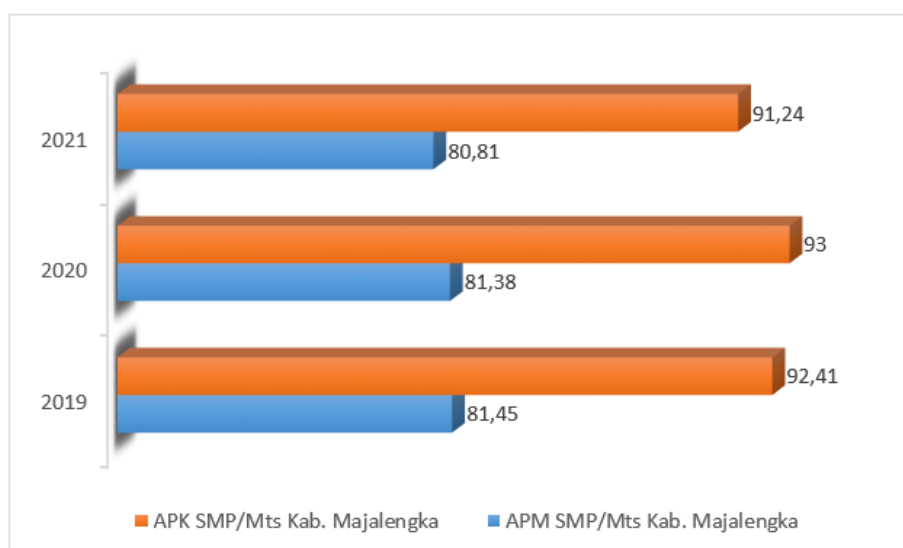
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Majalengka pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/MI sederajat dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.9. APK dan APM SD Kabupaten Majalengka

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Majalengka pada jenjang pendidikan SMP/Mts sederajat dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka

Grafik 2.10. APK dan APM SMP Kabupaten Majalengka

2.2.2. Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat merupakan tolok ukur dari kinerja bidang kesehatan sekaligus dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di Kabupaten Majalengka. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam bidang kesehatan ini meliputi: angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate (IMR), Angka Harapan Hidup (AHH) dan fasilitas kesehatan yang mencakup jumlah rumah sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, posyandu, jumlah dokter dan tenaga kesehatan.

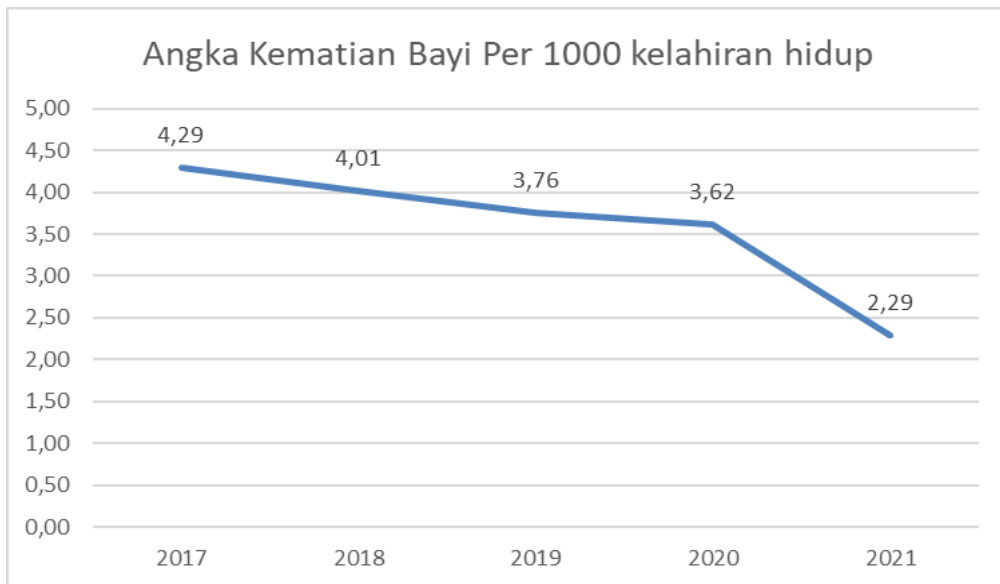
A. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Angka Kematian Bayi merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka Kematian Balita merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 5 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka Kematian Ibu merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian ibu untuk setiap 100.000 kelahiran hidup pada waktu tertentu. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Majalengka tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.2. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Kabupaten Majalengka tahun 2021

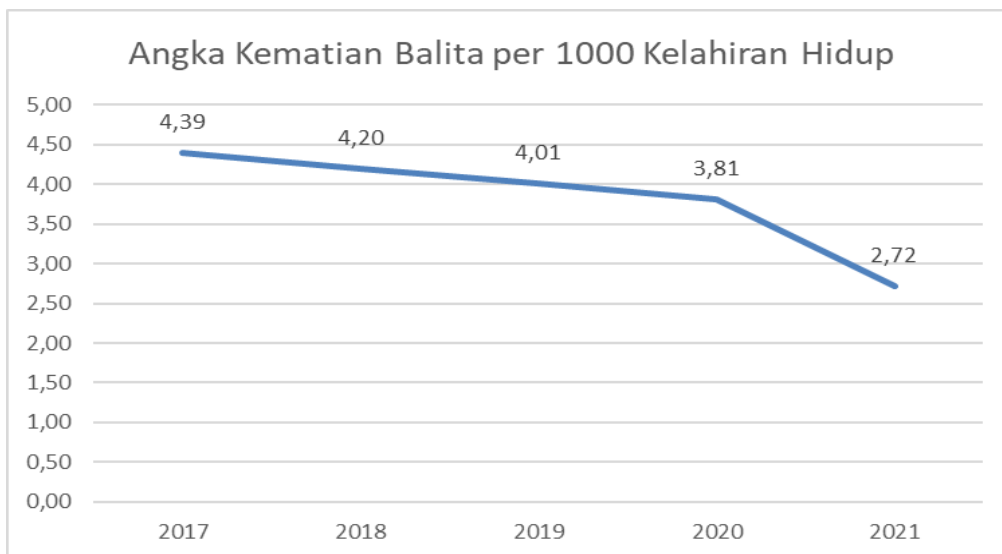
No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	per 1000 Kelahiran Hidup	4,29	4,01	3,76	3,62	2,29
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	per 1000 Kelahiran Hidup	4,39	4,20	4,01	3,81	2,72
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup	83,81	77,32	73,39	66,77	81,07

Sumber: Dinkes Kabupaten Majalengka, 2021



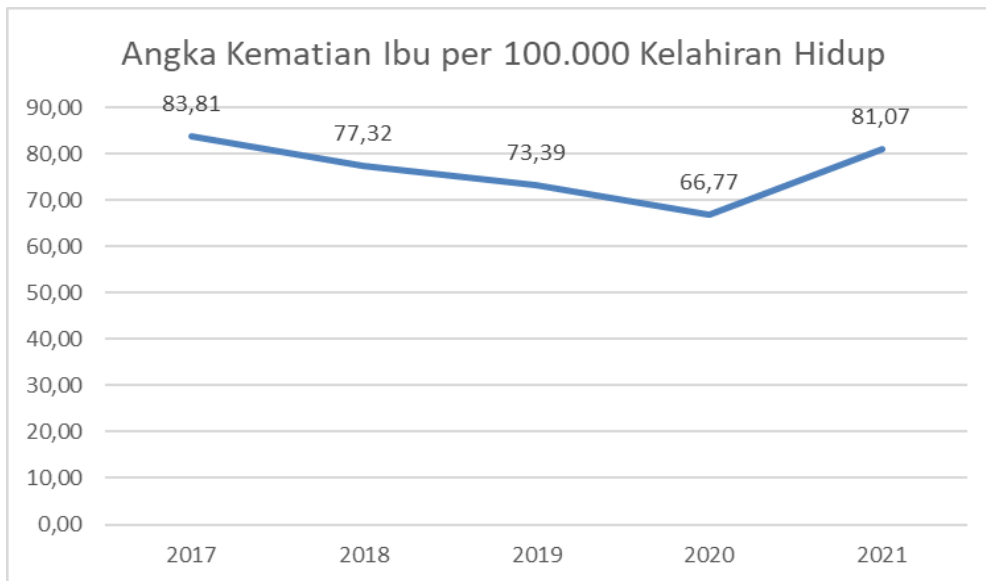
Sumber: Dinkes Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.11. Angka Kematian Bayi Kabupaten Majalengka



Sumber: Dinkes Kabupaten Majalengka 2021

**Grafik 2.12. Angka Kematian Balita Kabupaten Majalengka
Tahun 2017 sampai tahun 2021**



Sumber: Dinkes Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.13. Angka Kematian Ibu Kabupaten Majalengka

Dari tabel dan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan dari tahun 2021 sedangkan Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan pada tahun 2021. hal ini tentu membutuhkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah Kabupaten Majalengka dalam upaya menekan Angka Kematian Ibu.

B. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang akan ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu banyaknya anak lahir hidup dan banyaknya anak masih hidup. Perkembangan AHH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021

Grafik 2.14. Angka Harapan Hidup Kabupaten Majalengka

Pada rentang tahun 2017-2021 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Majalengka terus meningkat dari 69,39 tahun pada 2017 menjadi 70,46 tahun pada 2021. Angka ini bisa diartikan bahwa bayi yang baru lahir di Majalengka memiliki peluang untuk hidup hingga 70,46 tahun. Sedangkan menurut WHO, kondisi ideal AHH adalah sebesar 85 tahun, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak implementasinya masih perlu mendapat perhatian khusus.

C. Puskesmas dan Rumah Sakit

Fasilitas kesehatan yang modern dan lengkap sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Majalengka tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Jumlah Rumah Sakit dan Poliklinik di Kabupaten Majalengka

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah	unit	2	2	2	2	2
2	Jumlah Rumah Sakit Swasta	unit	2	2	3	3	3
3	Jumlah Poliklinik	unit				51	59

Sumber : Dinkes Kabupaten Majalengka 2021

Tabel 2.4. Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Majalengka

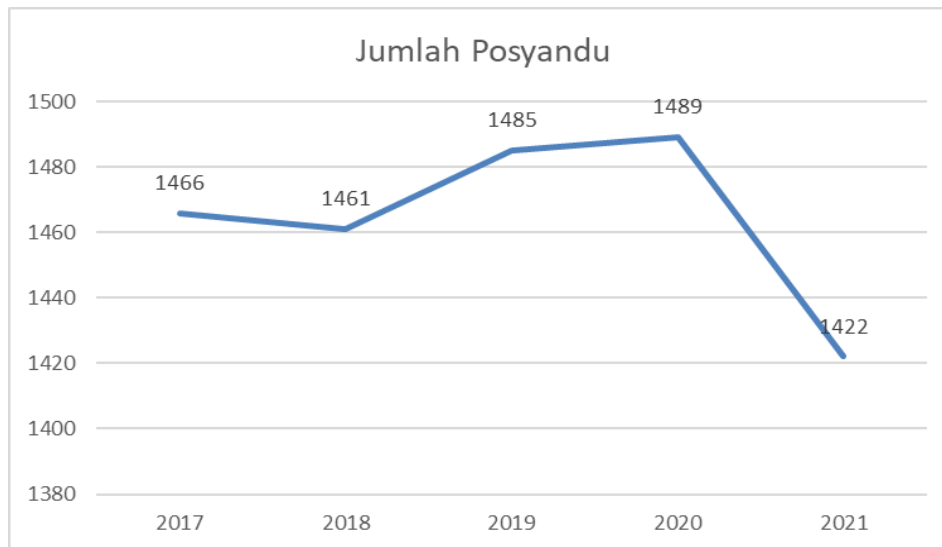
No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Seluruh Puskesmas	unit	32	32	32	32	32
2	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	unit	67	64	73	73	74

Sumber : Dinkes Kabupaten Majalengka 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada penambahan yang signifikan untuk Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas selama tahun 2019 - 2021, sedangkan untuk Poliklinik dan Puskesmas Pembantu terjadi penambahan selama tahun 2021, hal ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat serta mayoritas masyarakat yang lebih memilih Rumah Sakit Umum dan Puskesmas tentu akan membutuhkan penambahan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum.

D. Posyandu

Posyandu atau pos pelayanan terpadu adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja Puskesmas dalam rangka menciptakan generasi yang sehat dan unggul. Berikut jumlah posyandu di Kabupaten Majalengka tahun 2017 sampai dengan 2021:



Sumber: Dinkes Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.15. Jumlah Posyandu Kabupaten Majalengka

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun nya rasio posyandu terhadap balita di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2021, pada tahun lainnya jumlah posyandu di Kabupaten Majalengka selalu mengalami kenaikan. Selain fasilitas medis, hal yang sangat penting lainnya adalah dokter dan tenaga kesehatan. Jumlah dokter dan tenaga kesehatan di Kabupaten Majalengka tahun 2019-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Majalengka Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perawat	orang	891	774	816	884	1181
2	Jumlah Bidan	orang	589	555	579	552	1086
3	Jumlah Tenaga Farmasi	orang	82	80	89	80	314
4	Jumlah Tenaga Gizi	orang	50	44	47	32	55
5	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	orang	163	192	203	186	719

Sumber: Dinkes Kabupaten Majalengka 2021

Tabel 2.6. Jumlah Dokter di Kabupaten Majalengka Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter Umum	Orang	170	137	181	116	249
2	Jumlah Dokter Spesialis	Orang	54	47	64	74	76
3	Jumlah Dokter Gigi	Orang	18	19	25	20	38
4	Jumlah Dokter Gigi Spesialis	Orang	0	0	0	1	1

Sumber: Dinkes Kabupaten Majalengka 2021

Tabel 2.7. Jumlah Dokter Menurut Unit Kerja Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka

No	Unit Kerja	Satuan	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Spesialis Gigi
A	Puskesmas	*	*	*	*	*
1	Lemahsugih	Orang	2	0	1	0
2	Margajaya	Orang	3	0	0	0
3	Bantarujeg	Orang	2	0	1	0
4	Malausma	Orang	1	0	0	0
5	Cikijing	Orang	3	0	1	0
6	Cingambul	Orang	2	0	0	0
7	Talaga	Orang	3	0	0	0
8	Banjaran	Orang	2	0	0	0
9	Argapura	Orang	2	0	1	0
10	Maja	Orang	1	0	1	0
11	Majalengka	Orang	2	0	1	0
12	Munjul	Orang	2	0	2	0
13	Cigasong	Orang	2	0	1	0
14	Sukahaji	Orang	2	0	1	0
15	Salagedang	Orang	2	0	0	0
16	Sindang	Orang	1	0	0	0
17	Rajagaluh	Orang	3	0	1	0

No	Unit Kerja	Satuan	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Spesialis Gigi
18	Sindangwangi	Orang	1	0	0	0
19	Leuwimunding	Orang	2	0	1	0
20	Waringin	Orang	2	0	0	0
21	Jatiwangi	Orang	3	0	1	0
22	Loji	Orang	2	0	0	0
23	Balida	Orang	2	0	1	0
24	Kasokandel	Orang	2	0	0	0
25	Panyingkiran	Orang	2	0	1	0
26	Kadipaten	Orang	2	0	0	0
27	Kertajati	Orang	2	0	1	0
28	Sukamulya	Orang	2	0	0	0
29	Jatitujuh	Orang	3	0	1	0
30	Panongan	Orang	1	0	0	0
31	Ligung	Orang	2	0	0	0
32	Sumberjaya	Orang	3	0	1	0
B	Rumah Sakit	*				
1	RSUD Majalengka	Orang	1	6	0	0
2	RSUD Cideres	Orang	27	18	3	1
3	RS Khusus Bedah Budi Kasih	Orang	20	27	3	1
4	RSIA Mitra Plumbon	Orang	1	7	0	0
5	RSIA Livasya	Orang	8	18	0	0
6	Dinas Kesehatan	Orang	0	0	0	0
7	Labkesda	Orang	1	0	0	0
8	Lainnya.....	Orang	125	4	14	0

Sumber: Dinkes Kabupaten Majalengka 2021

Jumlah Tenaga Medis dan Dokter di Kabupaten Majalengka mengalami penambahan pada tahun 2021, hal ini perlu mendapat perhatian mengingat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat.

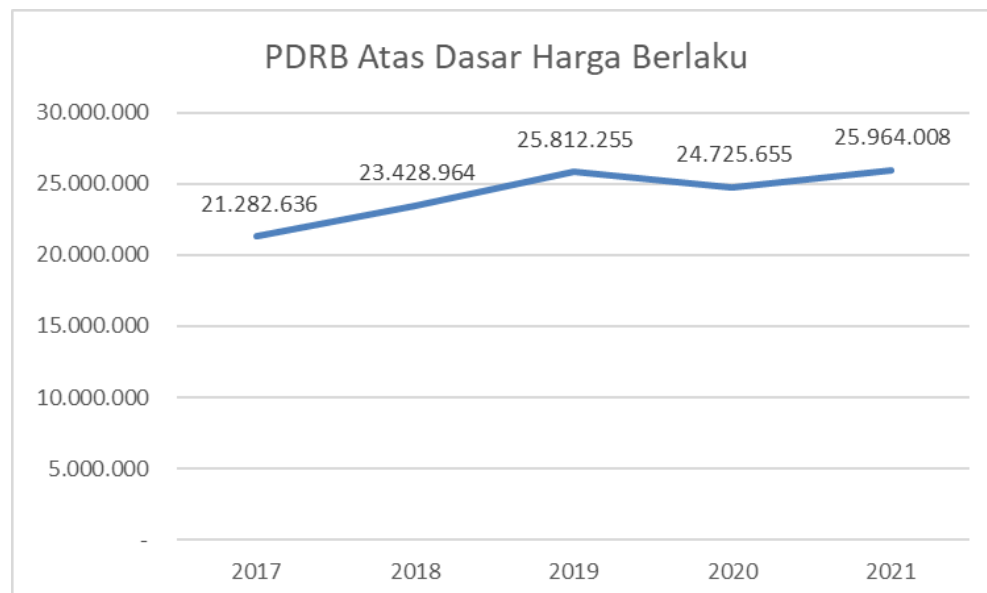
2.2.3. Ekonomi

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomia. Kata oikonomia berasal dari dua kata yaitu oikos dan nomos. oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti mengatur. jadi oikonomia berarti mengatur rumah tangga. Ekonomi

juga bisa dilihat dari Pendapatan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang akan dibahas pada bidang ekonomi meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tertentu. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Majalengka tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.16. PDRB ADHB Kabupaten Majalengka

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan menurun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka di tengah perlambatan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak awal tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka masih mengalami pertumbuhan yang positif besar pada tahun 2021.

B. Jumlah Penduduk Miskin

Dalam mengukur kemiskinan yang digunakan oleh BPS, metode yang digunakan adalah dengan mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluaran. Suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dan lain-lain. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan jenis komoditi di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka tahun 2017-2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:



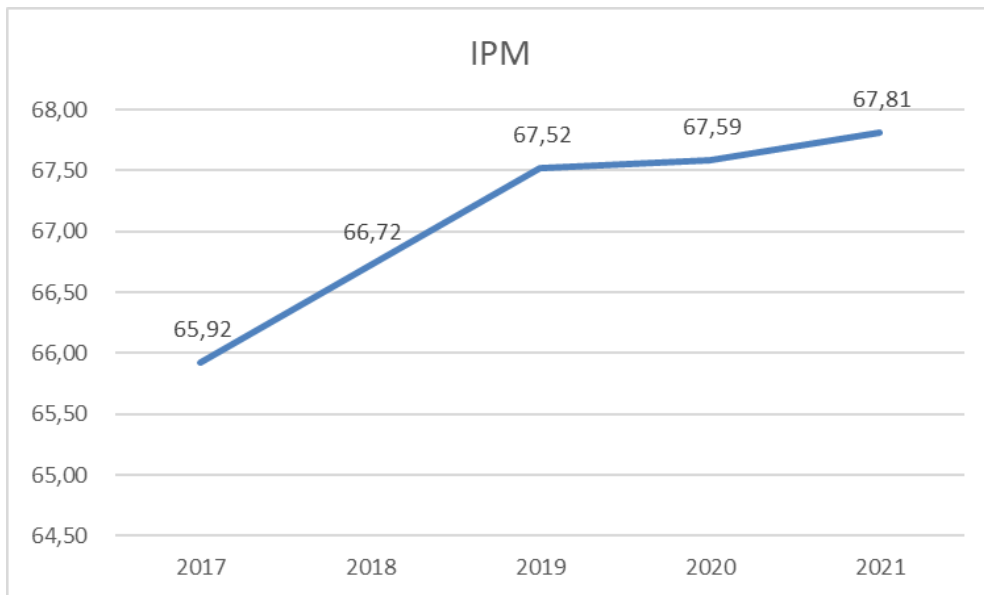
Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.17. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Majalengka

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun selama periode 2017-2021. Tahun 2017 sampai 2019 menurun namun menuju tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan, ini menandakan bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Majalengka masih terdampak oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka.

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka tahun 2017-2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.18. IPM Kabupaten Majalengka

Pada tahun 2020, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka masih berstatus “sedang” atau sebesar 67,59 poin, masih sama dengan statusnya pada tahun 2019. IPM Majalengka pada tahun 2020 tumbuh sebesar 0.10 persen dibandingkan tahun 2019. Laju pertumbuhan IPM ini merupakan selama sepuluh tahun terakhir. perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tahun 2020 membuat indikator pembentuk IPM terutama dimensi pengeluaran menurun dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menghambat laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Majalengka.

2.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk merupakan faktor yang cukup penting untuk melihat pemerataan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Untuk selanjutnya akan dibahas persebaran penduduk dan mobilitas penduduk Kabupaten Majalengka.

2.3.1. Persebaran Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk merupakan faktor yang cukup penting untuk melihat pemerataan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Untuk selanjutnya akan dibahas persebaran penduduk dan mobilitas penduduk Kabupaten Majalengka. Salah satu faktor yang cukup penting dalam pembangunan suatu wilayah dan pemerataan kesejahteraan adalah persebaran penduduk pada suatu wilayah. Tingkat persebaran penduduk akan berbeda di setiap wilayah, hal ini dipengaruhi oleh faktor potensi alam, daya dukung lingkungan, banyaknya lapangan usaha, fasilitas pendidikan dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka di tiap kecamatan pada tahun 2020 :

Tabel 2.8. Kepadatan Penduduk Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka

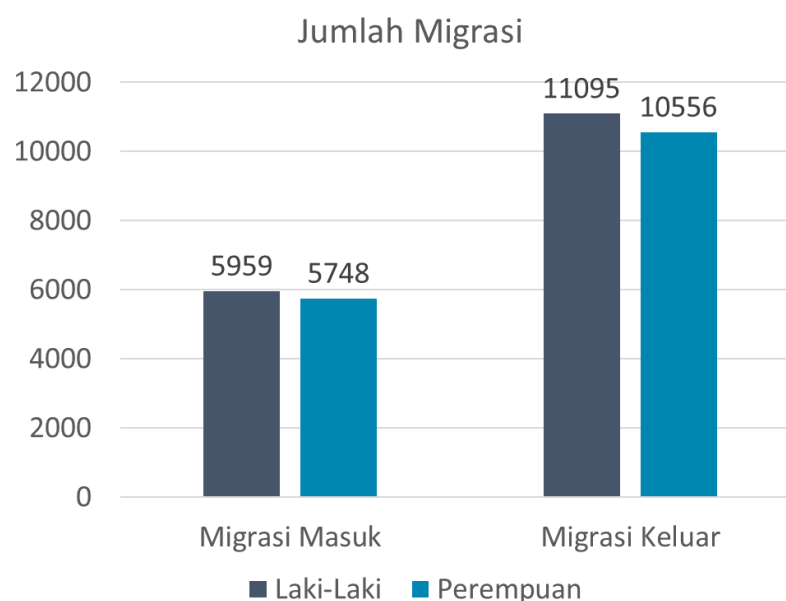
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Lemahsugih	33.006	31.605	64.611	104,43
2	Bantarujeg	23.868	23.713	47.581	100,65
3	Cikijing	34.885	33.872	68.757	102,99
4	Talaga	24.794	23.918	48.712	103,66
5	Argapura	18.625	18.129	36.754	102,74
6	Maja	26.722	26.240	52.962	101,84
7	Majalengka	36.341	36.344	72.685	99,99
8	Sukahaji	23.786	23.557	47.343	100,97
9	Rajagaluh	23.829	23.282	47.111	102,35
10	Leuwimunding	32.621	31.802	64.423	102,58
11	Jatiwangi	45.757	45.087	90.844	101,49
12	Dawuan	23.846	23.770	47.616	100,32
13	Kadipaten	23.612	23.162	46.774	101,94
14	Kertajati	23.973	24.149	48.122	99,27
15	Jatitujuh	27.675	27.930	55.605	99,09
16	Ligung	32.823	33.079	65.902	99,23
17	Sumberjaya	32.354	31.777	64.131	101,82
18	Panyingkiran	16.335	16.297	32.632	100,23
19	Palasah	26.595	26.475	53.070	100,45
20	Cigasong	18.892	18.491	37.383	102,17
21	Sindangwangi	17.395	16.931	34.326	102,74
22	Banjaran	12.684	12.735	25.419	99,60
23	Cingambul	22.099	21.481	43.580	102,88
24	Kasokandel	26.344	26.119	52.463	100,86
25	Sindang	8.551	8.603	17.154	99,40
26	Malasma	25.360	23.952	49.312	105,88
Kabupaten Majalengka		662.772	652.500	1.315.272	101,57

Sumber : Disdukcapil Kab. Majalengka, Tahun 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Jatiwangi dengan tingkat kepadatan penduduk 2290 jiwa per km², sedangkan Kecamatan kertajati adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah dengan tingkat kepadatan 351 jiwa per km².

2.3.2. Mobilitas Penduduk

Penduduk Kabupaten Majalengka tersebar di seluruh Kecamatan baik di pusat kota maupun desa atau daerah penyangganya sesuai potensi daerah masing masing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sehingga persebaran penduduk menjadi seimbang sesuai dengan daya dukung dan potensi yang dimiliki. Berikut merupakan jumlah migrasi di Kabupaten Majalengka pada tahun 2021:



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

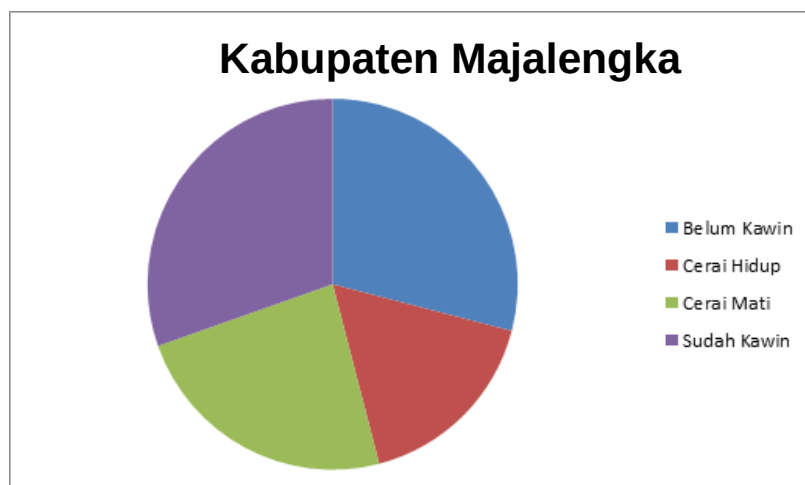
Grafik 2.19. Jumlah Migrasi di Kabupaten Majalengka

2.4. Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh karena itu, perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya. Dalam pembangunan keluarga ini mencakup status perkawinan.

2.4.1. Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada kurun waktu dan wilayah tertentu berguna bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. Status perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori, antara lain yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel grafik berikut ini:



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

Grafik 2.20. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Kabupaten Majalengka tahun 2021

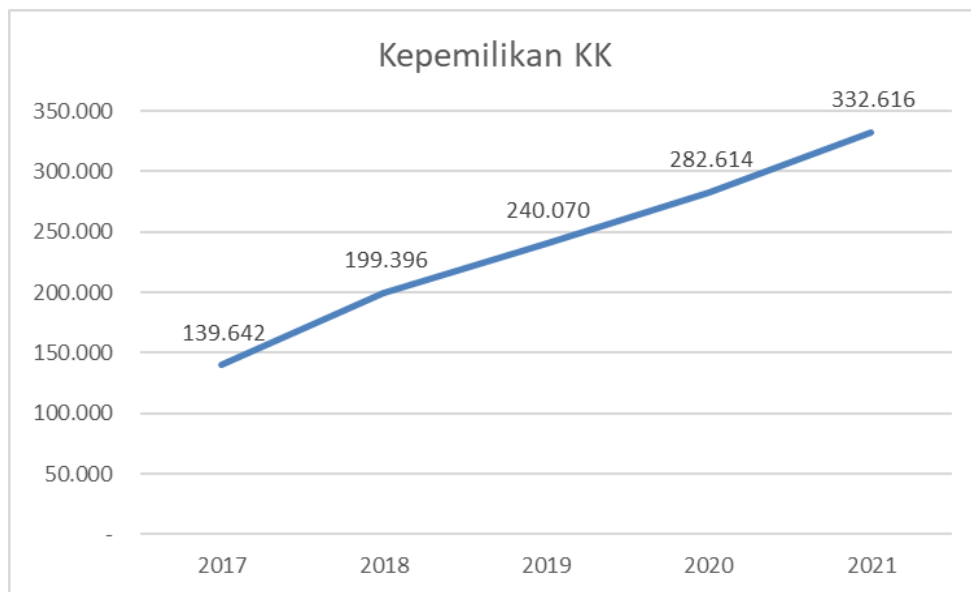
Dilihat dari grafik diatas, status kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 52,8 % atau 1.323.854 orang dimana proporsi Status Belum Kawin lebih mendominasi sebesar 30% dari jumlah keseluruhan dan paling tertinggi dari jumlah keseluruhan, proporsi Status Cerai Hidup lebih rendah di antara jumlah yang lain nya sebesar 17%.

2.5. Administrasi Kependudukan

Dokumen kependudukan merupakan bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Dokumen tersebut selain menunjukkan status legal seseorang, juga berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pelayanan publik. Bagi pemerintah dokumen kependudukan merupakan kewajiban negara untuk memberikan status legal bagi warganya, sekaligus sebagai sumber data kependudukan.

2.5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga (KK) menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki. Sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut. Selain itu, Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya. Adapun Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini:



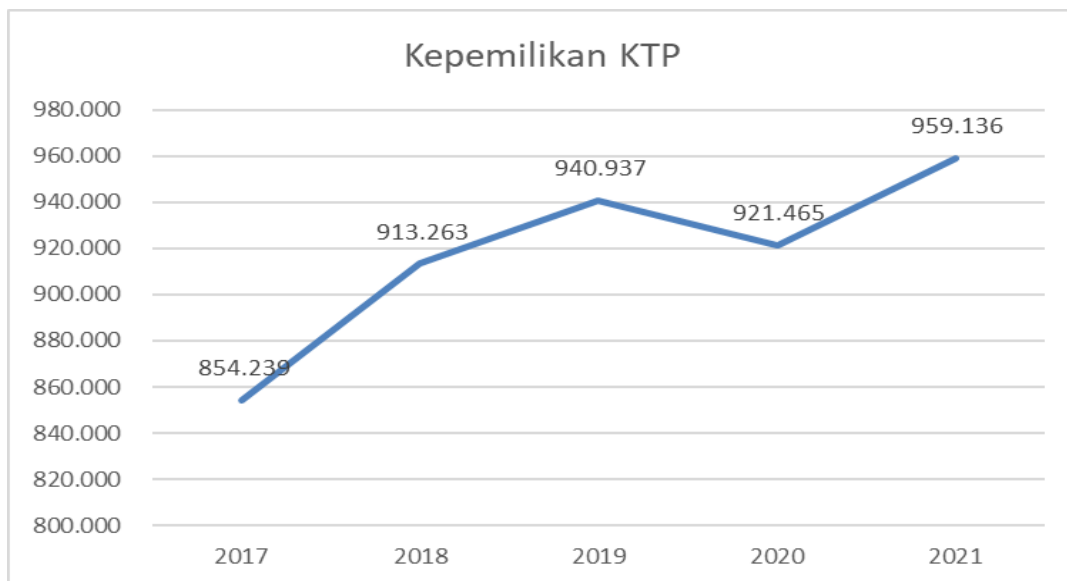
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka 2021

Grafik 2.21. Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Majalengka

2.5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Adapun kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini:



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

Grafik 2.22. Jumlah Kepemilikan KTP di Kabupaten Majalengka

2.5.3. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Data mengenai akta kematian belum dapat disajikan dalam profil ini karena kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya akta kematian untuk mengurus hak-hak keperdataan dan menganggap sudah cukup dengan menggunakan surat kematian dari Desa/Kelurahan dalam mengurus masalah yang dihadapinya.

A. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal yang berhubungan dengan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa

ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor. Kepemilikan akta kelahiran digambarkan dalam grafik dibawah ini:



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

Grafik 2.23. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Majalengka

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Majalengka selalu mengalami kenaikan.

B.Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Kepemilikan akta perkawinan digambarkan dalam grafik di bawah ini:



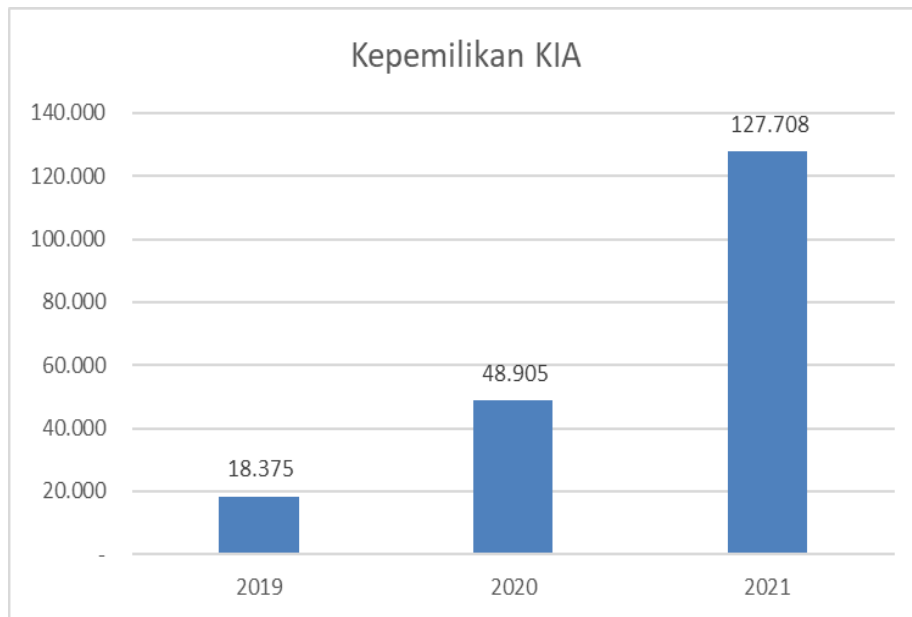
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

Grafik 2.24. Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Majalengka

C. Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak (KIA) adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kartu Identitas Anak (KIA) diperuntukan bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah dan belum memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Berikut merupakan jumlah kepemilikan KIA di Kabupaten Majalengka:



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

Grafik 2.25. Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Majalengka

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK

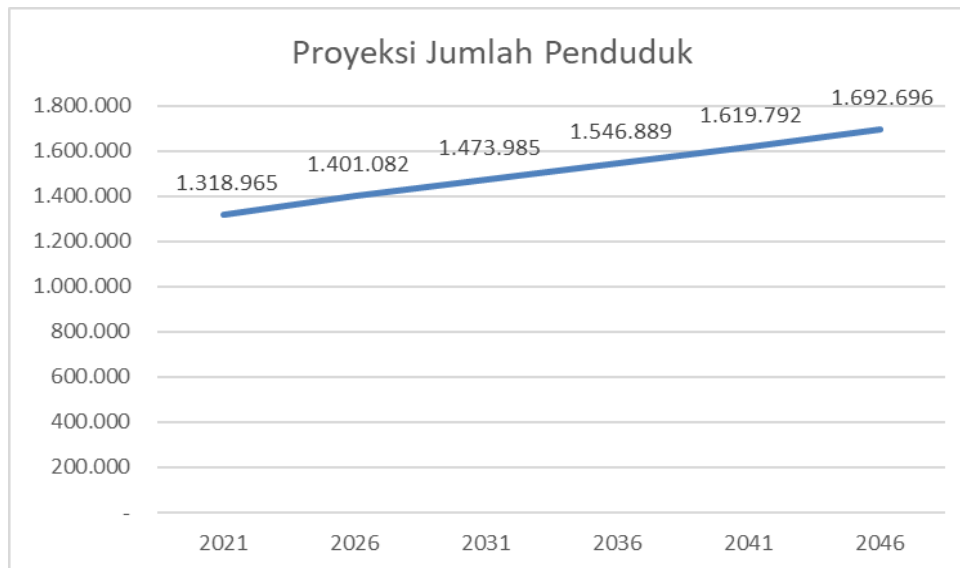
DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

3.1. Kuantitas Penduduk

Dalam kurun waktu jangka panjang, kondisi yang diharapkan adalah penduduk tumbuh seimbang dan dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan positif dan bukan menjadi beban bagi pembangunan di Kabupaten Majalengka. Prediksi jumlah penduduk Kabupaten Majalengka dua puluh lima tahun mendatang diperkirakan mencapai 1.692.696 Juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang seimbang diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Majalengka.

3.1.1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Majalengka cenderung mengalami penurunan, hal ini tentunya membawa dampak positif bagi pembentukan keluarga berkualitas sebab semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana. Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dengan menggunakan metode regresi linier dapat dilihat pada grafik berikut ini:



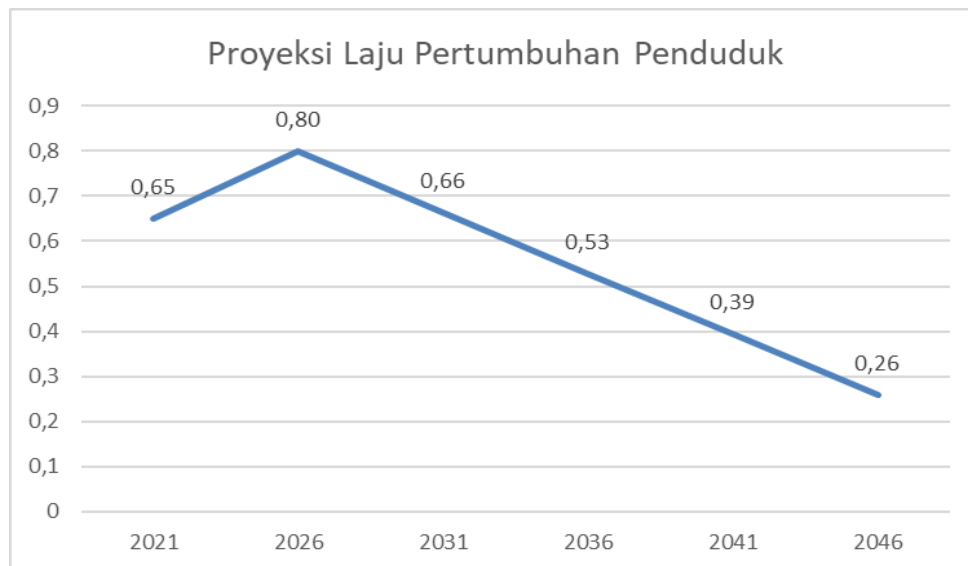
Grafik 3.1. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang seperti yang diproyeksikan tersebut dapat dicapai dengan penguatan program keluarga berencana secara masif terutama pada generasi muda sebagai calon ayah dan ibu dimasa yang akan datang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka sejak tahun 2015 telah menggulirkan program pengendalian penduduk yang diharapkan dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

3.1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam pengendalian penduduk laju pertumbuhan penduduk menjadi perhatian utama, karena hal itu akan berimbas pada semua sektor kehidupan. Oleh karena itu upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini merupakan prioritas utama dalam rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Majalengka. Proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Majalengka tahun

2021-2046 dengan menggunakan metode regresi linier dapat dilihat pada grafik berikut ini:



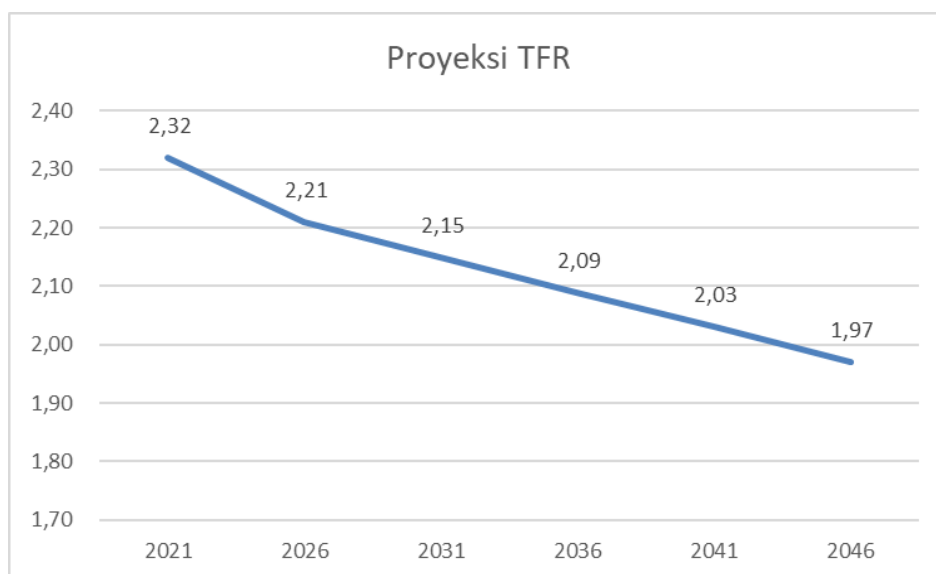
Grafik 3.2. Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Laju pertumbuhan penduduk yang ideal berada pada angka 0,5 menurut proyeksi angka tersebut dapat dicapai Kabupaten Majalengka pada tahun 2036 sehingga untuk mencapai angka ideal ini diperlukan upaya yang terukur, sistematis, holistik dan integratif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka sebagai *leading sector*. Sehingga Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang diharapkan dapat terwujud.

3.1.3. Total Fertility Rate (TFR)

TFR ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka sehingga perlu adanya upaya untuk menekan angka TFR ini agar berada pada kondisi yang ideal.

Proyeksi TFR Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dengan menggunakan *demographic projection* dalam aplikasi *spectrum* dapat dilihat pada grafik berikut ini:



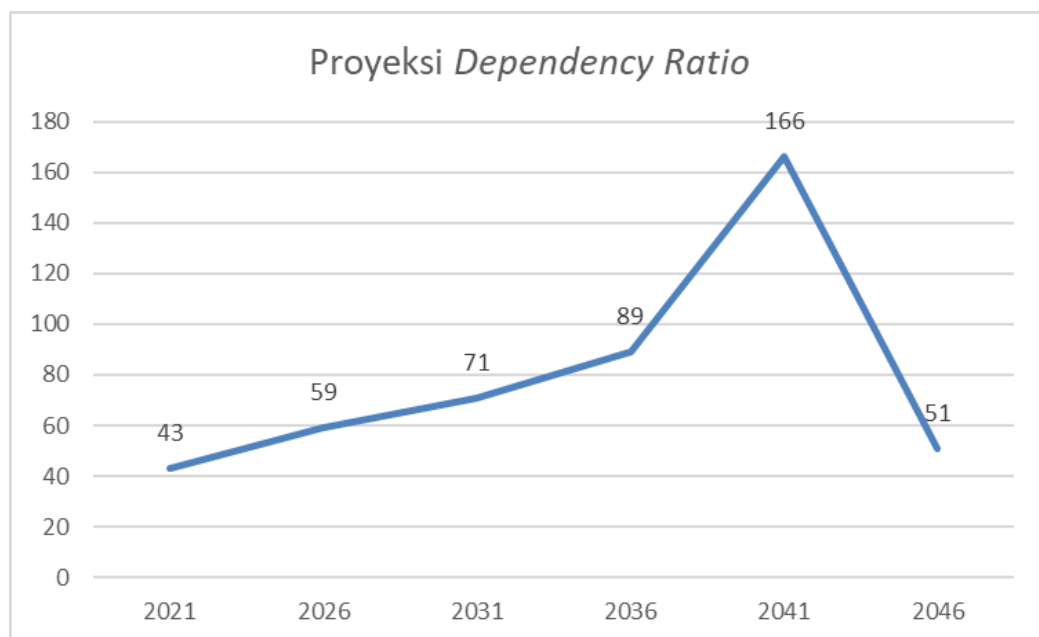
Grafik 3.3. Proyeksi TFR di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Pada tahun 2021 *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Majalengka berada pada angka 2,32 sehingga diperlukan upaya keras agar mampu menekan angka TFR tersebut dan diharapkan berada di angka yang menunjukkan replacement level yang berarti setiap keluarga memiliki 2 orang anak sebagai pengganti ayah dan ibunya yang merata di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten Majalengka sehingga Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dapat dicapai.

3.14. Ratio Beban Ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya perbandingan *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan perbandingan *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Proyeksi rasio beban ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR) Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dengan menggunakan *demographic projection* aplikasi *spectrum* dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.4. Proyeksi *Dependency Ratio* di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

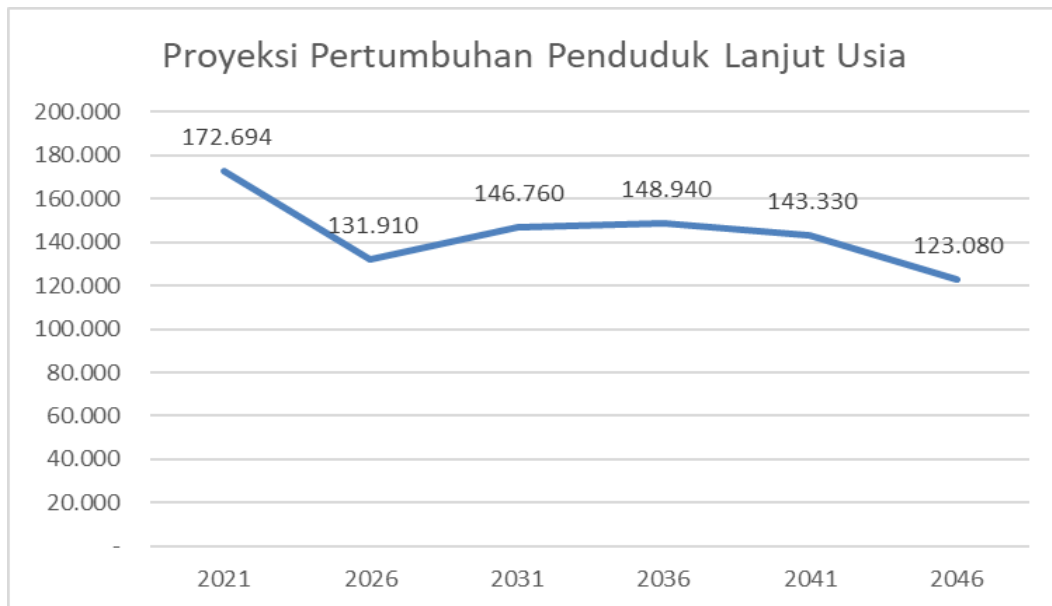
Angka *Dependency Ratio* (DR) ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) berbanding dengan 43 orang penduduk usia non produktif (0-15 tahun dan >65 tahun). Bila dilihat dari grafik diatas, puncak bonus demografi di Kabupaten Majalengka terjadi pada tahun 2021 dimana setiap

100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) berbanding dengan 43 orang penduduk usia non produktif (0-15 tahun dan >65 tahun). Melihat angka *Dependency Ratio* (DR) tersebut harus dilakukan langkah-langkah yang sistematis dan terukur agar kelompok usia produktif tersebut benar-benar produktif dalam arti mampu menghasilkan barang dan jasa melalui pembangunan Balai Latihan Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja dan kursus-kursus keahlian sehingga mampu meningkatkan produktivitas penduduk.

3.15. Penduduk Lanjut Usia

Peningkatan jumlah penduduk lansia memberikan konsekuensi yang tidak sederhana. Berbagai macam tantangan akibat penuaan penduduk telah menyentuh berbagai aspek kehidupan. Untuk menyikapi kondisi ini dibutuhkan suatu program pembangunan kelanjutusiaan yang mampu mengayomi kehidupan para lansia. Proyeksi pertumbuhan penduduk lanjut usia di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046.

Dengan menggunakan *demographic projection* aplikasi spectrum dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.5 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Lanjut Usia di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Dari grafik tersebut jelas terlihat bahwa jumlah penduduk lanjut usia semakin menurun, hal ini menjadi indikator menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang memadai diperlukan guna meningkatkan angka harapan hidup sehingga jumlah lansia semakin meningkat dengan rentan umur yang panjang.

3.2. Kualitas Penduduk

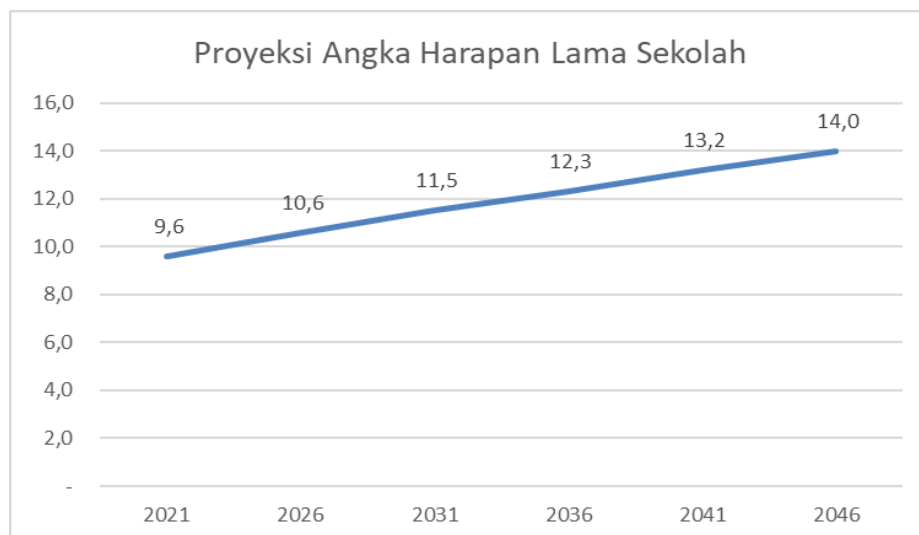
Tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang tinggi merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa sekarang dan yang akan datang.

3.2.1. Pendidikan

Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah Kabupaten Majalengka secara serius meningkatkan mutu pendidikan demi menunjang sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sangat penting dilakukan agar Kabupaten Majalengka memiliki sumber daya manusia yang handal, mandiri dan mampu memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Dalam pembahasannya akan dilihat angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.

A. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah ini dijadikan sebagai salah satu acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat. Proyeksi angka harapan sekolah Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dengan menggunakan metode regresi linier dapat dilihat pada grafik berikut ini :

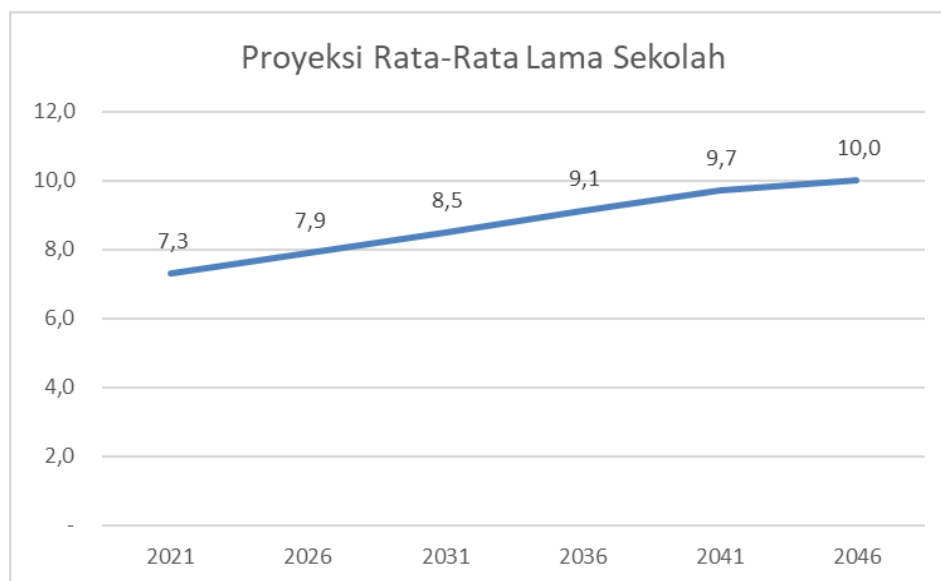


Grafik 3.6. Proyeksi Angka Harapan Sekolah Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Angka harapan sekolah di Kabupaten Majalengka tahun 2021 berada pada angka 9,6 sehingga diproyeksikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diperlukan kerja keras yang terencana dan terukur dengan baik agar kualitas penduduk dalam bidang pendidikan di Kabupaten Majalengka dapat terus mengalami peningkatan.

B.Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah ini dijadikan sebagai salah satu acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat. Proyeksi rata-rata lama sekolah Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dengan menggunakan metode regresi linier dapat dilihat pada grafik berikut ini :



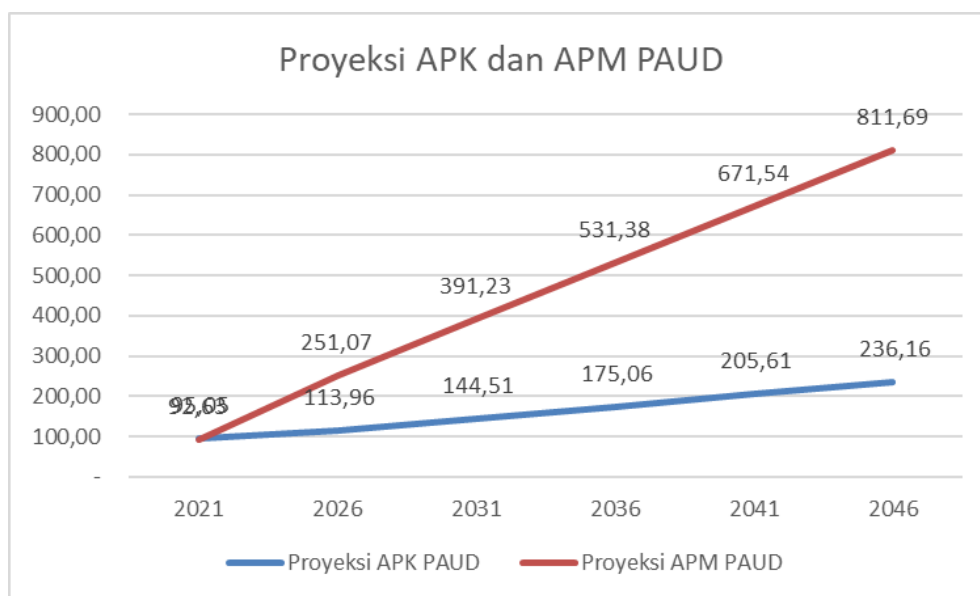
Grafik 3.7. Proyeksi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Majalengka berada pada 7,3 tahun, artinya angka ini bisa didefinisikan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Majalengka secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,3 tahun atau hampir setara dengan SMP Kelas 1. Hal ini harus menjadi

perhatian bagi pemerintah Kabupaten Majalengka, khususnya dinas pendidikan sehingga rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan dengan proyeksi 10,0 tahun pada tahun 2046.

C. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

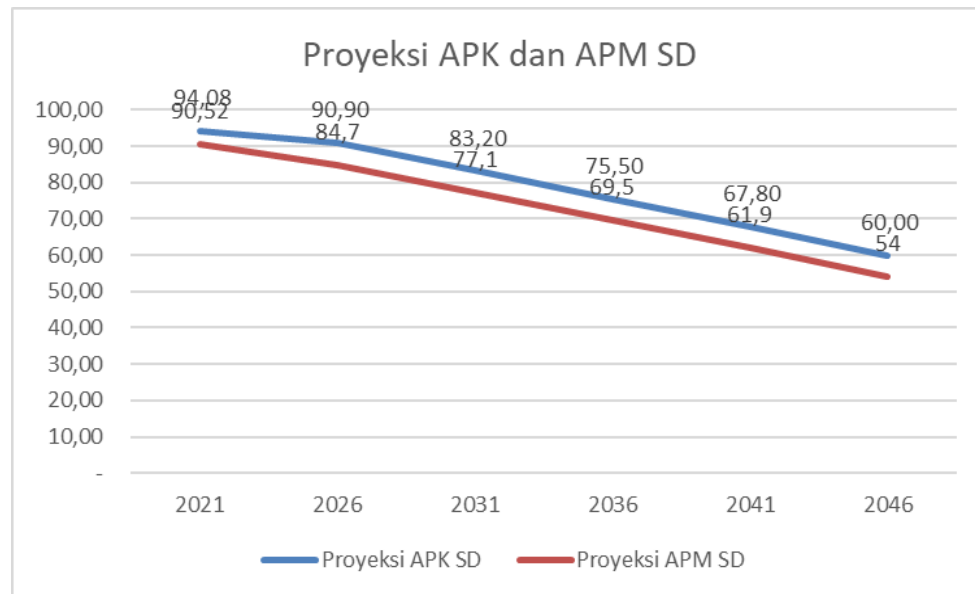
Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Majalengka pada jenjang pendidikan PAUD tahun 2021 sampai tahun 2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3.8. Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang PAUD Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Berdasarkan proyeksi diharapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) semakin menurun sedangkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) semakin meningkat dari tahun 2021 sampai 2046. Sehingga terjadi kesesuaian antara usia anak yang bersekolah di PAUD dengan jenjang pendidikan yang sesuai untuk usianya yaitu 4-6 tahun.

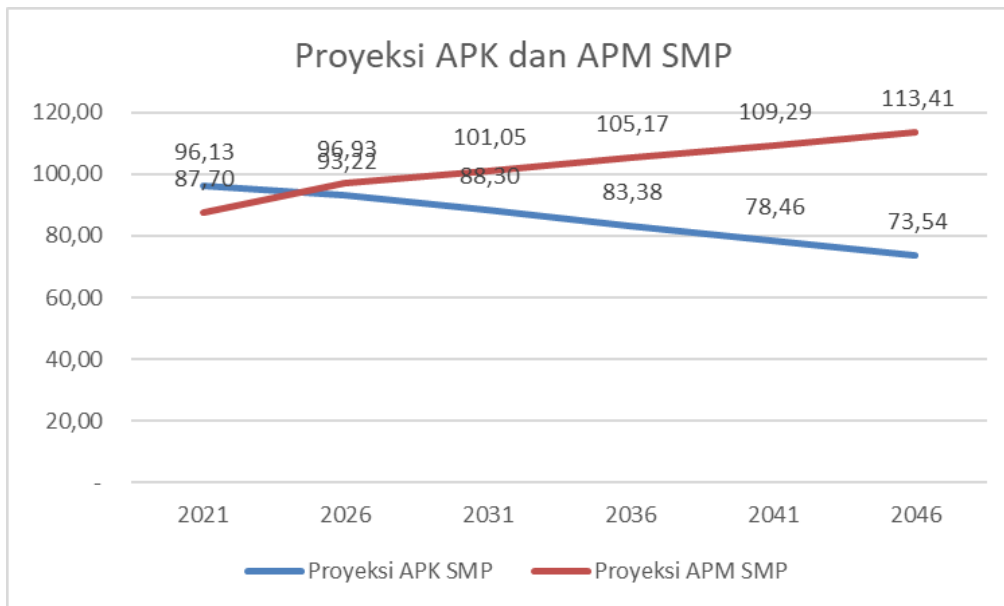
Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Majalengka pada jenjang pendidikan SD sederajat tahun 2021 sampai tahun 2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3.9. Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD sederajat Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Berdasarkan proyeksi diharapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) semakin menurun sedangkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) semakin meningkat dari tahun 2021 sampai 2046. Sehingga terjadi kesesuaian antara usia anak yang bersekolah di SD sederajat dengan jenjang pendidikan yang sesuai untuk usianya yaitu 7-12 tahun.

Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Majalengka pada jenjang pendidikan SMP sederajat tahun 2021 sampai tahun 2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3.10. Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP sederajat Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Berdasarkan proyeksi diharapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) semakin menurun sedangkan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) semakin meningkat dari tahun 2021 sampai 2046. Sehingga terjadi kesesuaian antara usia anak yang bersekolah di SMP sederajat dengan jenjang pendidikan yang sesuai untuk usianya yaitu 13-15 tahun.

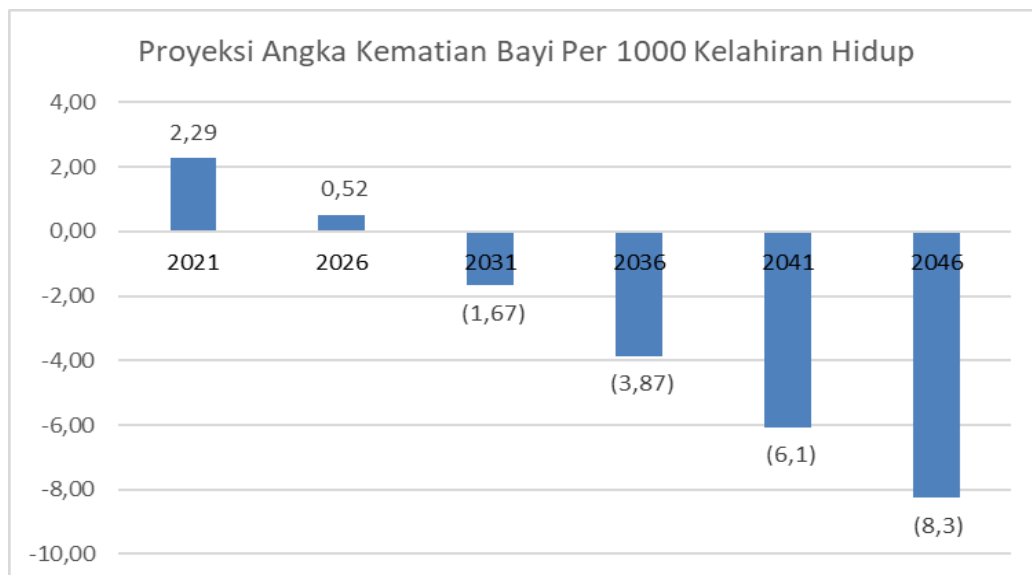
3.2.2. Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat merupakan tolok ukur dari kinerja bidang kesehatan sekaligus dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di Kabupaten Majalengka. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam bidang kesehatan ini meliputi: angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate (IMR), Angka Harapan Hidup (AHH) dan fasilitas kesehatan yang mencakup jumlah rumah sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, posyandu, jumlah dokter dan tenaga kesehatan.

A. Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita

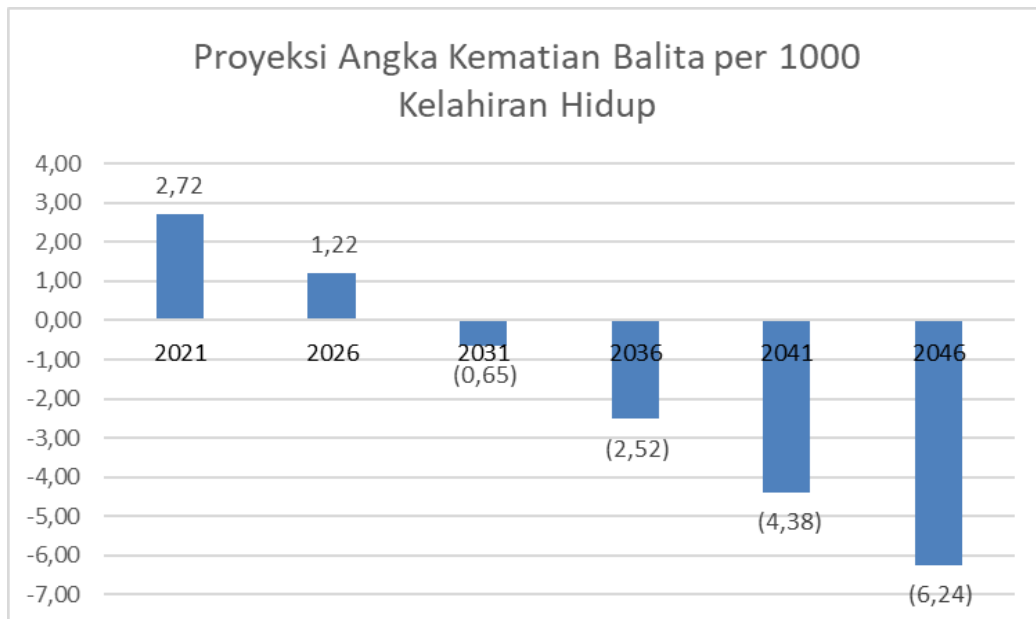
Angka kematian ibu, bayi dan balita menjadi indikator kualitas kesehatan masyarakat sehingga diperlukan untuk program dan rencana yang terarah agar dapat menekan angka kematian ibu, bayi dan balita di masa yang akan datang.

Proyeksi angka kematian ibu, bayi dan balita tahun 2021-2046 Kabupaten Majalengka dengan menggunakan *demographic projection* dalam aplikasi *spectrum* dapat dilihat pada grafik berikut ini :



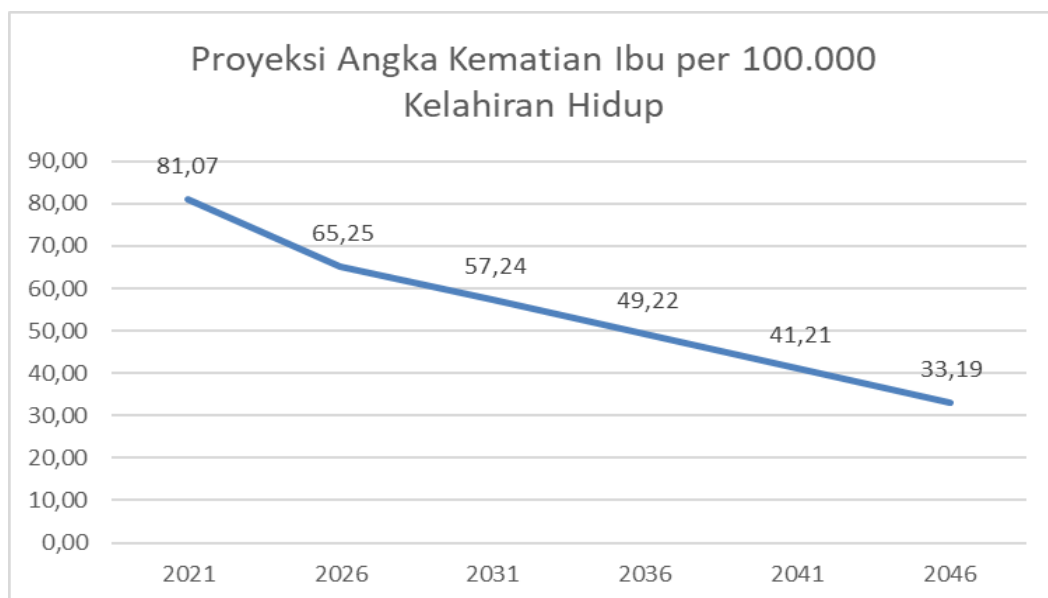
Grafik 3.11. Proyeksi Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Dilihat dari grafik, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Majalengka diproyeksikan akan semakin menurun.



Grafik 3.12. Proyeksi Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Dilihat dari grafik, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Majalengka diproyeksikan akan semakin menurun.



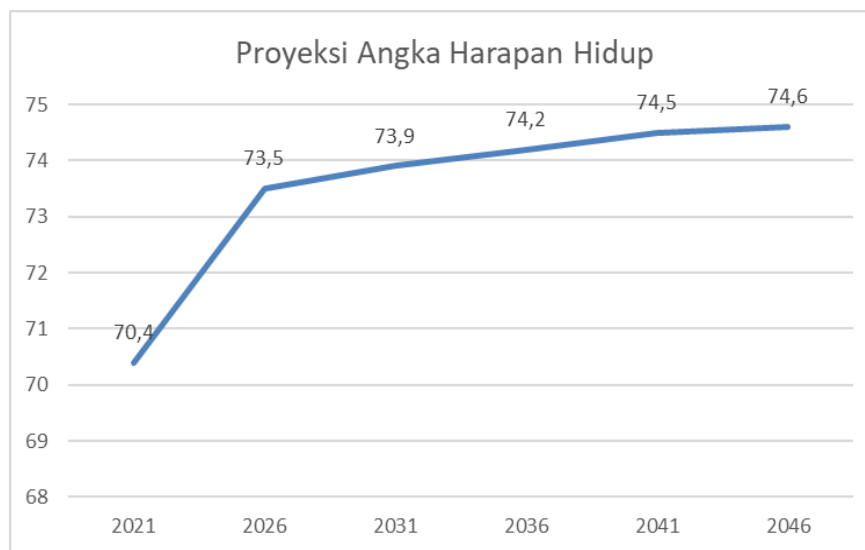
Grafik 3.13. Proyeksi Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Dilihat dari grafik, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Majalengka diproyeksikan akan semakin menurun.

B. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator lain dalam melihat tingkat kesehatan masyarakat.

Proyeksi Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Majalengka: tahun 2010-2046 dengan menggunakan metode regresi linier dapat dilihat pada grafik berikut ini :



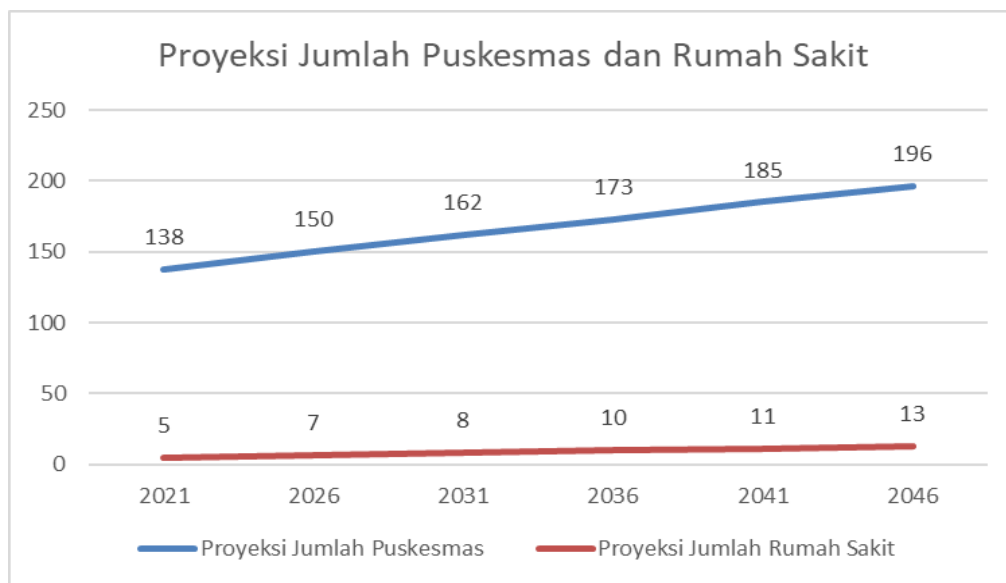
Grafik 3.14. Proyeksi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Peningkatan Angka Harapan Hidup ini merupakan cerminan dari semakin meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, sehingga diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun walaupun Angka Harapan Hidup masyarakat dapat terus meningkat perlu juga disertai dengan peningkatan fasilitas yang menunjang kehidupan penduduk khususnya bagi para lansia.

C. Puskesmas dan Rumah Sakit

Fasilitas kesehatan yang modern dan lengkap sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Proyeksi Jumlah Puskesmas

dan Rumah Sakit Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dengan menggunakan metode regresi linier dapat dilihat pada grafik berikut ini:



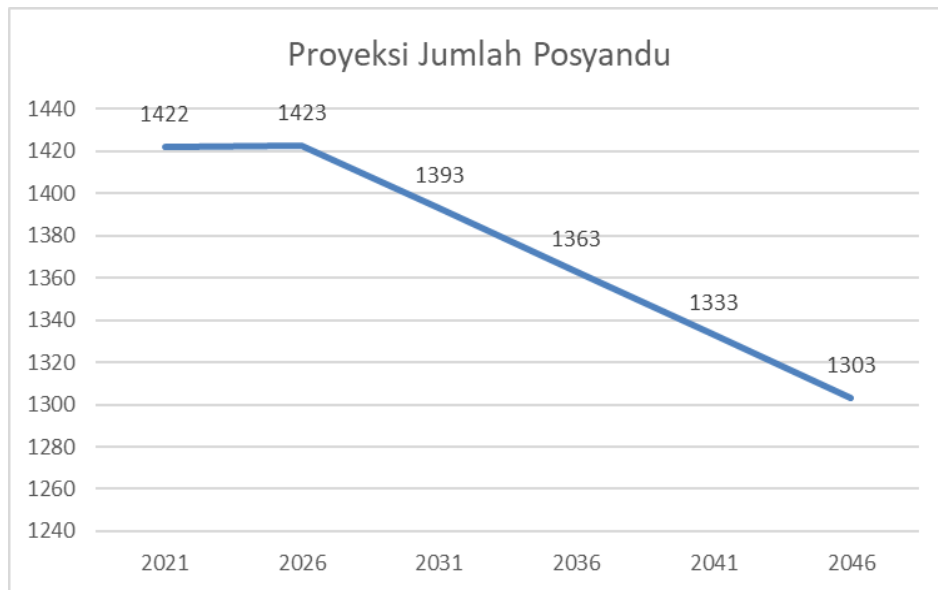
Grafik 3.15. Proyeksi Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Menurut organisasi kesehatan dunia rasio ideal untuk Puskesmas yaitu 1:10.000 artinya Puskesmas melayani 10.000 jiwa dan untuk Rumah Sakit 1:30.000 artinya 1 Rumah Sakit melayani 30.000 jiwa. Hal ini harus menjadi prioritas utama dalam bidang kesehatan untuk menjamin peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Posyandu

Posyandu atau pos pelayanan terpadu adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja Puskesmas dalam rangka menciptakan generasi yang sehat dan unggul.

Proyeksi Jumlah Posyandu di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

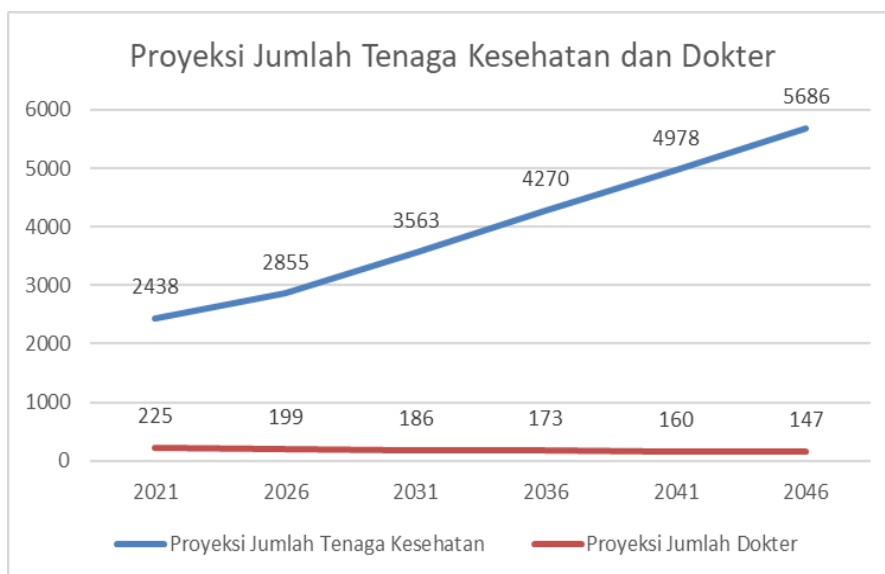


Grafik 3.16. Proyeksi Jumlah Posyandu di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Jumlah posyandu terbanyak diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2026 akan dibutuhkan posyandu sebanyak 1423 unit dan akan mengalami penurunan sampai tahun 2046.

E. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Dokter

Dengan peningkatan jumlah sarana kesehatan, jumlah tenaga kesehatan dan dokter juga harus ada peningkatan. Proyeksi Jumlah tenaga kesehatan dan Dokter dengan menggunakan *demographic projection* dalam aplikasi *spectrum* di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.17. Proyeksi Jumlah Tenaga Kesehatan dan Dokter di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

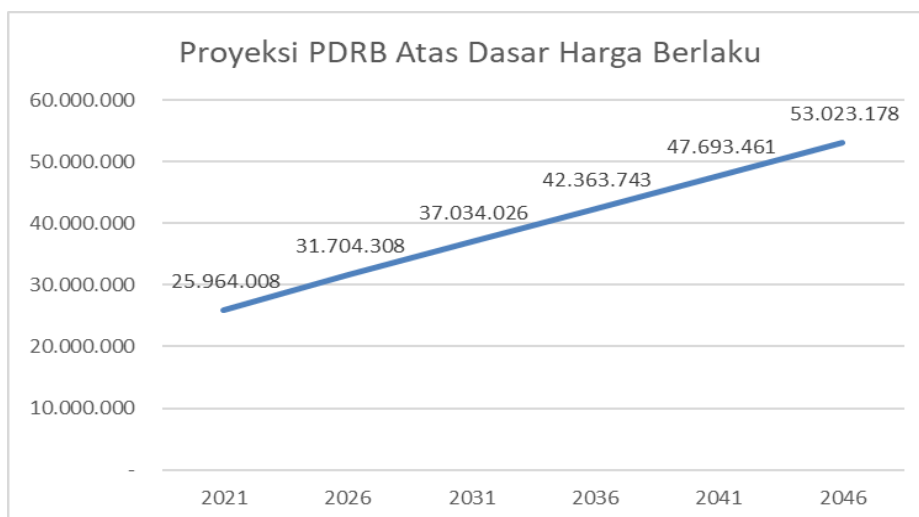
Proyeksi Jumlah Tenaga Kesehatan dan Dokter tahun 2021 sampai tahun 2046 terus mengalami peningkatan, hal ini diharapkan akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.

3.2.3. Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor lain yang menjadi indikator kualitas penduduk selain pendidikan dan kesehatan. Hal-hal yang akan dibahas pada bidang ekonomi meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka diproyeksikan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mampu meningkatkan kualitas hidup. Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

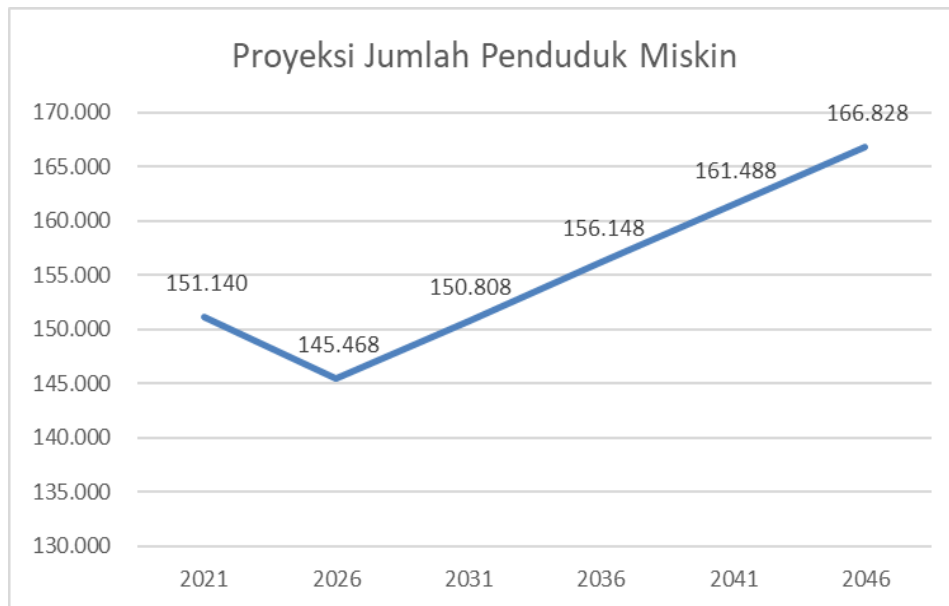


Grafik 3.18. Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 diproyeksikan meningkat dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak, industri, pertanian, pariwisata dan lain-lain. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat memicu terjadinya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat secara luas.

B. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Majalengka. Angka kemiskinan ini diproyeksikan mengalami penurunan tahun 2021-2026 dan meningkat kembali dari tahun 2026-2046. Proyeksi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

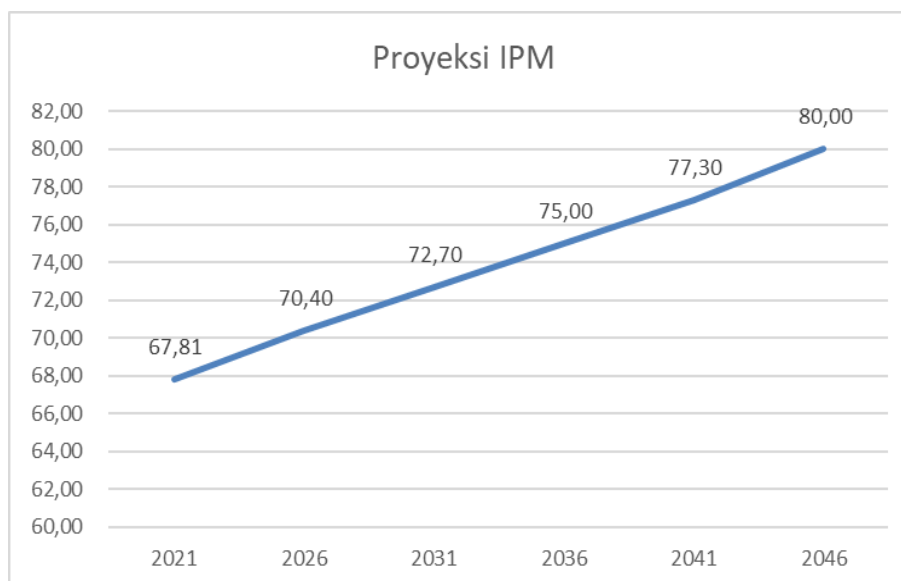


Grafik 3.19. Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Proyeksi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2026 mengalami penurunan dan diperkirakan meningkat kembali tahun 2026-2046. Hal ini perlu adanya peningkatan kembali dalam produktivitas penduduk melalui pelatihan-pelatihan keterampilan dan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah sehingga masyarakat berperan aktif dalam pembangunan sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal dari pembangunan tersebut.

C. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan yang mereka jalankan tidak hanya dinilai dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang mereka miliki, tetapi juga dari seberapa berhasil mereka membangun kualitas sumberdaya manusia masyarakatnya yang dicerminkan melalui IPM. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.20. Proyeksi IPM di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari tahun ke tahun memiliki tujuan agar kualitas penduduk dalam bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli dapat lebih meningkat. Indikator yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah angka harapan hidup, kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah, serta standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Dari semua indikator tersebut diproyeksikan mengalami peningkatan sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka pun dapat meningkat.

3.3. Persebaran dan Mobilitas

Persebaran dan Mobilitas penduduk menjadi faktor yang cukup penting dalam menjamin keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sekaligus pengambil manfaat dari pembangunan tersebut.

3.3.1. Persebaran

Berdasarkan data kepadatan penduduk yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Jatiwangi dengan tingkat kepadatan penduduk 2290 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Kertajati adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah dengan tingkat kepadatan 351 jiwa per km². Persebaran penduduk yang timpang ini merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan, karena di salah satu Kecamatan terjadi kepadatan penduduk yang luar biasa sementara di Kecamatan lainnya masih jarang penduduk. Hal ini merupakan dampak dari kurang meratanya pembangunan sehingga penduduk beraglomerasi di beberapa Kecamatan.

Pengelompokkan penduduk ini pula terjadi karena terjadi pendirian pabrik dan fasilitas kehidupan yang lebih lengkap di beberapa kecamatan sehingga penduduk tertarik untuk memilih bertempat tinggal di kecamatan tersebut daripada tetap tinggal di daerah yang minim fasilitas yang dibutuhkan. Dengan demikian diharapkan persebaran penduduk di Kabupaten Majalengka lebih merata melalui pembangunan pusat-pusat perekonomian dan lapangan kerja secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka.

3.3.2. Mobilitas

Mobilitas atau pergerakan penduduk secara geografis tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan fasilitas penunjang kehidupan seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa mobilitas atau migrasi

terbesar terjadi pada kecamatan-kecamatan yang banyak menyediakan lapangan pekerjaan dan fasilitas kehidupan lainnya.

Hal ini bila dibiarkan akan menimbulkan ketimpangan yang lebih besar antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Tingkat kepadatan yang tinggi, masalah lingkungan hidup, kesehatan dan lain-lain merupakan efek yang akan langsung dirasakan di wilayah yang terlalu padat penduduknya akibat mobilitas atau migrasi. Solusi yang dapat diambil adalah dengan jalan pemerataan lapangan pekerjaan diseluruh wilayah Kabupaten Majalengka sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah tersebut hal ini diyakini mampu menekan tingkat mobilitas penduduk.

3.4. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya yang menyeluruh dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Sedangkan Kualitas keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan kemandirian keluarga.

3.4.1. Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada kurun waktu dan wilayah tertentu berguna bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. Dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga, sosialisasi dan pemahaman 8 fungsi keluarga bagi seluruh penduduk ini menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Berencana sebagai leading sector dengan program-program yang akan dilaksanakan sehingga menuju tahun 2046 akan tercipta keluarga-keluarga yang

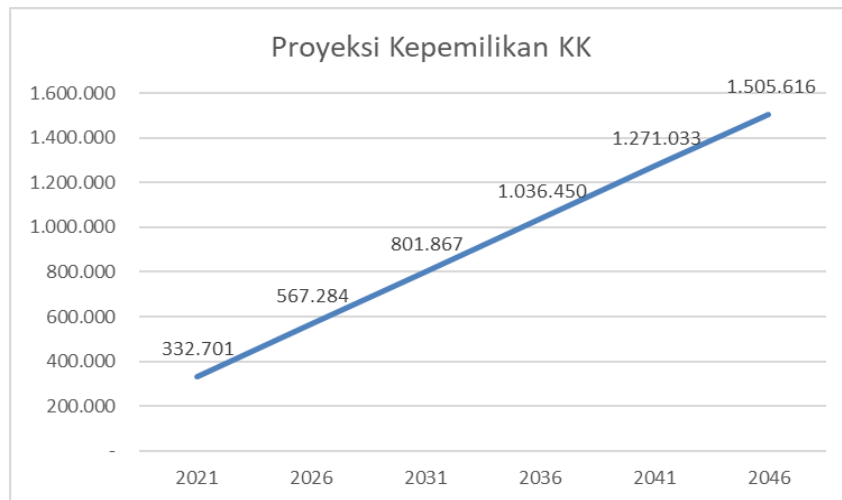
harmonis dan sejahtera. Sosialisasi 8 fungsi keluarga sebagai dasar dari pembentukan keluarga melalui perkawinan diharapkan akan semakin dipahami oleh masyarakat sehingga harapan membentuk keluarga yang berkualitas dapat diwujudkan.

3.5. Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Administrasi kependudukan mencakup kepemilikan Kartu Keluarga, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan akta perkawinan dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

3.5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan dokumen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Dokumen kartu keluarga ini menjadi dasar bagi pencetakan identitas penduduk lainnya seperti KTP, paspor, Kartu Identitas Anak dan lain-lain. Proyeksi kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

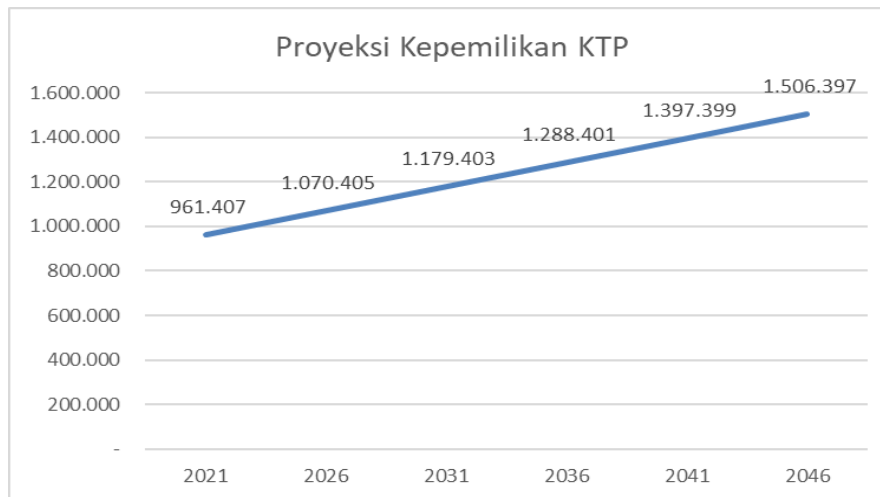


Grafik 3.21. Proyeksi Kepemilikan KK di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Pencetakan Kartu Keluarga menjadi hal yang menjadi prioritas bagi kepentingan masyarakat, oleh karena itu diproyeksikan mulai tahun 2036 seluruh keluarga sudah memiliki Kartu Keluarga sehingga Dokumen kependudukan menjadi lebih tertib dan lebih valid.

3.5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan dokumen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Dokumen ini menjadi dasar bagi pencetakan identitas penduduk lainnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), pembuatan rekening Bank dan lain-lain. Proyeksi kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.22. Proyeksi Kepemilikan KTP di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Kartu Tanda Penduduk merupakan dokumen yang sangat penting sehingga diproyeksikan pada tahun 2026 seluruh penduduk yang sudah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk sudah memiliki dokumen ini.

3.5.3. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan identitas awal yang harus dimiliki oleh setiap bayi yang dilahirkan dan menjadi dasar bagi perubahan Kartu Keluarga.

Proyeksi kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.23. Proyeksi Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Proyeksi kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir diharapkan akan mencapai 100% pada tahun 2031, hal ini perlu diprioritaskan agar identitas kependudukan khususnya akta kelahiran dapat lebih tertib dan valid.

3.5.4. Kepemilikan Akta Perkawinan

Kepemilikan akta perkawinan merupakan dokumen penting yang berhubungan dengan pengakuan negara pada pembentukan keluarga baru. Proyeksi kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.24. Proyeksi Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Majalengka belum mencapai 100% di tahun 2021-2031 artinya setiap perkawinan yang terjadi belum tercatat secara menyeluruh dan belum mendapatkan akta perkawinan dari instansi yang berwenang secara menyeluruh.

3.5.5. Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kartu identitas bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun atau yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Proyeksi kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.25. Proyeksi Kepemilikan KIA di Kabupaten Majalengka tahun 2021-2046

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ini pada tahun 2021 masih sangat rendah namun diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut. Hal ini bisa diwujudkan melalui sosialisasi pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) oleh instansi terkait dan dibantu oleh tokoh masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2022. Kabupaten Majalengka Dalam Angka 2022. Majalengka: BPS.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Majalengka. Majalengka: Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. 2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Kabupaten Majalengka. Majalengka: Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. 2021. Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021. Majalengka: Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. 2022. Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022. Majalengka: Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bappedalitbang
#TERENCANA



Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka Tahun 2022



DAFTAR ISI

- PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. DASAR HUKUM
3. TUJUAN
4. SASARAN & RUANG LINGKUP
5. KEDUDUKAN DOKUMEN

- ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

1. KUANTITAS PENDUDUK
2. KUALITAS PENDUDUK
3. PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK
4. PEMBANGUNAN KELUARGA
5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

LATAR BELAKANG



Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka 2005-2025 salah satunya adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing.



Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.



Diperlukan suatu rencana besar yang memuat kebijakan dan program operasional baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang mampu menjadi dasar dan tolok ukur pembangunan kependudukan di Kabupaten Majalengka. Prinsip Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan adalah paradigma dari rencana besar yang disusun tersebut. Untuk itu, perlu dibuat pengantar rancangan induk pembangunan kependudukan dalam bentuk “**Profil Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Majalengka Tahun 2022.**”

DASAR HUKUM



UU No.11 Tahun 2009

Kesejahteraan Sosial



UU No.52 Tahun 2009

Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga



Grand Design Pembangunan
Kependudukan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2035



Perda Kab.Majalengka No.12
Tahun 2008

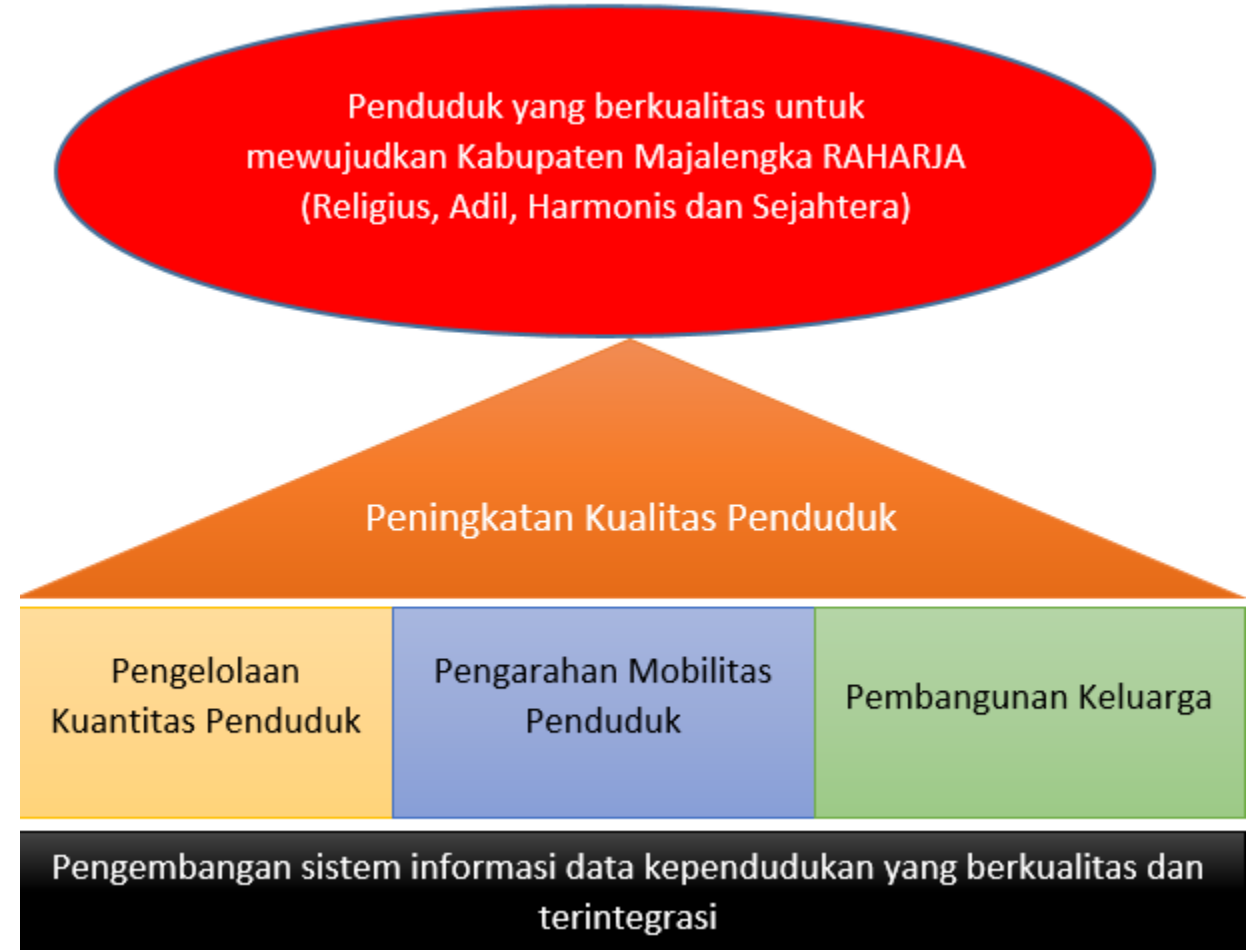
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2005-2025.

TUJUAN

A.Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi untuk mencapai Majalengka RAHARJA (Religius, Adil, Makmur dan Sejahtera). Tujuan umum tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1. Memperkuat akses pelayanan Keluarga Berencana yang merata dan berkualitas.
2. Peningkatan pembinaan peserta Keluarga Berencana, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP.
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
4. Penguatan pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Keluarga.
5. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk.
6. Mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengelolaan urbanisasi.
7. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.

B.Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan. Secara konseptual, tujuan pembangunan kependudukan Majalengka selama 2020-2045 dapat digambarkan sebagai berikut:



SASARAN

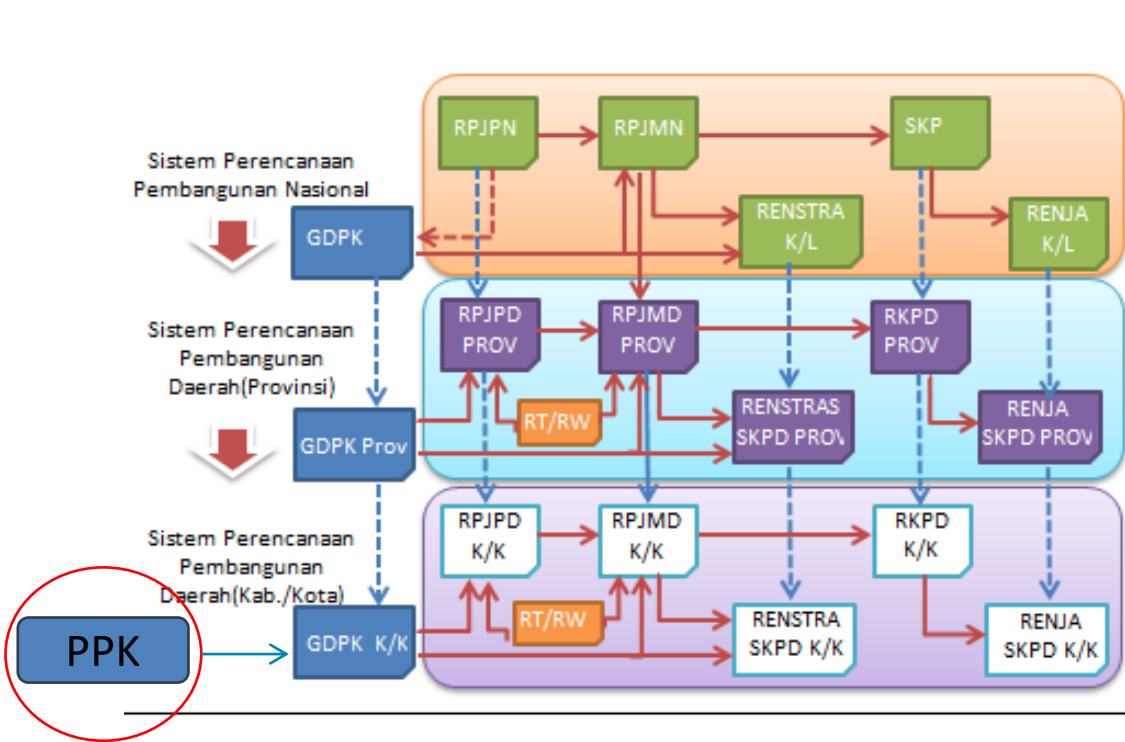
1. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).
2. Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun).
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR).
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need).
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).
7. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
8. Pencapaian bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan produktivitas.
9. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi dan berbudaya tinggi.
10. Pembangunan administrasi kependudukan di Kabupaten Majalengka melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya dan terintegrasi.

RUANG LINGKUP

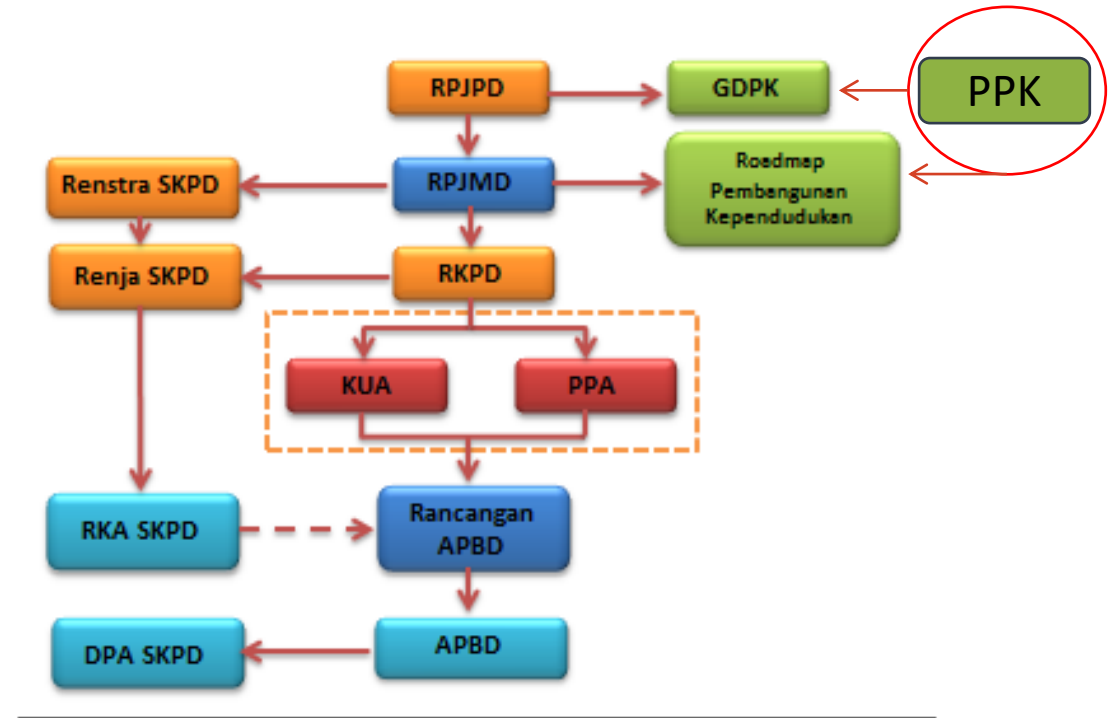
Ruang lingkup yang tertuang pada dokumen ini mencakup :

1. 5 Pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan.
2. Dokumen ini berlaku bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan merencanakan Pembangunan Daerah serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, lembaga non pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Majalengka.

KEDUDUKAN DOKUMEN

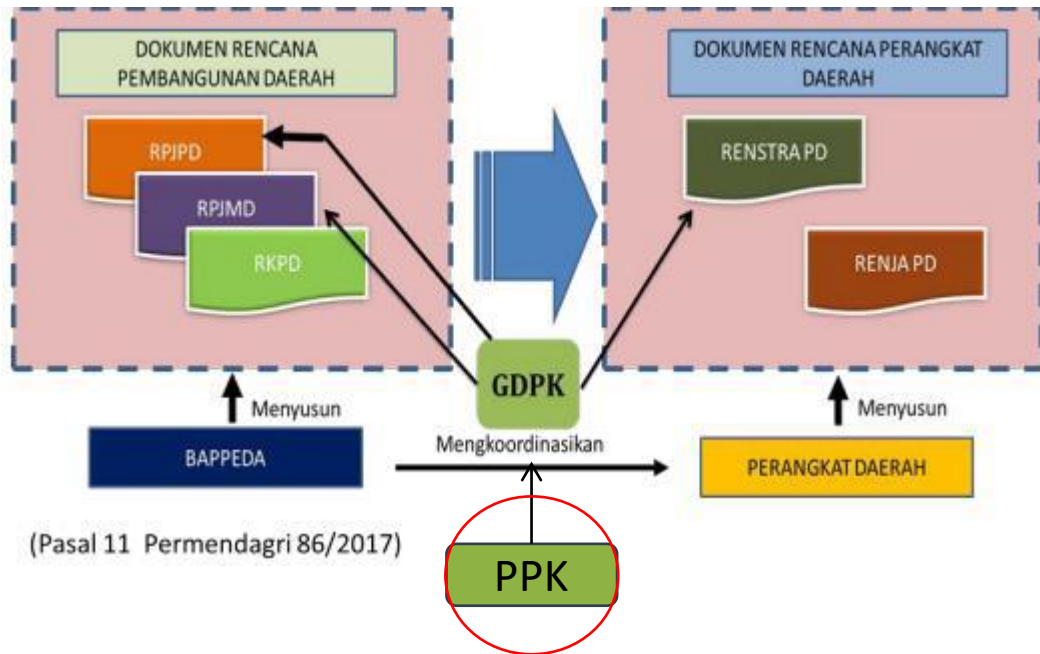


Kedudukan dokumen dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

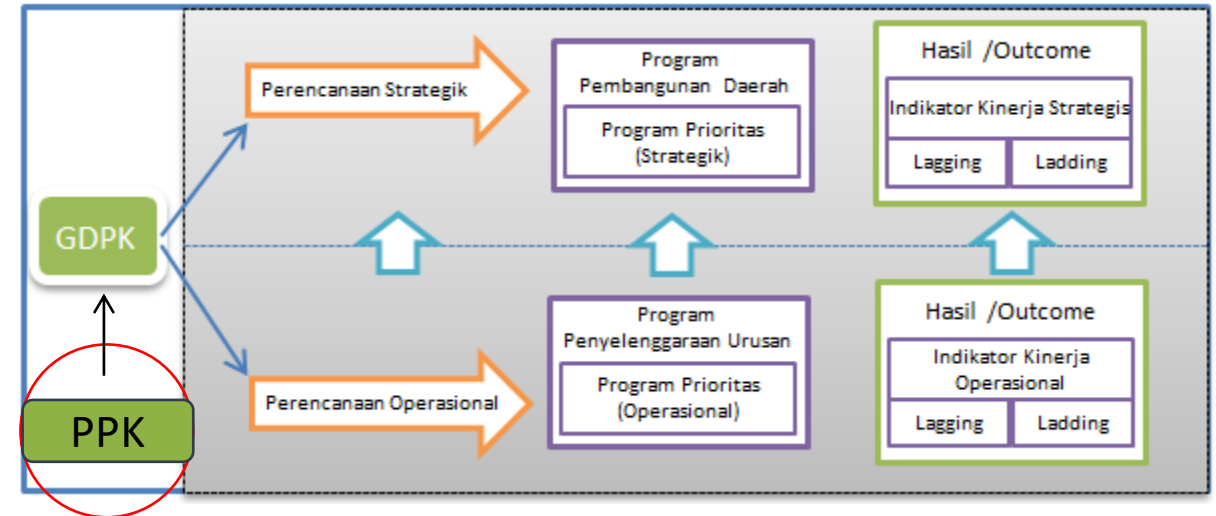


Kedudukan dokumen dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

KEDUDUKAN DOKUMEN



Kedudukan dokumen dalam Rencana Pembangunan Daerah
Dan Rencana Perangkat Daerah



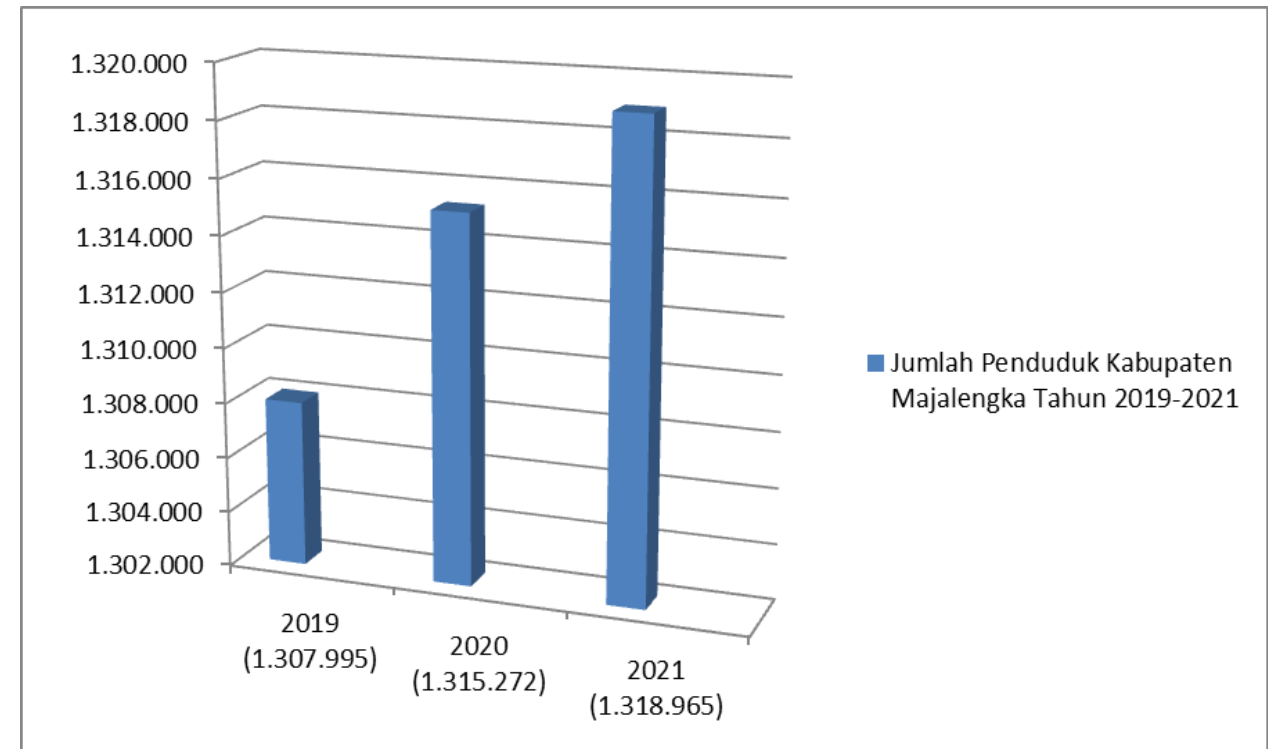
Kedudukan dokumen dalam Perencanaan Strategis dan
Perencanaan Operasional Perangkat Daerah



Kuantitas
Penduduk

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka mengalami pertambahan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu banyaknya kelahiran dan migrasi masuk karena banyak pendirian pabrik sehingga menarik penduduk wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya untuk migrasi ke Kabupaten Majalengka.



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

Tabel Komposisi Penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2021

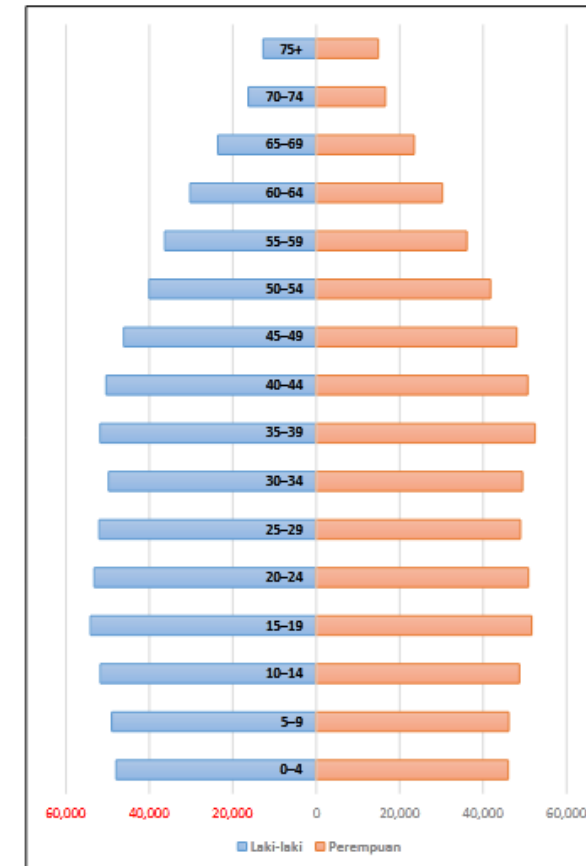
Usia	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
0-4	47.828	46.014	93.842
5-9	48.861	46.155	95.016
10-14	51.591	48.705	100.296
15-19	53.963	51.657	105.620
20-24	53.069	50.867	103.936
25-29	51.904	48.958	100.862
30-34	49.627	49.424	99.051
35-39	51.646	52.447	104.093
40-44	50.215	50.702	100.917
45-49	45.993	48.055	94.048
50-54	39.881	41.781	81.662
55-59	36.148	36.087	72.235
60-64	30.087	30.249	60.336
65-69	23.427	23.481	46.908
70-74	16.140	16.566	32.706
75+	12.571	14.866	27.437
Jumlah	662.951	656.014	1.318.965

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, 2021

Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2021

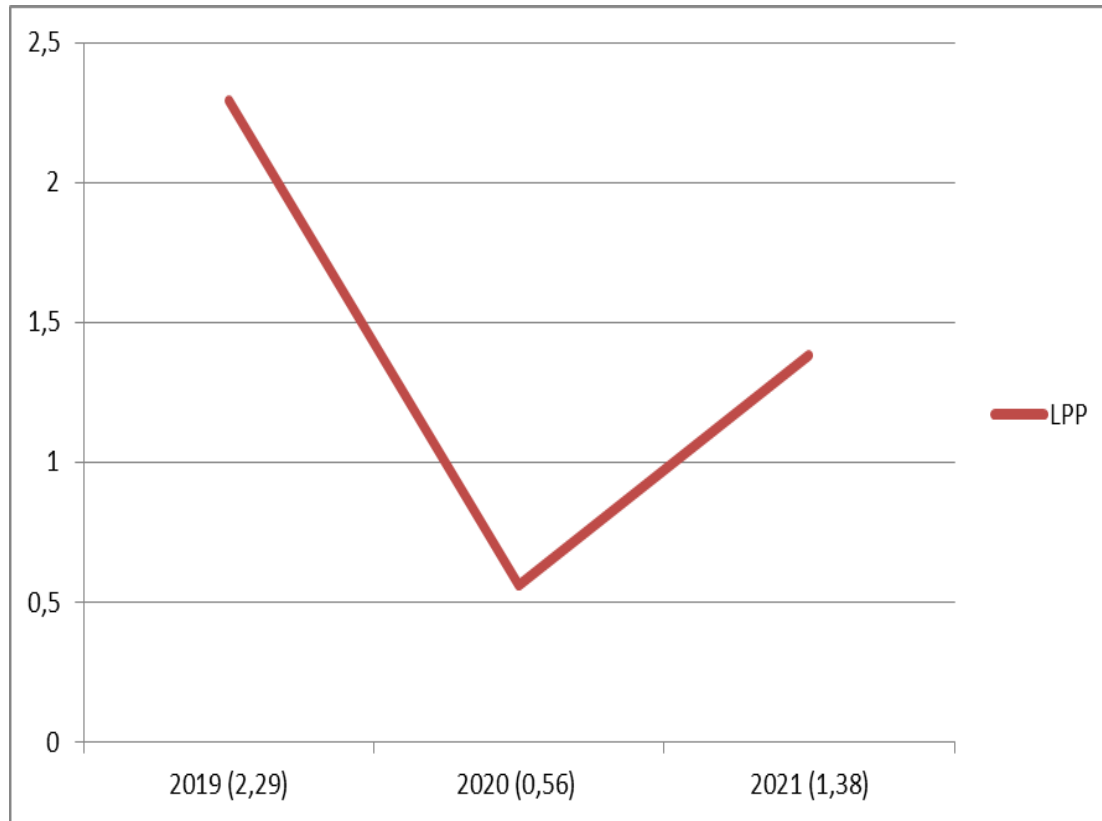
Dari gambar piramida tersebut dapat dilihat bahwa bentuk piramida penduduk mulai mengalami pergeseran dari piramida penduduk muda (ekspansif) ke piramida stationer (seimbang). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kelahiran dan program KB yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka berhasil menekan angka kelahiran.

Disisi lain dapat dilihat bahwa jumlah terbesar yang digambarkan oleh piramida penduduk diatas berada pada usia 15-19 tahun, hal ini akan berdampak pada penyediaan fasilitas pendidikan menengah dan penciptaan lapangan kerja di masa depan yang lebih banyak mengingat jumlah usia yang cukup besar pada rentang usia tersebut.



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

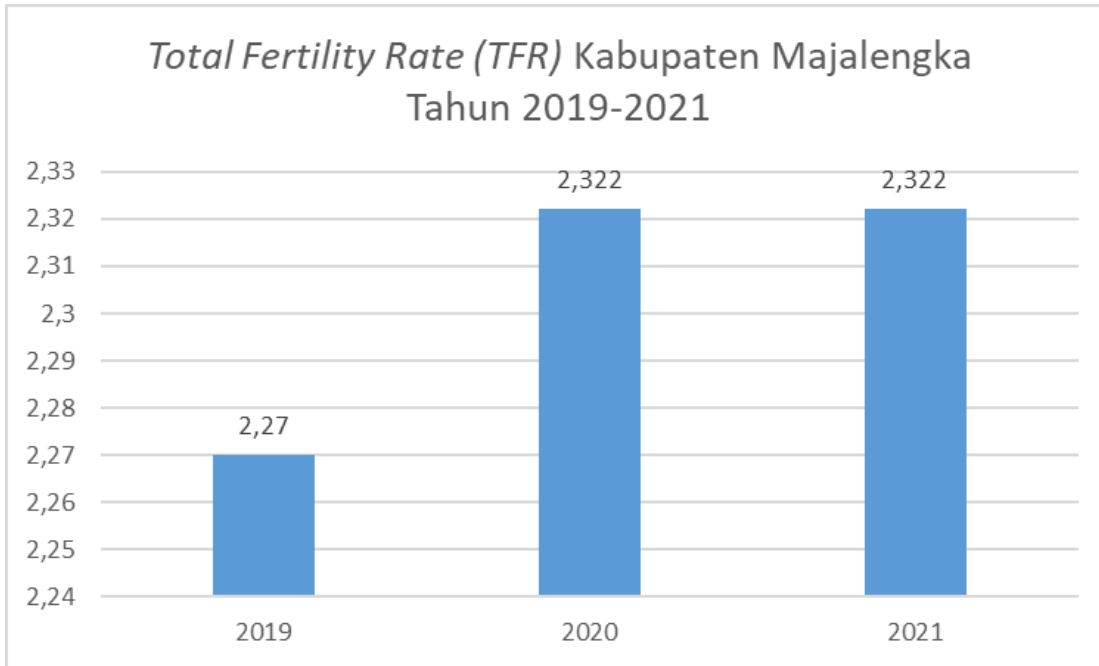


Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Majalengka cenderung mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kinerja yang ditunjukkan DP3AKB Kabupaten Majalengka harus lebih ditingkatkan kembali agar laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka dapat mencapai laju pertumbuhan penduduk ideal di masa yang akan datang.

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka cenderung mengalami penurunan yaitu 2,29 % pada tahun 2019 menjadi 0,56 % pada tahun 2020 dan naik kembali 1,38 % pada tahun 2021. Upaya untuk terus menekan angka laju pertumbuhan penduduk ini harus tetap ditingkatkan mengingat kondisi ideal laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 0,5 %.

Total Fertility Rate (TFR)



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

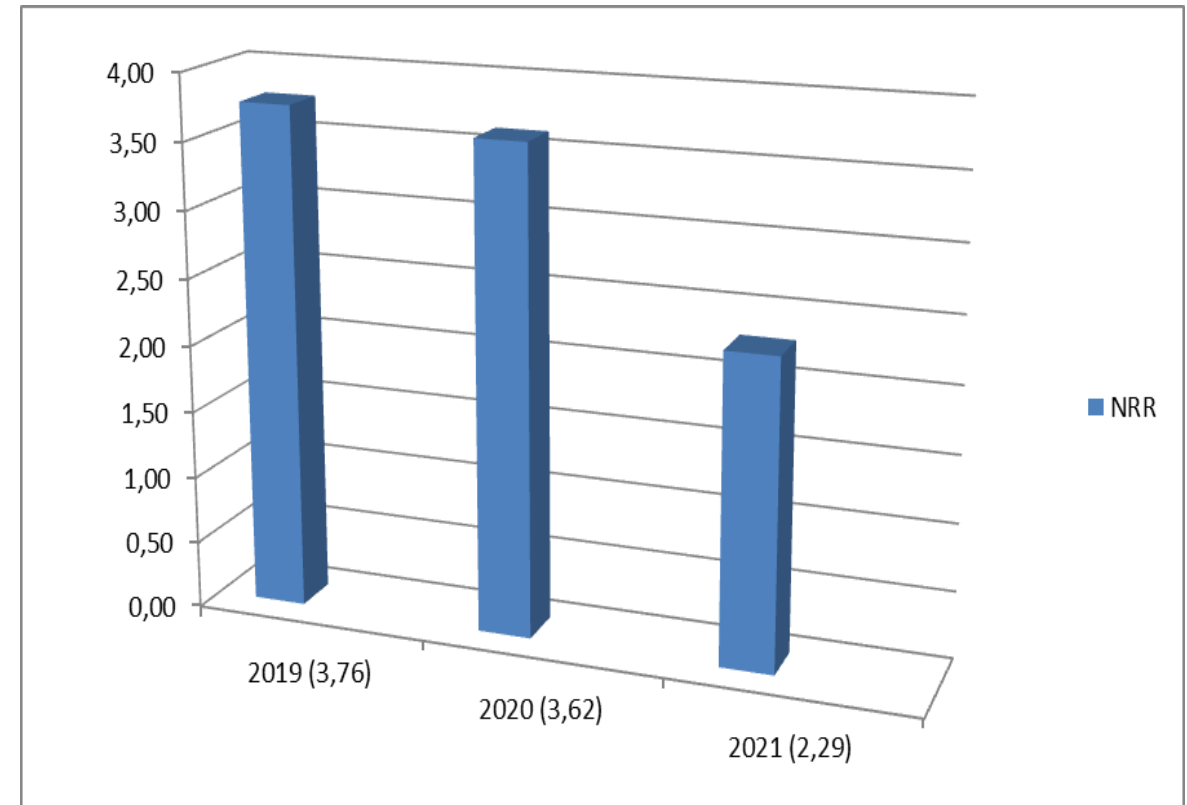
TFR akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka sehingga perlu adanya upaya untuk menekan angka TFR ini agar berada pada kondisi yang ideal.

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan angka *Total Fertility Rate (TFR)* dari tahun 2019 yaitu 2.27 dan di tahun 2020 menjadi 2.322. Tentu saja hal ini cukup menggembirakan, namun upaya untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) menghendaki prasyarat tingkat fertilitas yang lebih rendah lagi, yaitu ke tingkat *replacement level* ideal yang merata di seluruh wilayah/kecamatan di Kabupaten Majalengka.

Tingkat Reproduksi Netto atau *Net Reproduction Rate* (NRR)

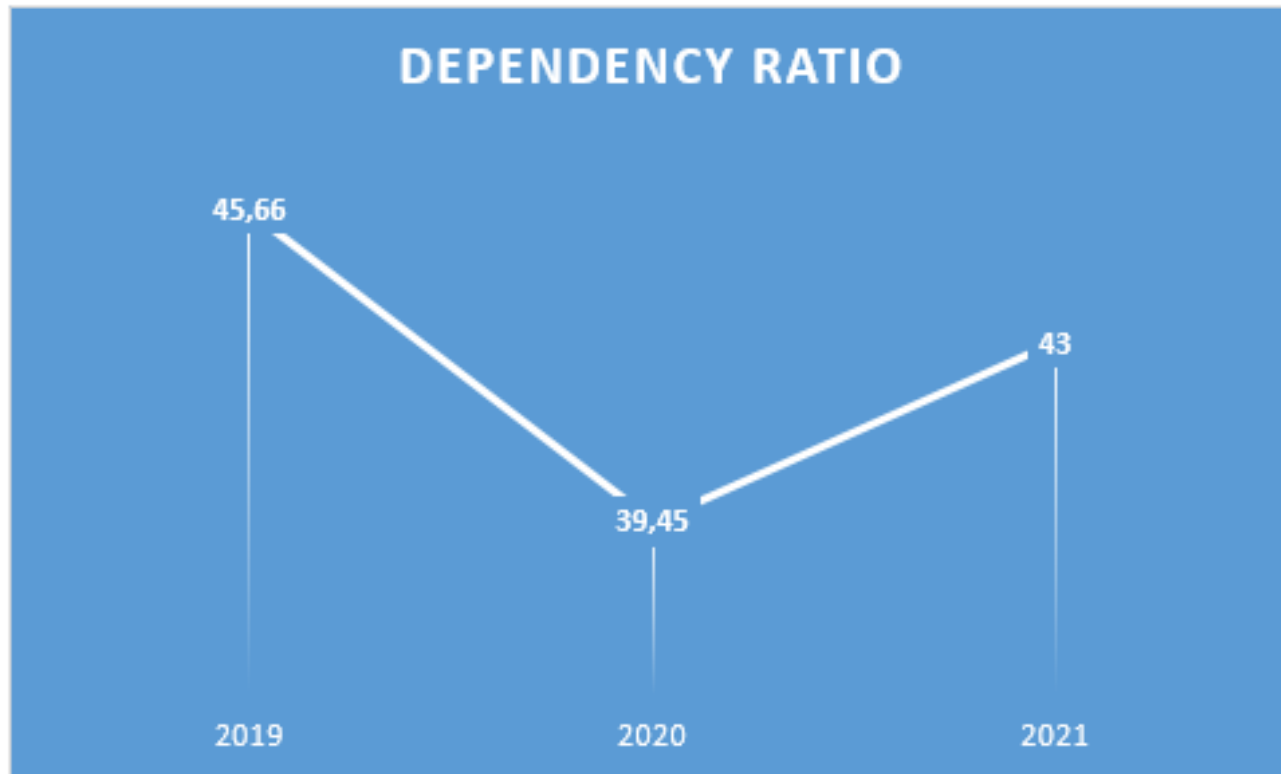
Angka NRR yang ideal berada pada angka $NRR = 1$ artinya setiap penduduk wanita akan digantikan oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisi dirinya. Hal ini berarti bila NRR lebih dari 1 maka dapat dipastikan pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat.

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa NRR Kabupaten Majalengka mengalami penurunan pada tahun 2019 berada pada angka 3,76 menjadi 3,62 di tahun 2020 pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 2,29. Hal ini menunjukkan adanya penurunan bayi perempuan yang lahir hidup mengalami penurunan dari tahun ke tahun.



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

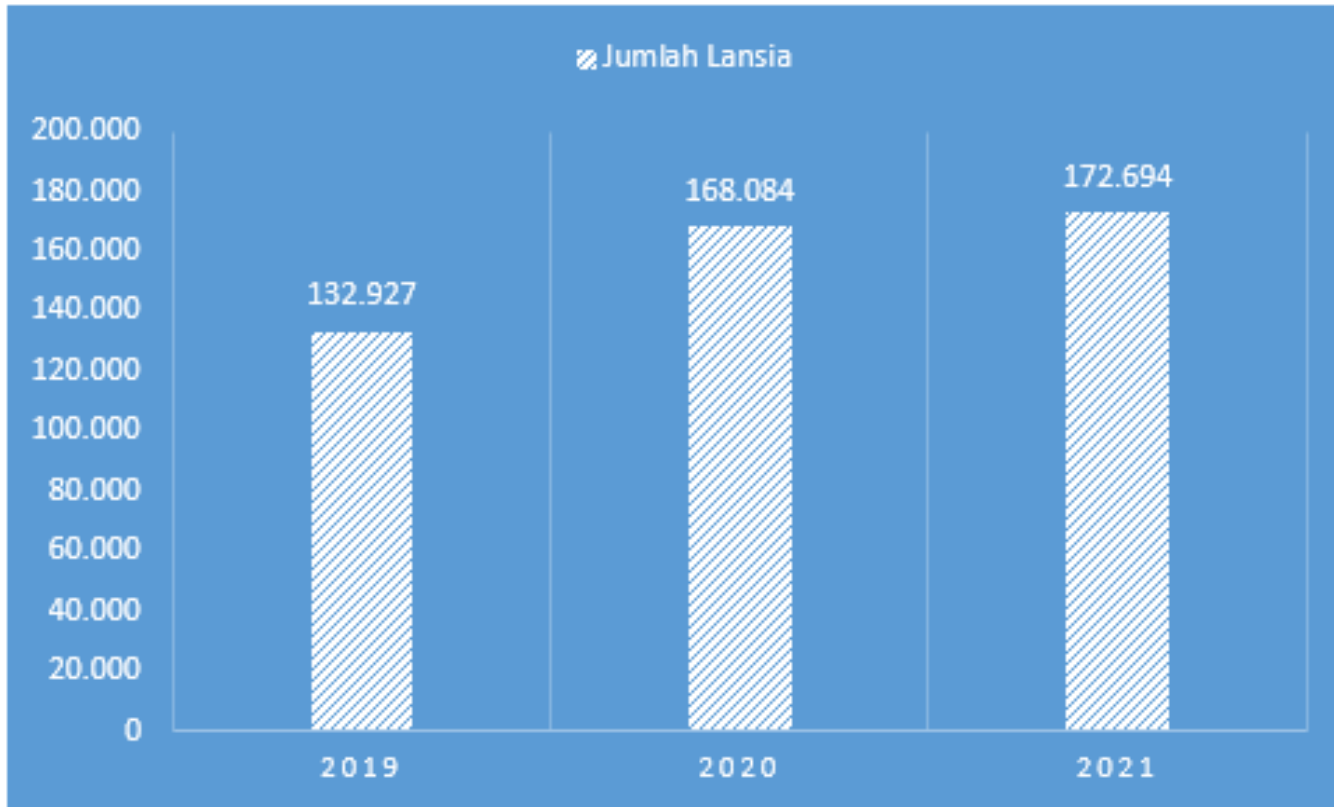
Ratio Beban Ketergantungan atau Dependency Ratio (DR)



Sumber : Profil Pembangunan Daerah 2021 dan Majalengka dalam Angka 2022 (diolah)

Ratio beban ketergantungan ideal berada pada angka 41 yang berarti 100 penduduk usia produktif berbanding 41 penduduk usia non produktif. Dari grafik tersebut dapat dilihat ratio beban ketergantungan di Kabupaten Majalengka tahun 2019 berada pada angka 45,66 kemudian mengalami penurunan angka pada tahun 2020 menjadi 39,45 tahun 2021 ratio beban ketergantungan di Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan menjadi 43.

Penduduk Lanjut Usia



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka (diolah) 2021

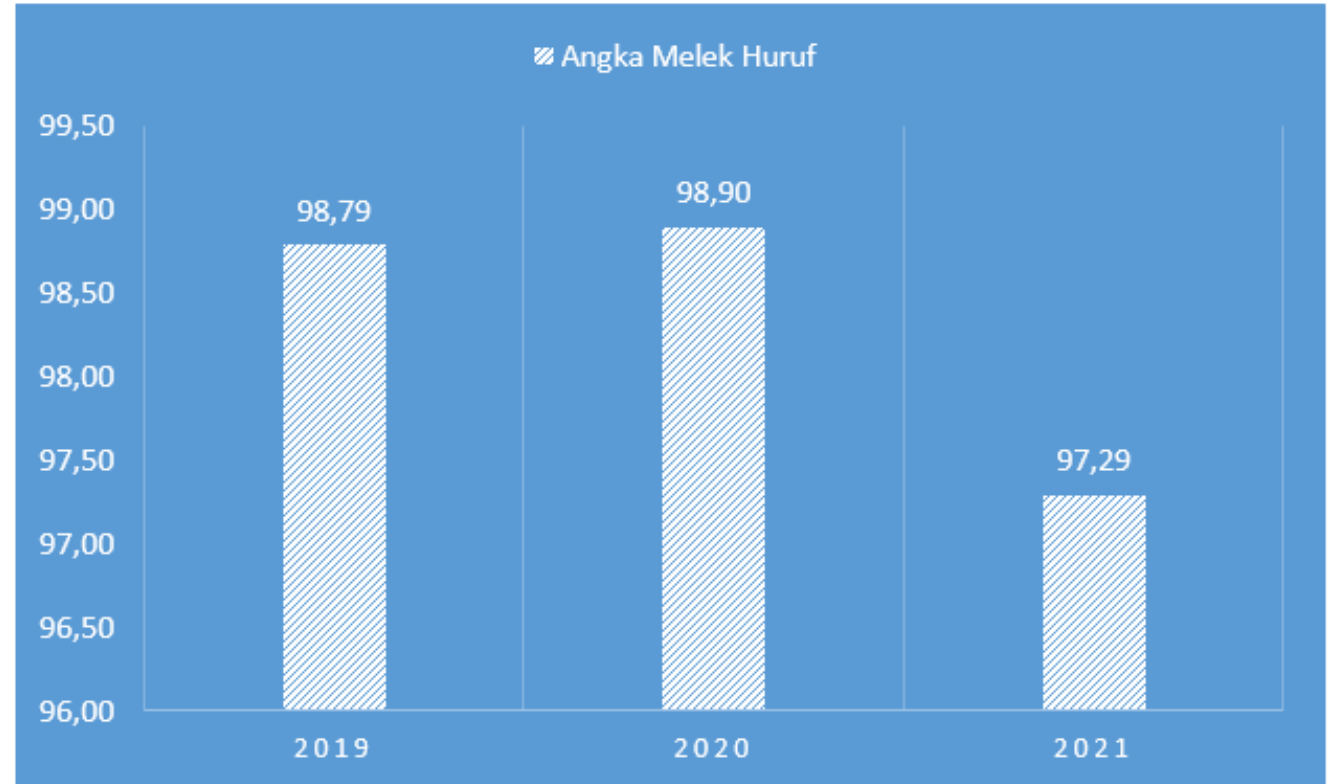
Dari grafik tersebut jelas terlihat bahwa jumlah penduduk lanjut usia semakin meningkat, dengan Umur Harapan Hidup saat ini di Kabupaten Majalengka saat ini 70,27 tentunya hal ini menjadi indikator semakin baiknya tingkat kesehatan masyarakat. Namun hal ini perlu disikapi agar penduduk lanjut usia tetap dapat dilayani dengan baik dan mendapat fasilitas yang dibutuhkan.

A high-angle photograph of two male runners on a red athletic track. The runner in the foreground is wearing a red t-shirt with a 'PANTHER' logo and blue and white striped shorts. The runner behind him is wearing a black t-shirt with a circular logo and black shorts. A large, solid red circle is superimposed over the center of the image, containing the text 'Kualitas Penduduk' in white. The track has white lane markings, and a green grassy area is visible to the right.

Kualitas
Penduduk

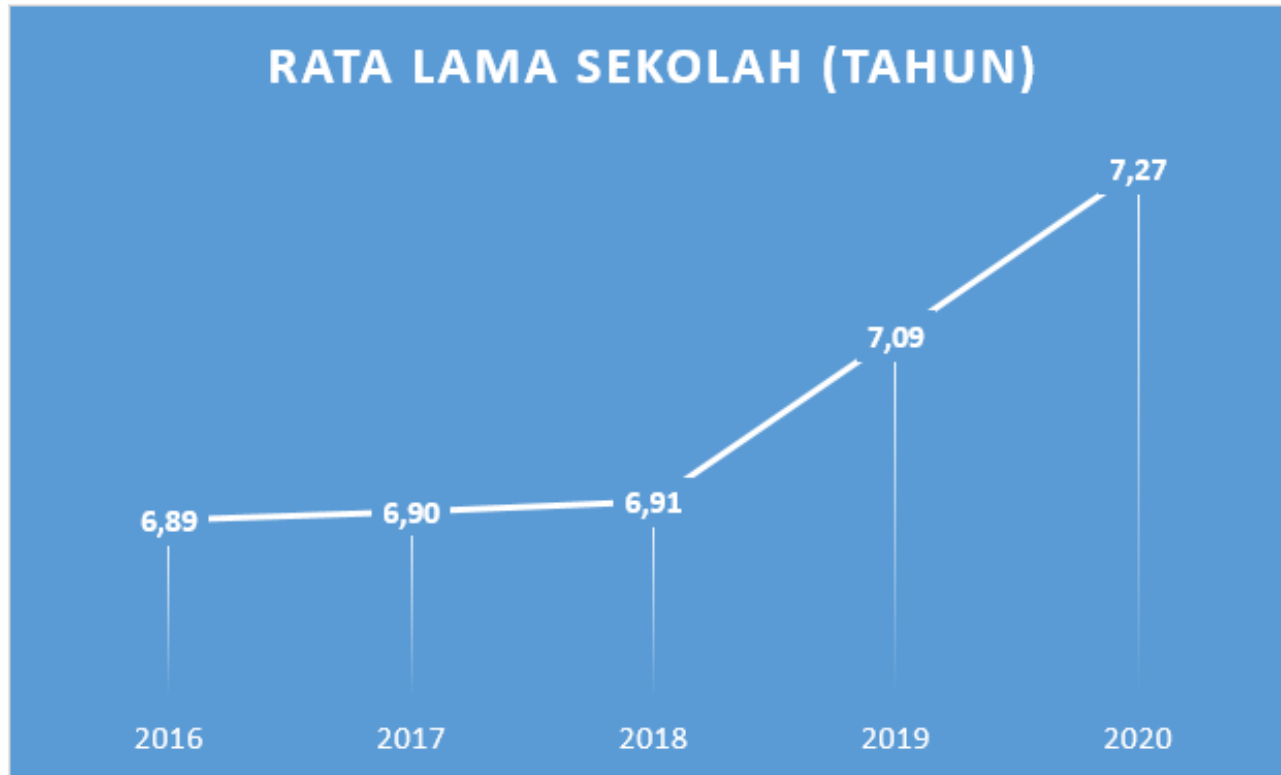
Angka Melek Huruf

Tingkat melek huruf penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 sudah cukup baik dengan mencapai 98,90%, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan ke 97,29%. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Majalengka, hal ini perlu ditingkatkan kembali.



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

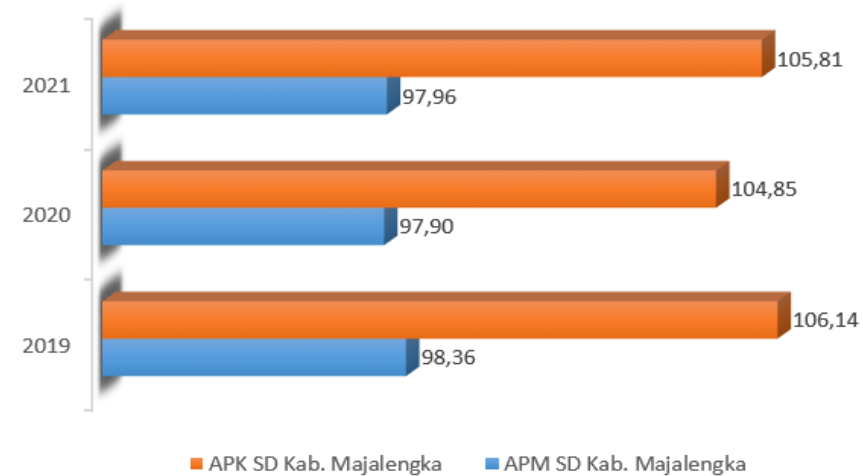
Rata – rata Lama Sekolah



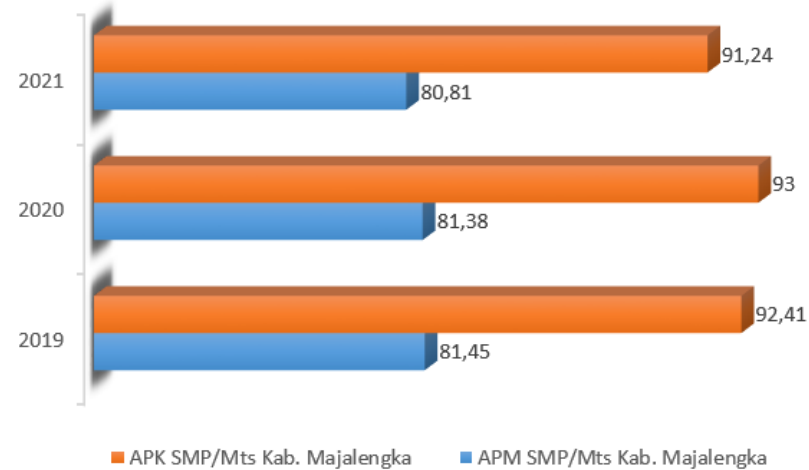
Perkembangan Rata Lama Sekolah tahun 2016-2020 menunjukkan grafik yang menaik yaitu dari 6,89 tahun pada tahun 2016 menjadi 7,27 tahun pada 2020.

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

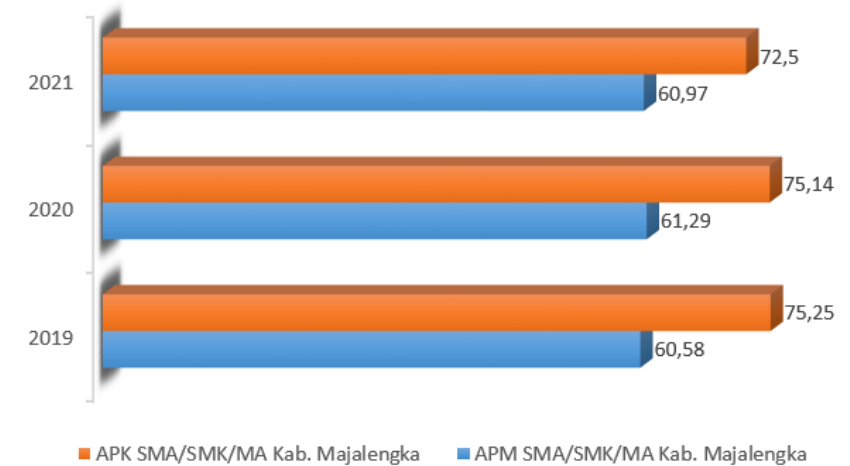
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)



jenjang pendidikan Sekolah Dasar/MI sederajat

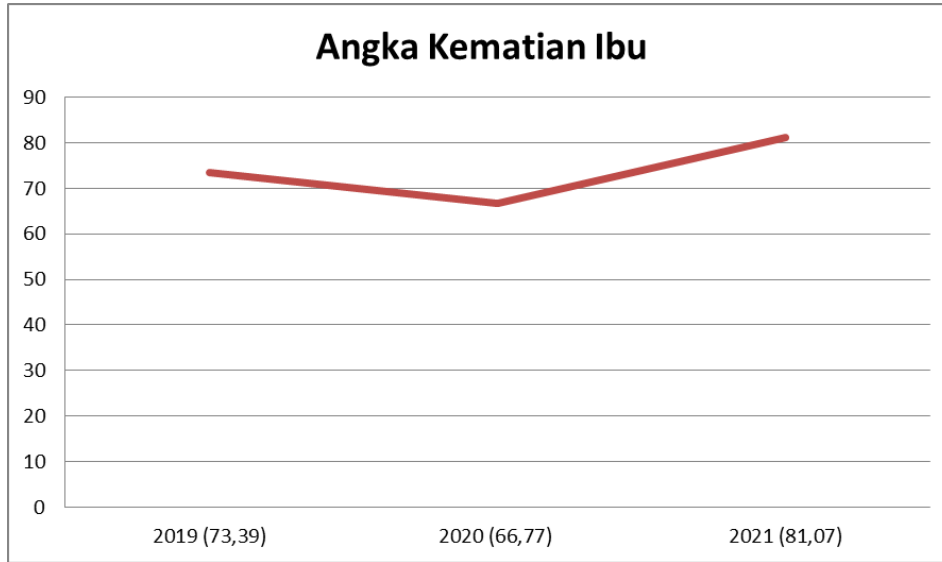


jenjang pendidikan SMP/Mts sederajat

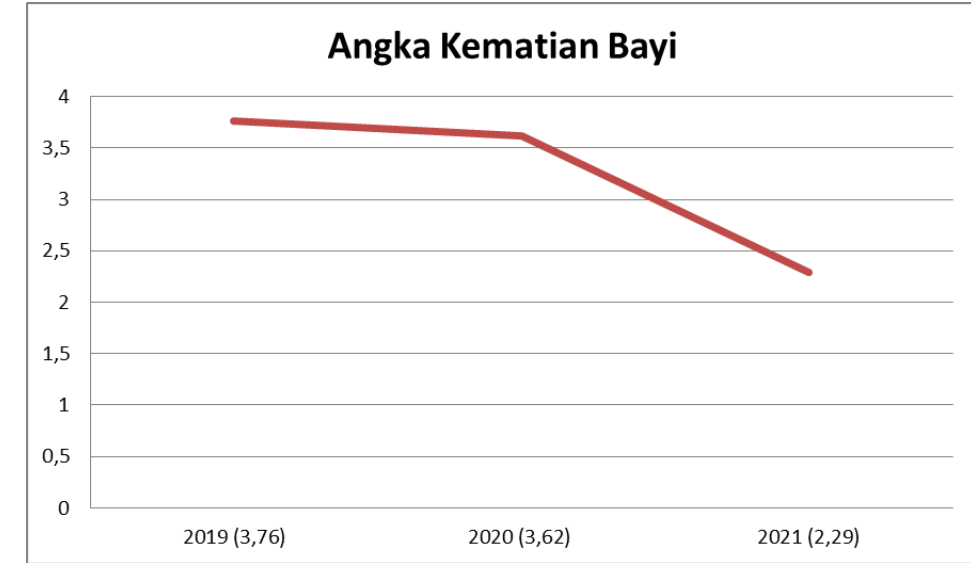


jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sederajat

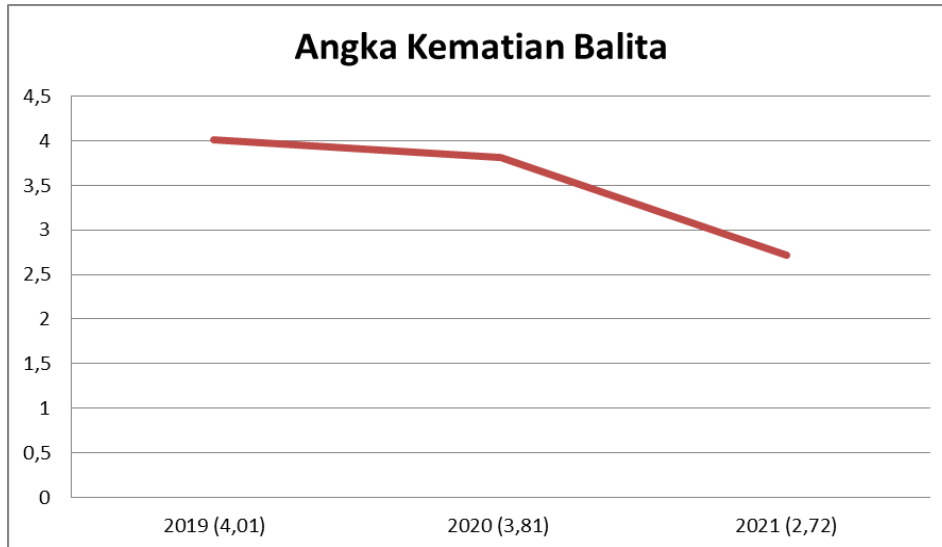
Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita



Sumber : Dinkes Kabupaten Majalengka, 2021



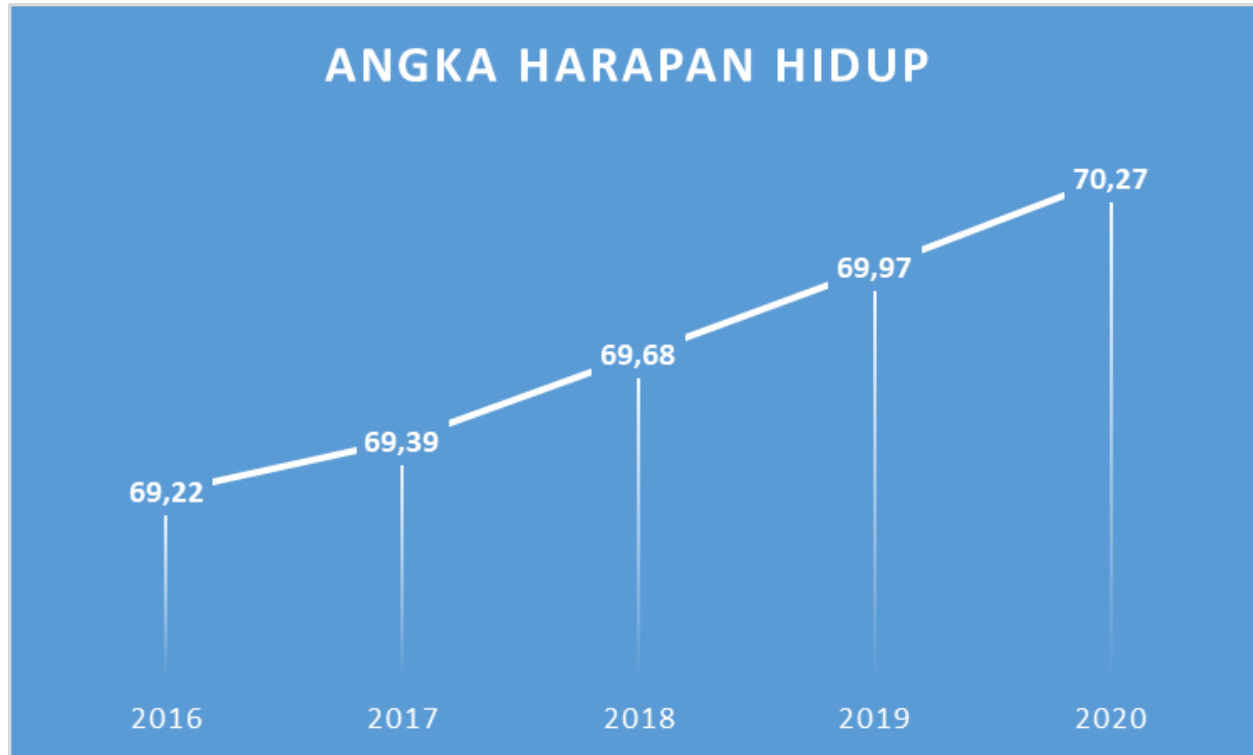
Sumber : Dinkes Kabupaten Majalengka, 2021



Sumber : Dinkes Kabupaten Majalengka, 2021

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan dari tahun 2021 sedangkan Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan pada tahun 2021. hal ini tentu membutuhkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah Kabupaten Majalengka dalam upaya menekan Angka Kematian Ibu.

Angka Harapan Hidup



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

Pada rentang tahun 2016-2020 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Majalengka terus meningkat dari 69,22 tahun pada 2016 menjadi 70,27 tahun pada 2020. Angka ini bisa diartikan bahwa bayi yang baru lahir di Majalengka memiliki peluang untuk hidup hingga 70,27 tahun.

Puskesmas dan Rumah Sakit

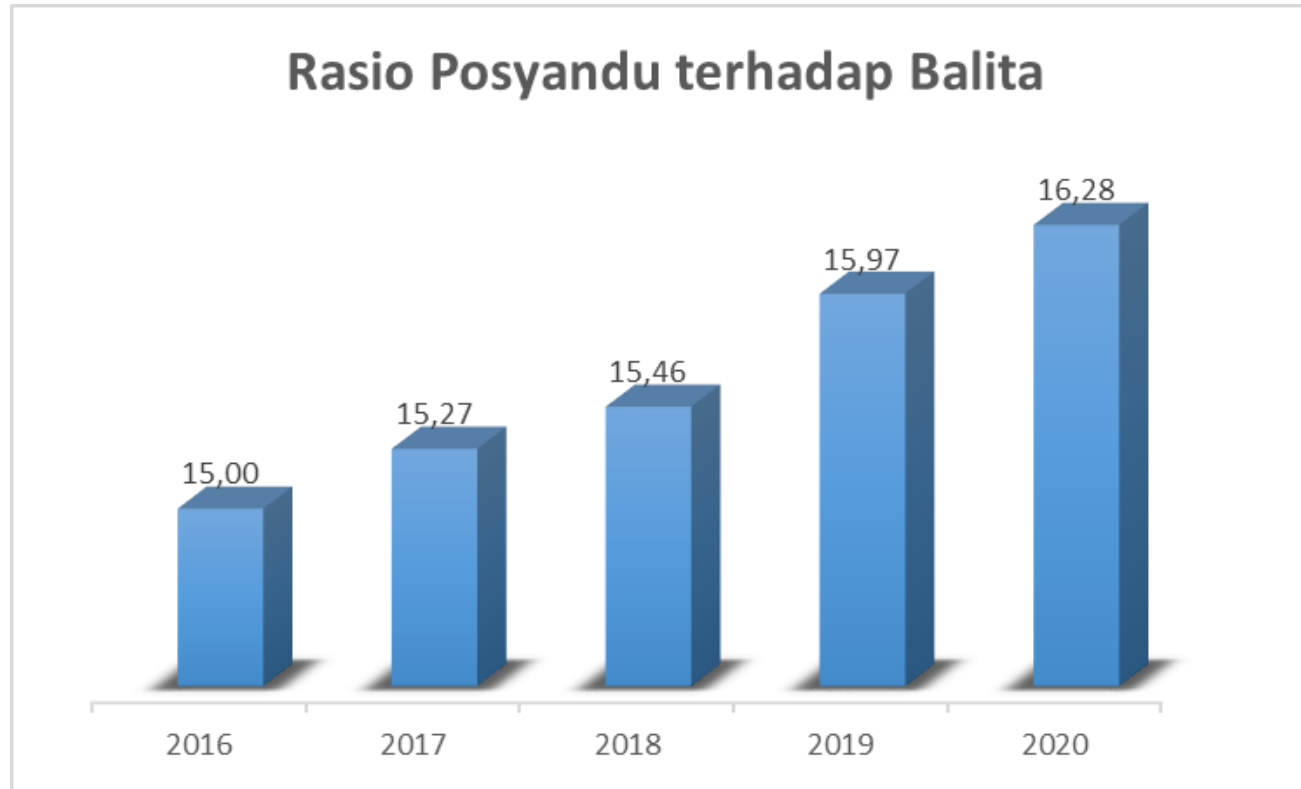
No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah	unit	2	2	2	2	2
2	Jumlah Rumah Sakit Swasta	unit	2	2	3	3	3
3	Jumlah Poliklinik	unit				51	59

Sumber : Dinkes Kabupaten Majalengka, 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Seluruh Puskesmas	unit	32	32	32	32	32
2	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	unit	67	64	73	73	74

Sumber : Dinkes Kabupaten Majalengka, 2021

Posyandu



Sumber : Dinkes Kabupaten Majalengka, 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun nya rasio posyandu terhadap balita di Kabupaten Majalengka terus mengalami kenaikan.

Jumlah Dokter dan Tenaga Medis

No	Uraian	Satuan	2020	2021
1	Jumlah Perawat	orang	884	1181
2	Jumlah Bidan	orang	552	1086
3	Jumlah Tenaga Farmasi	orang	80	314
4	Jumlah Tenaga Gizi	orang	3	55
5	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	orang		1081

Sumber : Dinkes Kabupaten Majalengka, 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter Umum	Orang	170	137	181	116	249
2	Jumlah Dokter Spesialis	Orang	54	47	64	74	76
3	Jumlah Dokter Gigi	Orang	18	19	25	20	38
4	Jumlah Dokter Gigi Spesialis	Orang	0	0	0	1	1

Sumber : Dinkes Kabupaten Majalengka, 2021

PDRB



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka di tengah perlambatan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak awal tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka masih mengalami pertumbuhan yang positif besar.

Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

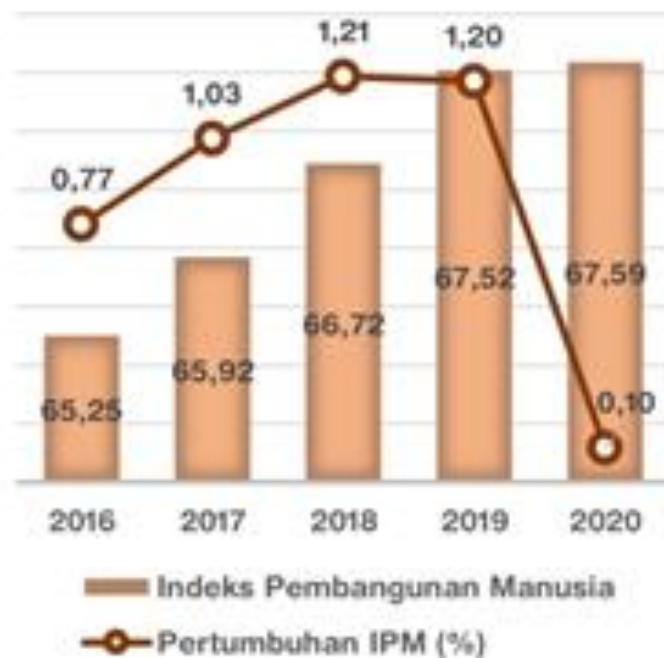


Garis kemiskinan Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun selama periode 2016-2020. Tahun 2019 sebesar 121.060 per jiwa, dan tahun 2020 sebesar 138.210 per jiwa, ini menandakan bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Majalengka mengalami kenaikan yang signifikan dan berangsur membaik.

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020



Pada tahun 2020, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka masih berstatus “sedang” atau sebesar 67,59 poin, masih sama dengan statusnya pada tahun 2019. IPM Majalengka pada tahun 2020 tumbuh sebesar 0.10 persen dibandingkan tahun 2019. Laju pertumbuhan IPM ini merupakan selama sepuluh tahun terakhir. perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tahun 2020 membuat indikator pembentuk IPM terutama dimensi pengeluaran menurun dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menghambat laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Majalengka

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, 2021

Persebaran
dan
Mobilitas
Penduduk

**Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Majalengka Tahun 2020**

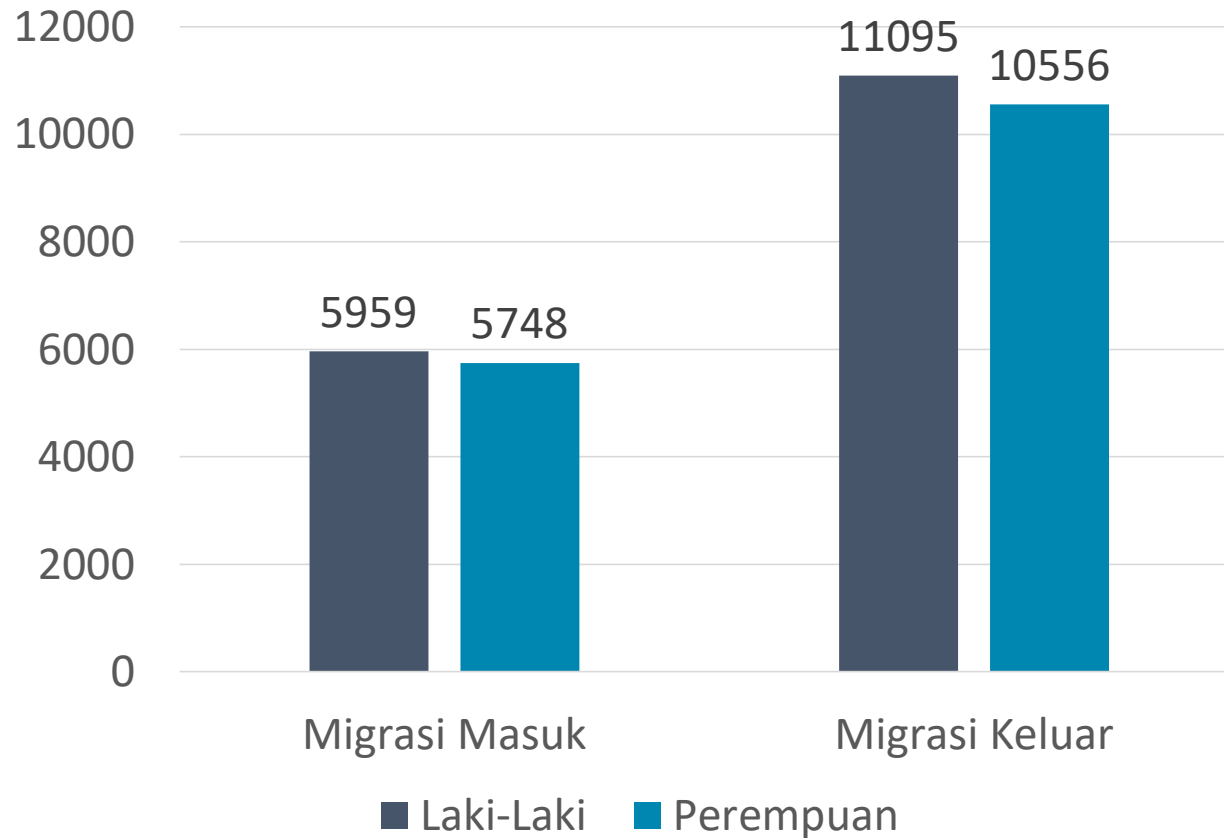
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Lemahsugih	33.006	31.605	64.611	104,43
2	Bantarujeg	23.868	23.713	47.581	100,65
3	Cikijing	34.885	33.872	68.757	102,99
4	Talaga	24.794	23.918	48.712	103,66
5	Argapura	18.625	18.129	36.754	102,74
6	Maja	26.722	26.240	52.962	101,84
7	Majalengka	36.341	36.344	72.685	99,99
8	Sukahaji	23.786	23.557	47.343	100,97
9	Rajagaluh	23.829	23.282	47.111	102,35
10	Leuwimunding	32.621	31.802	64.423	102,58
11	Jatiwangi	45.757	45.087	90.844	101,49
12	Dawuan	23.846	23.770	47.616	100,32
13	Kadipaten	23.612	23.162	46.774	101,94
14	Kertajati	23.973	24.149	48.122	99,27
15	Jatitujuh	27.675	27.930	55.605	99,09
16	Ligung	32.823	33.079	65.902	99,23
17	Sumberjaya	32.354	31.777	64.131	101,82
18	Panyingkiran	16.335	16.297	32.632	100,23
19	Palasah	26.595	26.475	53.070	100,45
20	Cigasong	18.892	18.491	37.383	102,17
21	Sindangwangi	17.395	16.931	34.326	102,74
22	Banjaran	12.684	12.735	25.419	99,60
23	Cingambul	22.099	21.481	43.580	102,88
24	Kasokandel	26.344	26.119	52.463	100,86
25	Sindang	8.551	8.603	17.154	99,40
26	Malasma	25.360	23.952	49.312	105,88
Kabupaten Majalengka		662.772	652.500	1.315.272	101,57

Persebaran Penduduk

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Jatiwangi dengan tingkat kepadatan penduduk 2.290 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Kertajati adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah dengan tingkat kepadatan 351 jiwa per km².

Mobilitas Penduduk

Jumlah Migrasi



Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa antara migrasi masuk dan migrasi keluar di Kabupaten Majalengka lebih besar migrasi masuk dengan selisih hampir 2 kali lipat dan penduduk laki-laki lebih banyak melakukan migrasi daripada penduduk perempuan.

Sumber : Disdukcapil Kab. Majalengka, Tahun 2021

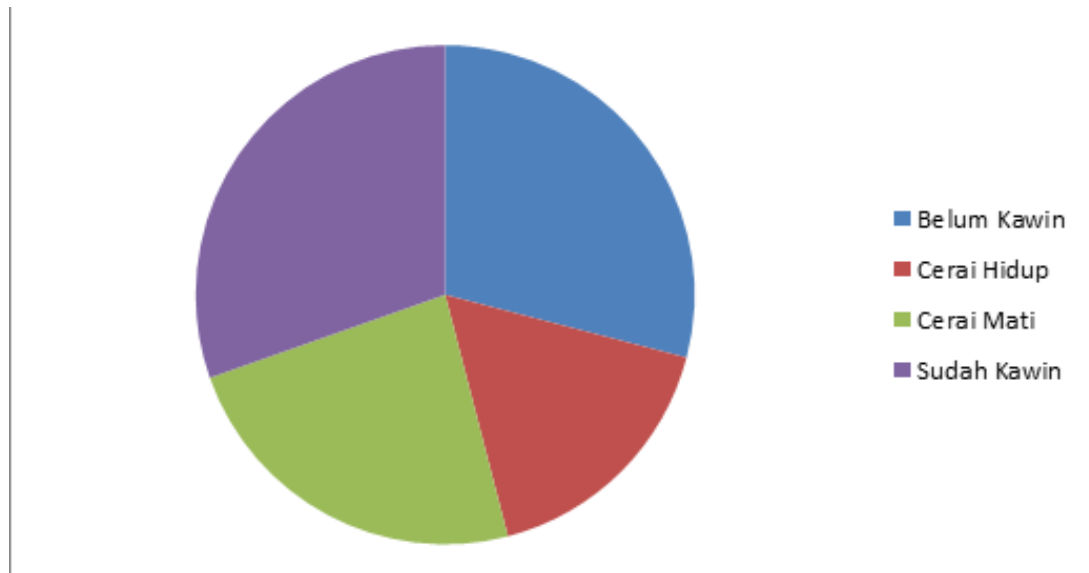


Pembangunan Keluarga



Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada kurun waktu dan wilayah tertentu berguna bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. Status perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori, antara lain yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel grafik berikut ini:



Dilihat dari grafik tersebut, status kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 52,8 % atau 1.323.854 orang dimana proporsi Status Belum Kawin lebih mendominasi sebesar 30% dari jumlah keseluruhan dan paling tertinggi dari jumlah keseluruhan, proporsi Status Cerai Hidup lebih rendah di antara jumlah yang lain nyah sebesar 17%

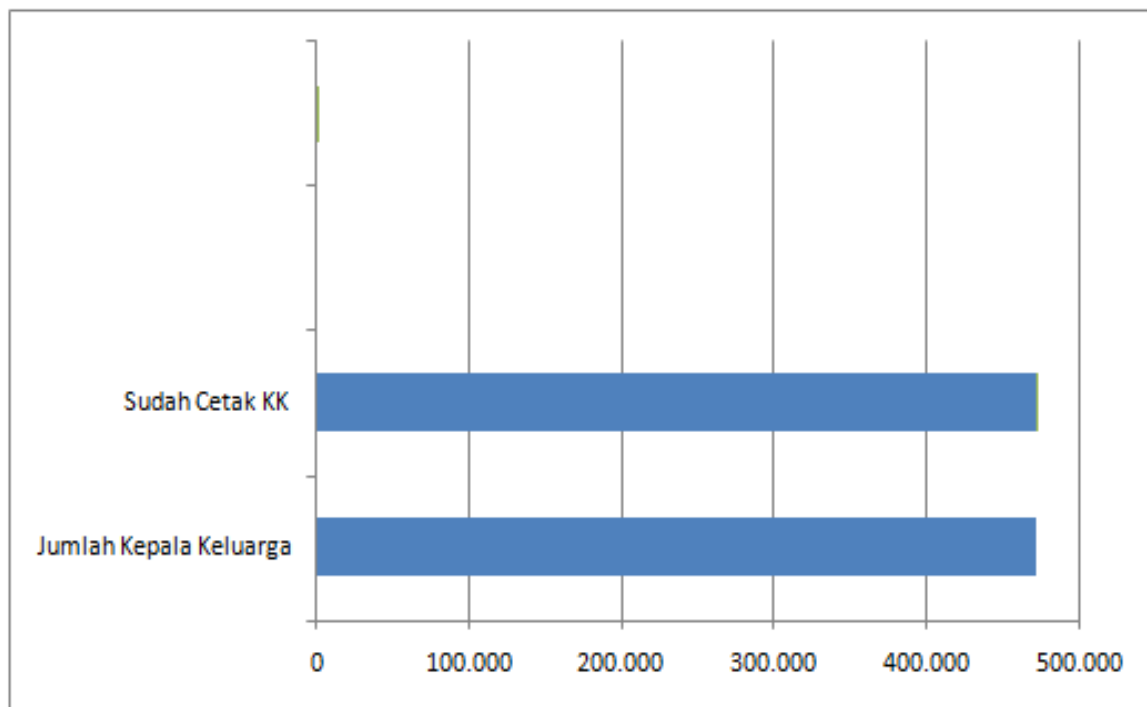
Sumber : Disdukcapil Kab. Majalengka, Tahun 2021



Administrasi Kependudukan

Kepemilikan Kartu Keluarga

Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Majalengka Tahun 2021

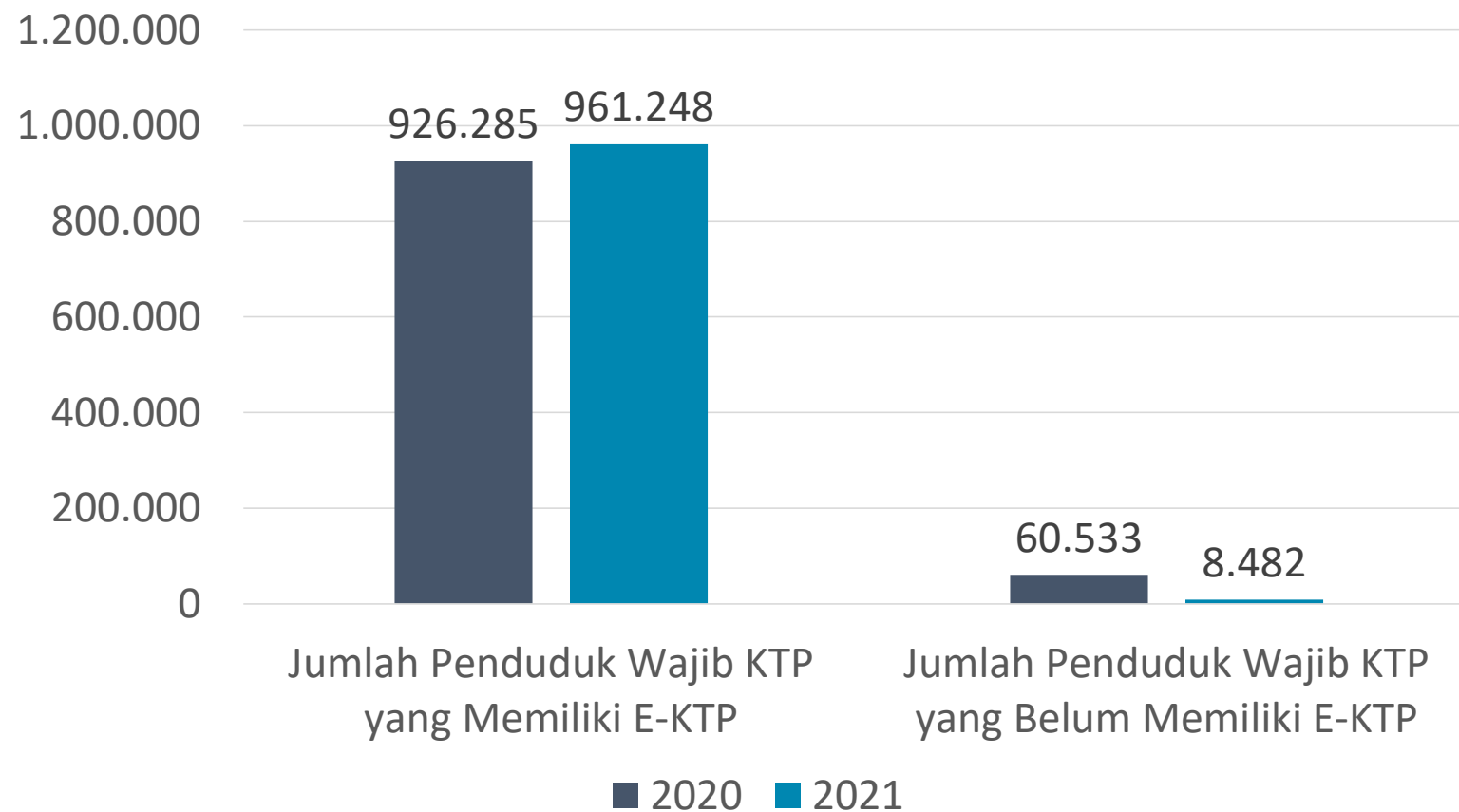


Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahawa mayoritas keluarga di Kabupaten Majalengka sudah memiliki Kartu Keluarga yang menandakan persentase kepemilikan kartu keluarga sangat tinggi di Kabupaten Majalengka.

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Jumlah Penduduk Wajib E-KTP

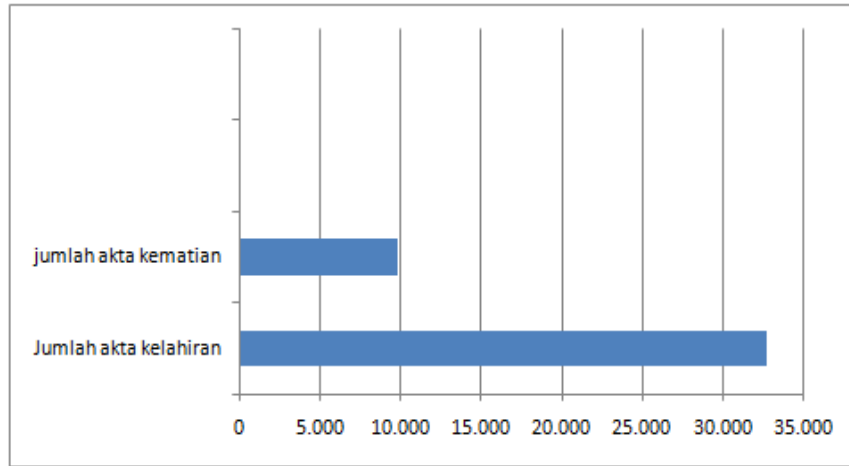


Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

Dari data yang disajikan dapat diketahui bahwa tingkat kepemilikan KTP di Kabupaten Majalengka sangat tinggi. Hal ini juga didukung dari data Disdukcapil Kabupaten Majalengka Tahun 2021 bahwa Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E KTP sebesar 93,87% pada tahun 2020 dan sebesar 99,13% pada tahun 2021.

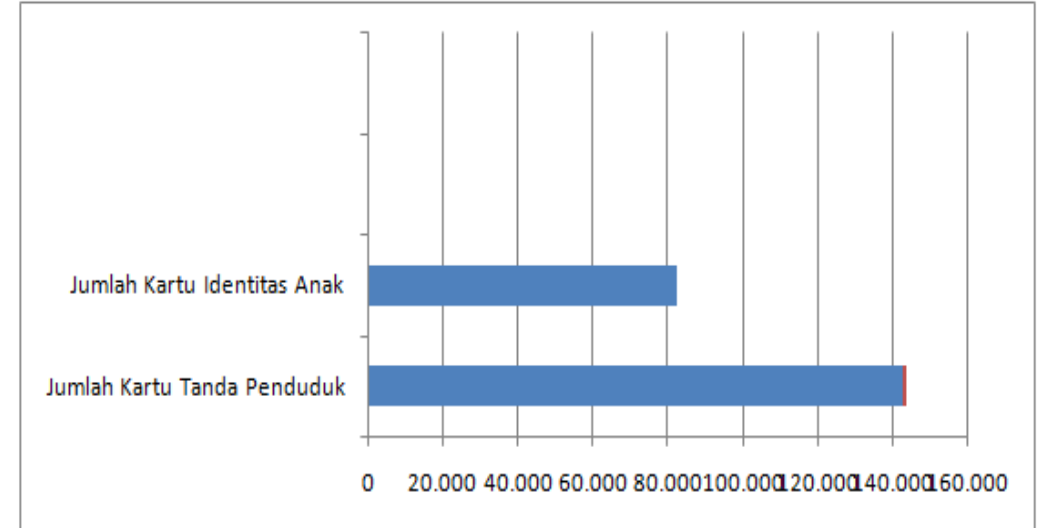
Kepemilikan Akta

Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian tahun 2021



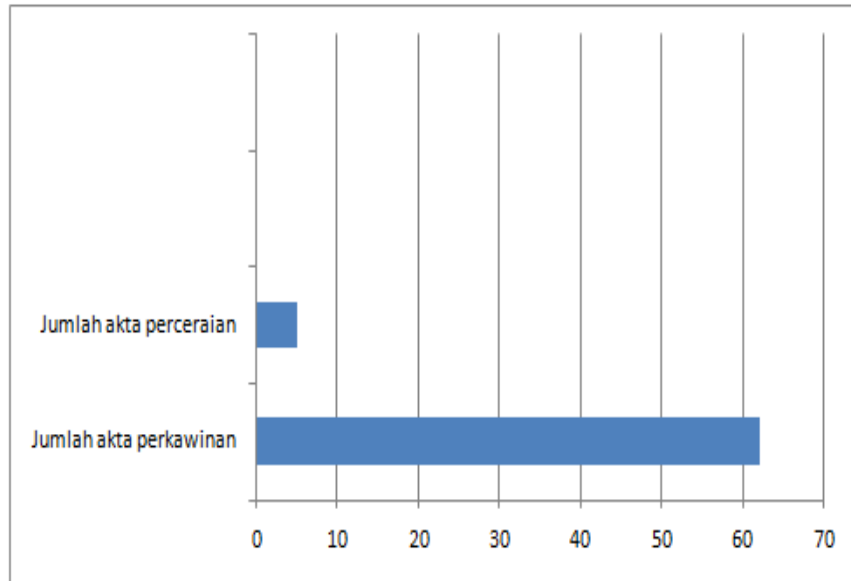
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

Jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak tahun 2021



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka tahun 2021

Jumlah Akta Perkawinan dan Akta Perceraian tahun 2021



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 2021

Dari 3 grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak usia 0-18 tahun telah memiliki akta kelahiran, yang memiliki akta kelahiran sebanyak 32.773 anak. Selain itu jumlah akta perkawinan dan perceraian masih tergolong rendah karena pada bagian sebelumnya 1.323.854 orang berstatus sudah kawin. Lalu jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak sudah tergolong cukup tinggi karena jumlahnya 50% dari jumlah Kartu Tanda Penduduk.



TERIMA KASIH

1.1 Latar Belakang

Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka 2005-2025 salah satunya adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing. Dalam hal ini, Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Majalengka diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Untuk itu, dalam mewujudkan Kabupaten Majalengka dengan struktur penduduk seimbang, Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk mencapai momentum demografi berupa kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Hal inilah yang disebut dengan *demographic deviden* yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk pada fase ini betul-betul menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Pertanyaan besar adalah kapan dan bagaimana mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang tersebut. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu dalam mewujudkannya diperlukan suatu *grand design* atau rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk agar kondisi penduduk tumbuh seimbang segera terwujud yang dimulai dengan kajian situasi kependudukan daerah.

Hal pokok yang perlu dilaksanakan agar struktur penduduk tumbuh seimbang dapat terwujud adalah kepedulian semua pihak, baik unsur pemerintah, sektor swasta, maupun unsur masyarakat. Melalui kerja keras, terintegrasi dan berkesinambungan sejalan dengan semangat otonomi daerah, implementasi prinsip "Pembangunan Berwawasan Kependudukan" secara konsisten dan berkelanjutan merupakan paradigma yang tidak dapat ditawar lagi. Lebih dari itu, dengan menggabungkan amanat UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, telah memberikan gambar bahwa aspek-aspek kependudukan beserta matryanya dan lingkungan hidup, perlu digaungkan dengan prinsip "Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan".

Sebagai simpulan, diperlukan suatu rencana besar yang memuat kebijakan dan program operasional baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang mampu menjadi dasar dan tolok ukur pembangunan kependudukan di Kabupaten Majalengka. Prinsip Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan adalah paradigma dari rencana besar yang disusun tersebut. Untuk itu, perlu dibuat pengantar rancangan induk pembangunan kependudukan dalam bentuk "Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka". Arah dan target capaian pengendalian kuantitas

penduduk adalah pilar utama dalam rancangan induk tersebut yang dimulai dengan kajian situasi kependudukan daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka adalah Tercapainya kualitas penduduk yang tinggi untuk mencapai Majalengka RAHARJA (Religius, Adil, Makmur dan Sejahtera). Serta terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

1.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya suatu pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Serta terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi dan berbudaya tinggi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang tertuang pada dokumen ini mencakup :

1. 5 Pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan.
2. Dokumen ini berlaku bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan merencanakan Pembangunan Daerah serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, lembaga non pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Majalengka.

1.5 Data Dan Fasilitas Penunjang

a. Penyediaan oleh pengguna jasa

- Laporan dan Data
Buku laporan hasil studi terdahulu dan data lainnya yang telah dilaksanakan dan dipandang perlu oleh konsultan sebagai referensi data.
- Ruang rapat yang digunakan untuk kegiatan pembahasan laporan.

b. Penyediaan oleh Penyedia jasa (konsultan)

Fasilitas yang harus disediakan oleh konsultan selama pelaksanaan pekerjaan antara lain :

- Studio, lengkap dengan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti : peralatan gambar, peralatan tulis, komputer, printer, ploter, dan barang habis pakai.
- Biaya mobilisasi dan demobilisasi personil ke dan dari lapangan.
- Peralatan pengukuran yang memenuhi standar.
- Dan lain-lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pekerjaan.

1.6 Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan ini paling lambat sudah dimuIai paling lambat 45 (Empat Puluh Lima) hari, terhitung sejak ditetapkan Surat Perintah Kerja (SPK). Seluruh pekerjaan ini harus selesai paling lambat dalam waktu 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak ditandatanganinya SPK.

1.7 Biaya Penyelesaian Pekerjaan

Pagu biaya penyelesaian pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika Sub Kegiatan Belanja Konsultansi Non Kontruksi Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*).

Adapun Perincian Biaya tersebut dialokasikan untuk :

- a. Biaya Personil, mencakup :
 - Tenaga Ahli
 - Tenaga Pendukung/Tenaga Teknis
- b. Biaya Langsung Non-Personil, mencakup:
 - Biaya Kantor / Studio
 - Biaya Pelaporan dan Produk Akhir

1.8 Output atau Keluaran

Keluaran yang diinginkan dari pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diharapkan mampu menghasilkan keluaran sebagai berikut :

- Laporan Pendahuluan
- Laporan Akhir

1.9 Sistematika Pembahasan

Dokumen Usulan Teknis ini disusun dalam beberapa Bab yang satu sama lain saling terkait. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam pendahuluan diuraikan beberapa hal seperti latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, kedudukan, pendekatan pengembangan dokumen, batasan pengertian.

Bab II Gambaran Umum

Didalam Bab II di sampaikan uraian mengenai visi dan misi serta hasil dari data analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan di kabupaten majalengka.

Bab III Pemahaman Terhadap Kerangka acuan Kerja

Bab III berisi pemahaman umum, pemahaman terhadap maksud dan tujuan, pemahaman terhadap sasaran, pemahaman terhadap ruang lingkup, pemahaman terhadap output yang dihasilkan, pemahaman terhadap manfaat.

Bab IV Tanggapan Terhadap Kerangka acuan Kerja

Bab IV berisi tanggapan umum, tanggapan terhadap maksud dan tujuan, tanggapan terhadap sasaran, tanggapan terhadap ruang lingkup, tanggapan terhadap output yang dihasilkan, tanggapan terhadap manfaat.

Bab V Apresiasi Inovasi

Bab V menjelaskan tentang hal-hal yang menurut konsultan dianggap perlu ditambahkan dan di bahas untuk meningkatkan kualitas hasil kegiatan.

Bab VI Pendekatan dan Metodologi

Bab VI berisi bebera hal yang akan dilakukan oleh konsultan untuk menghasilkan keluaran yang dipersyaratkan oleh Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan.

Bab VII Rencana kerja

Bab VII berisi tentang tahapan-tahapan kerja yang akan dilakukan oleh konsultan untuk melaksanakan kegiatan.

Bab VIII Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Bab VIII berisi tentang tata waktu pelaksanaan pekerjaan.

Bab IX Tenaga Ahli dan Tanggungjawabnya

Bab IX berisi tentang tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan ini dengan tanggungjawab pekerjaannya.

- Bab X Jadwal Penugasan Tenaga ahli
Bab X berisi tentang jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan Kerangka acuan.
- Bab XI Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan
Bab XI berisi tentang penjelasan organisasi kegiatan pada pemerintah dan konsultan.
- Bab XII Pelaporan
Bab XII berisi tentang jenis-jenis laporan, waktu penyerahan dan kuantitasnya sesuai dengan Kerangka Acuan kerja.
- Bab XIII Staf Pendukung
Bab XIII berisi tentang tenaga pendukung kegiatan yang ditugaskan oleh konsultan.
- Bab XIV Fasilitas Pendukung
Bab XIV berisi tentang uraian perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh Konsultan.
- Bab XV Penutup
Bab XV berisi tentang uraian penutup dan ucapan terima kasih hasil dari kegiatan ini.

2**GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

2.1 LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

PT. ANDRA CIPTA CONSULT adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang konsultan profesional. Produk jasa konsultasi yang diberikan berupa perencanaan teknis dan manajemen pada lingkup pembangunan daerah dan nasional yang bersifat konsultan pemerintah maupun swasta.

PT. ANDRA CIPTA CONSULT didukung dengan tenaga ahli yang profesional dan peralatan penunjang yang mutakhir serta sistem manajemen yang efektif, senantiasa memberikan layanan produk yang bermutu, tepat guna dan tepat sasaran. Berbekal etos kerja, profesionalisme dan tekad yang kuat dalam layanan jasa dan produk yang menjadi jaminan dan prinsip kerja.

2.2 LINGKUP PEKERJAAN

PT. ANDRA CIPTA CONSULT sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki perusahaan, memberikan layanan jasa konsultasi di berbagai bidang seperti dirinci sebagai berikut :

1. Bidang Telematika

- Telekomunikasi Darat
- Telekomunikasi Satelit
- Perangkat Keras
- Konten
- Aplikasi/ Perangkat lunak
- Sub-bidang Telematika lainnya

2. Bidang Jasa Studi, Penelitian, dan Bantuan Teknik

- Studi Makro
- Studi Kelayakan & Studi Mikro Lainnya
- Studi Perencanaan Umum
- Jasa Penelitian
- Jasa Bantuan Teknik
- Jasa Penelitian dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

3. Bidang Konsultansi Spesialis

- Jasa Survey Bawah Tanah
- Jasa Survey Permukaan Tanah
- Jasa Pembuatan Peta

4. Bidang Konsultansi lainnya

2.3 MANAJEMEN PERUSAHAAN

Susunan pengurus perusahaan (sesuai dengan akte perubahan perusahaan) terdiri dari komisaris, direktur utama dan direktur, yaitu:

- Direktur Utama : Ir. Andi Kumara
- Direktur : Hendra Gunawan
- Komisaris Utama : Dra. Herlina
- Komisaris : Tri Astuti Saptaningtias

1. Sumberdaya tenaga ahli dan staf pendukung

Perusahaan didukung oleh lebih dari 120 orang tenaga ahli terdiri dari berbagai berbagai bidang dan disiplin ilmu sebagai mitra kerja dengan status part-time, 6 orang tenaga ahli tetap dari berbagai disiplin ilmu, dan tenaga pendukung yang terdiri dari 1 orang tenaga administrasi, 1 orang operator komputer, 1 orang sopir, 1 orang office boy dan 1 orang satpam.



2. Legalitas usaha

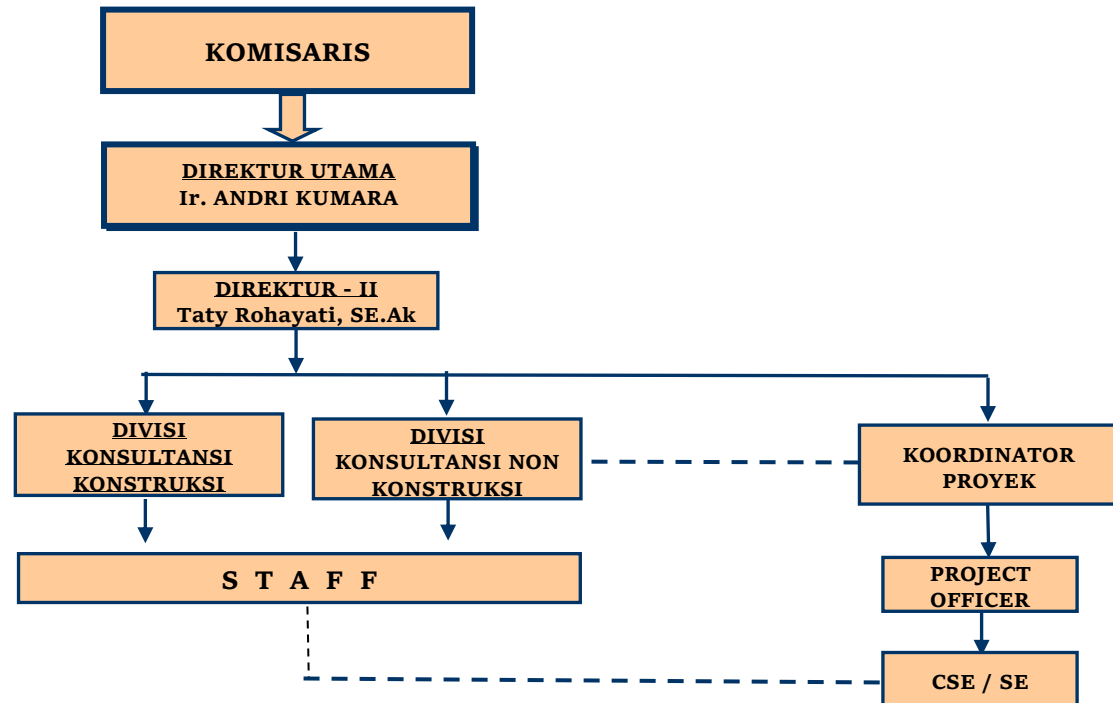
Dokumen administrasi yang penting yang dimiliki perusahaan meliputi akte pendirian perusahaan termasuk perubahan akte, izin usaha jasa konstruksi dari Pemerintah Kota Bandung, tanda anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), sertifikat badan usaha jasa konsultansi pengawasan konstruksi, sertifikat registrasi perusahaan jasa konsultan konstruksi, NPWP, surat keterangan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bandung dan surat keterangan domisili.

3. Kantor

PT. ANDRA CIPTA CONSULT saat ini memiliki kantor pusat di Bandung dengan alamat lengkap yaitu : Jl. Situsari VII No.42 Bandung, Nomor Telpon (022) 7300411, Nomor Faximile (022) 7300411



2.4 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN



2.5 PENGALAMAN PEKERJAAN PERUSAHAAN

Pengalaman perusahaan selama 7 (tujuh) tahun terakhir tertera pada Tabel di bawah ini yaitu meliputi pengalaman pada pekerjaan yang sejenis, pengalaman pada pekerjaan yang terkait, pengalaman pada pekerjaan yang menunjang, dan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TAHUN 2013									
1	Bantuan Program Dikti dalam rangka Hasil Teknologi Tepat Guna Perguruan Tinggi untuk disebarluaskan melalui Website Indonesia Pintar	Bidang Telematika	Jakarta	Departemen Pendidikan Nasional Dirjend Pendidikan Tinggi	Gedung Dikti Lt 4 Jl. Jendral Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat	034/D3/U/2013 Tanggal 6 Februari 2013	99.960.000,-	6/2/2013	6/5/2013
2	Perencanaan Jasa Konstruksi Sipil Rekonduktoring SUTT 150 kV Sunyaragi-PLTU Cirebon dari 1 x Dove menjadi 2 x Zebra dan PLTU Cirebon –Brebres (T.D.79) dari 1 x Dove menjadi 2 x Dove	Bidang Elektrikal	Sunyaragi, Cirebon, dan Brebes	PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Barat	Jl. Supratman No. 58 Bandung	009.PJ/610/RJBR/ 2013 Tanggal 3 Maret 2013	174.465.000,-	3/3/2013	1/6/2013
3	Pembangunan Gedung Resource Center SLB Negeri Purwakarta	Bidang Arsitektur	Kabupaten Purwakarta	Dinas Pendidikan Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana SLB Jawa Barat TA 2013	Jl. DR. Rajiman No. 6 Bandung	725/KPSP-SLB/SPK/III/2013 Tanggal 6 Maret 2013	23.346.000,-	6/3/2013	4/4/2013
4	Digitasi Peta Geologi Teknik	Bidang Telematika	Kota Bandung	Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Geologi Pusat Lingkungan Geologi	Jl. Diponegoro No. 57 Bandung	06/P2K/SPK/DPGT/ 91/IV/2013 Tanggal 1 April 2013	41.387.500,-	1/4/2013	15/5/2013
5	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung	Bidang Sipil/ Sub BidangPra-Disain dan Disain Engineering Bangunan	Bandung	Pemerintah Kota Bandung Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	Jl. Cianjur No. 34 Bandung, Tlp. 022 - 721766, Fax. 022 - 7217608	027/069-BPMPPT/2013 Tanggal 28 April 2013	45.544.000,-	28/04/2013	28/07/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Perencanaan Pembangunan Gedung (Blok) khusus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy-Bandung	Bidang Sipil/ Sub BidangPra-Disain dan Disain Engineering Bangunan	Bandung	LPKlas IIA Banceuy-Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 187A	W8.EG.PL.03.02-493 Tanggal 5 April 2013	97.250.000,-	05/04/2013	05/06/2013
7	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD/MIS Dinas Pendidikan Kota Bandung TA 2013	Bidang Arsitektur	Tersebar di Kota Bandung	Dinas Pendidikan Kota Bandung	Jl. Jendral Ahmad Yani No.239 Bandung	027/01.03/SPK/7-Sekr/08 Tanggal 30 April 2013	48.101.000,-	30/4/2013	13/6/2013
8	Pengawasan Perawatan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Bidang Sipil/ Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain dan Desain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Batam	Pemerintah Kota Batam Dinas Perhubungan	Jl. Jendral Sudirman No. 3 Batam	03/SPK/KON-PENG/PSPTL/KPA-DISHUB/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013	16.208.500,-	13/05/2013	13/07/2013
9	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Sukaluyu Dan Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur	Bidang Sipil/ Sub BidangPra-Disain dan Disain Engineering Bangunan	Kecamatan Sukaluyu Dan Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur	Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur	Jl. Raya Banduna No. 108 B Sadewata - Cianjur (0263) 261862. Fax. (0263) 261288	kd.10.03/KU00.2/2855a/2013 Tanggal 13 Mei 2013	7.900.000,-	13/05/2013	4/06/2013
10	Pembuatan DED (Dana Pendamping WTP Cipeundeuy) Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang	Bidang Sipil	Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Subang	Jl. Aipda K.S Tubun No. 16 Subang	30/690/Dis PU-CK/DAU/KKLJK/ 2013 Tanggal 15 Mei 2013	129.600.000,-	15/5/2013	12/10/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Bantek Kelembagaan Bidang PLP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Kepulauan Bangka Belitung	Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bangka Belitung	Jl. RE Martadinata No. 35 Pangkalpinang	12/SPKPKP2LP-BB/APBN/VI/2013 Tanggal 2 Juni 2013	285.000.000,-	2/6/2013	2/12/2013
12	Pengadaan Pengembangan Website Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Pada Kegiatan Implementasi data Kesejahteraan Sosial Melalui Jaringan Teknologi Informasi (TI)	Bidang Telematika	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Sosial	Jl. Cibabat No. 331 Cimahi	07/Pan-Peng/I DKSJT/VI/2013 Tanggal 02 Juni 2013	29.925.000,-	02/6/2013	22/09/2013
13	Jasa Konsultasi Pekerjaan Bantuan Teknis Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Kegiatan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Barat (Paket PTBG-1)	Bidang Sipil dan Arsitektur	Jawa Barat	Departemen PU Dirjend Cipta Karya Satker Non-Vertikal Tertentu Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Jawa Barat	Jl. Kawaluyaan Indah No. 4 Bandung	KU.08.08/PTBG-JB.09/23.d/VI/2013 Tanggal 4 Juni 2013	353.367.000,-	5/6/2013	2/9/2013
14	Jasa Konsultasi Pekerjaan Bantuan Teknis Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Kegiatan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Barat (Paket PTBG-2)	Bidang Sipil dan Arsitektur	Jawa Barat	Departemen PU Dirjend Cipta Karya Satker Non-Vertikal Tertentu Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Jawa Barat	Jl. Kawaluyaan Indah No. 4 Bandung	KU.08.08/PTBG-JB.09/23.e/VI/2013 Tanggal 4 Juni 2013	199.670.000,-	5/6/2013	2/9/2013
15	Pelatihan dan Pendampingan Community Action Plan (CAP) Model Lingkungan Bermartabat di Lokasi Pondok Pesantren dan Masjid.	Bidang Tata Lingkungan	Kabupaten Bogor, Sukabumi, Bandung Garut, Indramayu dan Cianjur	Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Tata Ruang Dan Permukiman	Jl. Kawaluyaan Indah No. 4 Telepon 7319782 - 7319735 - 7319712 Fax. 7313675	602.31541SPP/25.08/KIM 12013. Tanggal 10 Juni 2013	363.182.000,-	10/06/2013	06/11/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Identifikasi Potensi Dan Konfigurasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Lebaksiu	Bidang Sipil Keairan	Lebaksiu	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Jl. Madukoro AA - BB No. 44 Semarang	050/29/LS/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013	166.730.000,-	17/06/2013	17/10/2013
17	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan Portal Sistem Informasi Geografis (SIG)	Bidang Telematika	Jawa Barat	Departemen PU Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Air	Jl. Ir. H. Djuanda No. 193 Bandung	KU.08.08/P-01 JK/SPK/La-Satker/2013/23 Tanggal 18 Juni 2013	93.203.000,-	19/6/2013	19/8/2013
18	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Tentang Penyusunan RKAB bagi Perusahaan KK dan PKP2B	Bidang Pertambangan dan Energi	Jakarta	Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Dirjend Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10 Jakarta	6/36/91.04/P2K-II/DJB/2013 Tanggal 19 Juni 2013	300.575.000,-	23/6/2013	22/10/2013
19	Kajian Optimalisasi Pengelolaan Pesisir Laut	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Konsultansi Lingkungan	Kota Cirebon	Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 16 Cirebon	027/294-KPLH/2013 Tanggal 23 Juni 2013	167.025.000,-	23/6/2013	20/10/2013
20	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pengelolaan Limbah Batu Bara secara Terpadu di Wilayah Purwasuka Jawa Barat	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Konsultansi Lingkungan	Purwasuka Jawa Barat	BPLHD Provinsi Jawa Barat	Jl. Naripan No. 25 Bandung	24/SPK/FS - BTBR/TTG/2013 Tanggal 25 Juni 2013	163.400.000,-	25/6/2013	22/11/2013
21	Kajian Dampak Pembangunan BIJB dan Pemanfaatan Pembangunan Waduk Jatigede terhadap Kebijakan Sektor Pertanian Tanaman Pangan	Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan/Sub Bidang/Sub Bidang Prasarana dan Pengembangan	Kabupaten Majalengka	Bappeda Kabupaten Majalengka	Jl. Siti Armilah No. 6 Majalengka	020/442-Ekon/ Bappeda Tanggal 26 Juni 2013	244.000.000,-	26/6/2013	26/11/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Survey Jalur Transmisi 150 KV Gl. Besar Gl. Nongsa	Bidang Elektrikal/Jasa Survey	Batam	PT. PLN Batam	Jl. Engku Putri No. 03 Batam Center	288.SPK/061/MDLURSI/2013 Tanggal 26 Juni 2013	95.000.000,-	26/6/2013	25/8/2013
23	Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan	Bidang Telematika	Karawang	Pemerintah Kabupaten Karawang Badan Perencanaan Daerah	Jl. Jendral A. Yani (By Pass) Karawang Telp (0267) 429833, 429835	027/18/SP/BAP/JALAN/VI/2013 Tanggal 30 Juni 2013	192.280.000,-	30/06/2013	27/09/2013
24	Inventarisasi dan Pendataan Potensi Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka (Komoditi, Kelompok, Asosiasi, Aneka Usaha, dan Profil Wilayah)	Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan/Sub Bidang/Sub Bidang Kehutanan	Kabupaten Majalengka	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka	Jl. K.H Abdul Halim No. 109 Majalengka	027/422/Sekr/2013 Tanggal 1 Juli 2013	49.350.000,-	1/7/2013	24/8/2013
25	Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandung	Bidang Sipil/ Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain dan Desain Engineering	Bandung	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandung	Jl. Rumah Sakit No. 197 Gedebage Bandung	SPK-06/WBC.08/KPP.04/PKK-PJB/ 2013 Tanggal 1 Juli 2013	33.100.000,-	1/07/2013	01/10/2013
26	Identifikasi dan Penyusunan PJM Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	Bidang Tata Lingkungan	Kabupaten Belitung Timur	PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Bangka Belitung	Jl. RE. Martadinata No. 35 Pangkalpinang	68.b/KPBJ/PKPD.BB/VII/2013 Tanggal 09 Juli 2013	247.000.000,-	09/07/2013	06/10/2013
27	Penyusunan Studi Kelayakan dan Detail Engineering Design Terminal Rajagaluh Kabupaten Majalengka	Bidang Sipil/ Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain dan Desain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Kabupaten Majalengka	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka	Jl. Pangeran Muhammad Km. 5 Simpeureum – Majalengka	Dishub/551.22/399-2013 Tanggal 7 Juli 2013	319.330.000,-	7/7/2013	3/11/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Identifikasi dan Penyusunan PJM Pengembangan kawasan Permukiman Perdesaan Lokasi Kabupaten Belitim	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Kabupaten Belitung Timur	Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Bangka Belitung	Jl. RE Martadinata No. 35 Pangkalpinang	68.b/KPBJ/PKPD.BB/VII/2013 Tanggal 9 Juli 2013	247.000.000,-	9/7/2013	6/10/2013
29	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Cikalong Kulon	Bidang Tata Lingkungan/Perencanaan Urban	Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur	Pemerintah Kabupaten Cianjur Dinas Cipta Karya	Jl. Prof. Moch. Yamin Nomor 131 telepon 0263-264010 Cianjur 43213	602.1/1620-SPPJK/DKC Tanggal 10 Juli 2013	326.260.000,-	10/07/2013	27/09/2013
30	Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi	Bidang Tata Lingkungan	Kabupaten Sukabumi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi	Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu	027/04.KPA-RTRW/2013 Tanggal 18 Juli 2013	279.730.000,-	18/07/2013	15/12/2013
31	Pendataan dan Visualisasi Usaha Kecil dan Menengah	Bidang Telematika	Kabupaten Majalengka	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jl. Babakan No. 422 Majalengka	518/241/Diskop.UKM Tanggal 16 Juli 2013	237.970.000,-	16/7/2013	16/9/2013
32	Pekerjaan Pembinaan KPPABD Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman berbasis Masyarakat	Bidang Sipil/ Sub BidangPra-Disain dan Disain Engineering Bangunan	40 Desa di Kabupaten Bandung	Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan	Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang	690/19/01/SPPP/KPPABD/PR/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013	197.202.500,-	23/7/2013	20/10/2013
33	Supervisi Peningkatan Jalan Kereta Api Penggantian Rel R.42 dengan Rel R.54 bantalan Beton KM 187+550 s.d KM 196+630 antara Tanjung-babakan Lintas Semarang-Cirebon (Paket K-13-2)	Bidang Transportasi/Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi	Tanjung-Babakan Lintas Semarang-Cirebon (Lintas Utara Jawa)	Departemen Perhubungan Dirjend Perkeretaapian Satker Peningkatan Jalan KA. Lintas Utara Jawa	Jl. Tentara Pelajar No. 7 Cirebon	SPP-16/K.03/K-13-2/PLU/VII/2013 Tanggal 23 Juli 2013	161.059.200,-	31/7/2013	27/11/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Komponen Turbin Generator Pilot Plant PLTP Binary Cycle	Bidang Tata Lingkungan	Jakarta	KPA Satker Deputi Bidang TIEM BPPT -	Jl. MH Thamrin No.8 Jakarta	4.4/F/KONTRAK/PKISP/TIEM/BPPT/VJI/2013 Tanggal 21 Juli 2013	94.001.000,-	31/7/2013	27/12/2013
35	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) SP.3 Muara Baleti - Pusat Pemerintahan - Batas Kota Lubuklinggau	Bidang Tata Lingkungan	Lubuklinggau	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	Jln Pembangunan Komplek Pemkab Musi Rawas Teip. (0733)-451325 Taba Pingin Lubuklinggau	/ SPPBJ I PUCK-TR /2013 Tanggal 31 Juli 2013	286.000.000,-	31/7/2013	27/12/2013
36	Kegiatan Penyusunan dan Pengaturan Zonasi Kota Prabumulih	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Prabumulih	Pemerintah Kota Prabumulih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Jl. Jenderal Sudirman KM 14 Pangkul Prabumulih 31113	O2/PPZ/BAPPEDA/2013 Tanggal 6 Agustus 2013	259.000.000,-	06/08/2013	06/12/2013
37	Pekerjaan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Cianjur Tahun 2013 dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Bidang Jasa Analisis Engineering/Sub Bidang Jasa Komposisi, Kemurnian dan Analisis	Kabupaten Cianjur	Kantor Analisis Dampak Lingkungan Kabupaten Cianjur	Jl. Raya Bandung KM.4 Cianjur	660.01/01/KPBJ-SLHD/Andal/2013 Tanggal 07 Agustus 2013	184.360.000,-	7/8/2013	4/12/2013
38	Penyusunan Survey, Investigasi dan Disain (SID) Percetakan Sawah	Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan/Sub Bidang Perdes Lainnya	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung	Jl. Jend Achmad Yani No. 90 Tanjungpandan	15/SPPP/PA-SID/DPK/2013 Tanggal 28 Agustus 2013	321.707.650,-	28/8/2013	26/11/2013
39	Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kecamatan Cipaku	Bidang Jasa Survey/Telematika	Kecamatan Cipaku Ciamis	Pemerintah Kab. Ciamis Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup	Jl. Baru Komplek Perkantoran Pemda Kertasari No. 18 Tlp. (0265) 773998 Ciamis	602/612/DPELH/2013 Tanggal 17 September 2013	78.500.000,-	17/09/2013	17/12/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Pembuatan DED dan Perencanaan Jembatan Jalan Lingkar Manggar	Bidang Sipil/ Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain dan Desain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Lingkar Manggar Kabupaten Belitung Timur	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Komplek Perkantoran Terpadu, Manggar Kabupaten Belitung Timur	02/KPLK/BM-KONSULT/DPU/ 2013 Tgl 10 Oktober 2013	240.000.000,-	10/10/2013	10/12/2013
41	Pengawasan Pemeliharaan Jaringan Listrik RS. Mata Cicendo Bandung	Bidang Sipil/ Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain dan Desain Engineering	Bandung	Depkes RI Dirjen Bina Pelayanan Medik RS Mata Cicendo Bandung	Jl. Cicendo No. 4 Bandung	PL.00.07.5-1.6010 Tanggal 24 Oktober 2013	17.000.000,-	24/10/2013	24/12/2013
42	Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rancang Kapling TSM	Bidang Tata Lingkungan	Pal Tujuh (Kim Lagita) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	Depnakertrans RI Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jl. RE. Martadinata No. 35 Pangkalpinang	SP. 55/P4Trans-PTPP-PPK/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013	87.007.800,-	28/10/2013	26/12/2013
43	Pengawasan Pembuatan Jalan Pilot Plant Pengolahan Mineral Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	Sipil/ Pengawasan	Kabupaten Bandung	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara	Jl. Jend. Sudirman No. 623 Bandung	86C/91.01/III/06/P2K-PJTMB/2013 Tanggal 05 Sept 2013	22.000.000,-	05/09/2013	05/10/2013
44	Perencanaan Pembangunan Generator Set 150 KVA RSU Pantura MA Sentot, Kegiatan Pengembangan RSU Pantura MA Sentot Indramayu.	Sipil/ Perencanaan	Kabupaten Indramayu	Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan RSU Pantura MA Sentot	Jl. Ngurah Nara No. 7 Indramayu	011/SPK/APBD II/RSU-Pantura/Konst/ Genset/X/2013	24.500.000,-	10/10/2013	10/11/2013
45	Review DED TPA Nambo Kabupaten Bogor (Paet SN-01)	Tata Lingkungan	Kabupaten Bogor	Kegiatan Pengelolaan Sampah di TPA Nambo Distarkim Jawa Barat	Jl. Kawalayaan Indah No, 4 Bandung	602.1/26/PPSN/V/2013 Tgl 23 Juni 2013	245.259.000,-	23/06/2013	23/10/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Penelitian Potensi dan Optimalisasi Sumber Daya Air di Powonsari Balonrejo	Sipil/Keairan	Balonrejo	Pejabat Pembuat komitmen Satker Pusat Litbang Sumber Daya Air	Jl. H. Juanda No. 193 Bandung	KU.08/P-07 JK/SPK/La-Satker/2013/31 Tgl. 12 Sept 2013	158.647.000,-	12/09/2013	11/11/2013
47	Pengawasan Pembangunan Gedung Pengembangan Desain Furniture Kayu dan Rotan Kab. Cirebon	Sipil/Pengawasan	Kab. Cirebon	Diperindag Jawa Barat	Jl. Asia Afrika No. 146 Bandung	912/15/SPPP/Pws-UPT-CRB/Bapperin/KRG-02.03/VI/2013	34.533.000,-	9/VI/2013	9/VI/2013
48	Kajian Geologi pada Kegiatan Pembuatan Dam Pengendali	Pertanian dan Perdesaan	Kab. Bogor	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor	Jl. Bersih Cibinong Bogor	027.1/577-PBJ,SD	48.840.000,-	12/03/2013	6/04/2013
49	Penelitian Kandungan (Residu) Pestisida Terhadap Produk Pertanian	Pertanian dan Perdesaan	Karawang	Bappeda Kabupaten Karawang	Jl. A. Yani (Bypass) Karawang	027/19/SPK/BAP/RESIDU/VIII/2013 Tgl. 8 Agustus 2013	189.530.000,-	8/08/2013	5/11/2013
50	Revisi RDTRK Soreang dan Zoning Regulator Kota Soreang	Perencanaan Urban	Kec. Soreang Kab. Bandung	Dinas PERTASIH	Jl. Raya Soareang Km. 17 Soreang Bandung	602.3/624.B/KRK/BPRR/RDTRK/VII/2013 Tgl. 15 Juli 2013	350.515.000,-	15/VII/2013	12/11/2013
51	Pengawasan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di 2 Desa Kec. Gununghalu, 8 Desa Kec. Sindangkerta dan 2 Desa di Kec. Rongga Kabupaten Bandung Barat	Sipil/Pengawasan	Kabupaten Bandung Barat	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Cihaliwung No. 39 Padalarang	601.3/50/KRK/CK/X/2013 Tgl. 15 Okt 2013	20.853.000,-	15/10/2013	15/12/2013
52	Perencanaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (Pengeboran Air Artesis di Kecamatan Batujajar)	Sipil/Jasa Enjiniring	Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Cihaliwung No. 39 Padalarang	601.3/27/KRK/DPU/2013 Tgl. 6 Juni 2013	30.048.000,-	6/06/2013	6/07/2013
53	Penyediaan Data Base Karakteristik SDA dan Agro Ekologi Zone (AEZ) dengan Teknologi Geographic Information System	Telematika	Kabupaten Lebong	Bappeda Kab. Lebong	Jl. Raya Tubei (Komplek Perkantoran) – Tubei	050/280B/SPK/Bappeda/2013 Tgl. 29 Okt 2013	330.880.000,-	29/10/2013	28/12/2013
54	Rancang Kavling Integrated Area Transmigrasi Bukit Anda	Arsitektur	Kab. Bangka Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Komp. Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Selatan	03/SPKJK/DISNAKER/KT M/APBD/2013 Tgl. 09 Okt 2013	43.340.000,-	10/10/2013	10/12/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Pengawasan Teknis Jasa Konsultan Pengawas	Sipil/ Pengawasan	Kabupaten Lingga	Pemerintah Kabupaten Lingga Kabag Umum dan Perlengkapan SETDA	Jl. Datuk Laksamana Telp. 0776-322300 Daik Lingga	02/PL-KONS/SPPP=SETDA\PTJ KP/2013 Tgl. 12 Nop 2013	34.700.000,-	12/11/2013	30/12/2013
56	Supervisi/Pengawawsan Konstruksi Kawasan Rumah Susun	Sipil/ Pengawasan	Rusunawa Menteng Kota Bogor, Rusunawa Cilangkap Kota Depok dan Rusunawa Cigugur Tengah Kota Cimahi	PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, Satker Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat	Jl. Kawalayaan Indah No. 4 Bandung	KU.08.08-PKPJB-PP/PL-07 Tgl. 22 Mei 2013	49.170.000,-	22/05/2013	22/06/2013
57	Identifikasi Kerusakan Situ di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok	Tata Lingkungan/ Jasa Konsultasi Lingkungan	Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok	KLHidup RI, Satker Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jl. DI Panjaitan, Kebon Nanas Jakarta 13410	K-294/PK/Dep.III/LH/08/2013 Tgl. 12 Agust 2013	49.000.000,-	12/08/2013	12/11/2013
58	Pengawasan Pembangunan Gedung (Pemasangan Selasar Canopy dan Pembuatan Tempat Duduk Mahasiswa)	Sipil/ Pengawasan	Bandung	Dinas Pendidikan Nasional, Politeknik Negeri Bandung	Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Kotak Pos 1234 Bandung 40012	151.4/K8R2/LL/2013 Tgl. 22 April 2013	12.960.000,-	22/04/2013	22/05/2013
59	Penyusunan DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Situ Panjalu Kabupaten Ciamis	Sipil/ Perencanaan	Kabupaten Ciamis	DPU, Dirjen Cipta Karya Satker Penataan dan Revitalisasi Kawasan	Jl. Kawalayaan Indah No. 4 Bandung	KU.08.08/SPK/PRK-JBR/CK/V/29/2013 Tgl. 30 Mei 2013	98.736.000,-	30/05/2013	27/08/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Citepus – Karanghau Kabupaten Sukabumi	Tata Lingkungan/ Perencanaan Urban	Citepus-Karanghau Kab. Sukabumi	Badan Lingkungan Hidup	Jl. Raya Cisolok Km.10 Cisolok Palabuhanratu	027/08-PJPK/RTBL.CTKH/2013 Tgl. 14 Juli 2013	99.625.000,-	14/07/2013	12/10/2013
61	Penyusunan Masterplan Konservasi Sumber Daya Air di Wilayah Kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat	Kehutanan	CA/TWA Kawah Kamojang, TWA Gunung Guntur dan TWA Tampomas (Jawa Barat)	PPK DIPA 69 Tahun 2013 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat	Jl. Gedebage Selatan No. 117 Rancabolang Bandung	PK.2189.1/BBKSDA JABAR/DIPA 69/2013 Tgl. 5 Des 2013	192.332.900	05/12/2013	26/12/2013
62	Penyusunan Rapergub Kawasan Lindung, Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pengelolaan Kawasan Lindung.	Kehutanan	Jawa Barat	KPA Fasilitas Peningkatan Pengelolaan Kawasan Lindung	Jl. Naripan No. 25 Bandung	018/SPK/PGKLI/2013 Tgl. 3 September 2013	78.498.750	03/09/2013	03/12/2013
63	Penyusunan Buku-buku Persyaratan Administratif Pembentukan BLUD di Kota Tangerang, Kegiatan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah APBD Kota Tangerang TA. 2013	Batuan Teknis	Kota Tangerang	PPK Dinas Perindagkopar Kota Tangerang	Gedung Pusat Pemerintahan Lantai III, Jl. Sudirman No.1 Tangerang	027/450-Perindagkopar/08 Tgl. 7 April 2013	94.000.000	07/04/2013	29/07/2013
64	Pembuatan AMDAL Pelabuhan Kubang Sari Kota Cilegon, Kegiatan Pembuatan AMDAL Pelabuhan Kubang Sari Kota Cilegon, APBD Kota Cilegon TA. 2013	Tata Lingkungan/ Jasa Konsultasi Lingkugnan	Kota Cilegon	Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kota Cilegon	Jl. Akses Tol Cilegon Timur No. 2 Cilegon	550/379a/DISHUB Tgl. 29 Juli 2013	275.400.000	29/07/2013	25/12/2013
65	Feasibility Study Pelabuhan Kubang Sari Bidang Sektor Ekonomi APBD Kota Cilegon TA. 2013	Bantuan Teknis/ Keuangan	Kota Cilegon	Pengguna Anggaran Bapeda Kota Cilegon	Jl. Buyut Arman No. 1 Citangkil Cilegon	027/SU-22/PA-FSKBSE/2013 Tgl. 04 April 2013	183.865.000	04/04/2013	04/07/2013
67	Kajian Profil Investasi dan Strategi Menarik Investor Bidang Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, APBD TA. 2013	Bantuan Teknis/ Kajian	Propinsi Banten	Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kec. Curug, Serang	902/DKP/2013 Tgl. 28 April 2013	170.150.000	28/04/2013	24/09/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) SP, 3 Muara Beliti – Pusat Pemerintahan – Batas Kota Lubuklinggau TA, 2013	Tata Lingkungan/ Jasa Perencanaan Urban	Kota Lubuklinggau Kabupaten Musi Rawas	Pengguna Anggaran Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas	Jl. Pembangunan Komplek Pemkab Musi Rawas	.../SPPBJ/PUCK-TR/2013 Tgl. 31 Juli 2013	286.000.000	31/07/2013	27/12/2013
69	Pengadaan Jasa Asesmen Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor	Manajemen/ Kelembagaan	Kecamatan Cibinong	Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor	Jl. Tegar Beriman Komplek Perkantoran Pemda Cibinong	800/256-Kepeg, Tgl. 13 Nopember 2013	394.000.000	04/12/2013	04/12/2013
70	Penataan RTH	Tata Lingkungan/ Jasa Perencanaan Urban	Pasir Impun Bandung	DINAS PERTAMANAN	Jalan Ambon No. 1 A Telepon (022) 4231921 Bandung	O50/ 137 F - distam/2013 Tgl 29 Oktober 2013	49.467.000	14/12/2013	14/12/2013
71	Kegiatan : 1. Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit 2. Pengembangan Ruang Operasi 3. Rehab. Bangunan Rumah Sakit 4. Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU	Sipil/ Perencanaan	Kabupaten Garut	Badan Pengelola RSU dr. Slamet Kabupaten Garut	Jl. Rumah Sakit No. 12 Garut	15/KPA/Pemb.RS/BP.RSU /V/2013 Tgl. 30 Mei 2013	102.796.926	30/05/2013	13/07/2013
72	Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Manajemen DAK) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Manajemen DAK)	Sipil/ Pengawasan	Kabupaten Garut	Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	Jl. Pembangunan No. 179 Garut	602.02/06/Pws.P1/PKPA. M-DAK/Disdik/IX/2013 Tgl. 03 September 2013	50.035.000	03/09/2013	01/12/2013
73	Pembuatan FD Kawasan Wisata Pantai Rancabuaya Desa Purbayani Kec. Caringin Kabupaten Garut	Sipil/ Perencanaan	Kabupaten Garut	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut	Jl. Ciledug No. 120 Garut	602.1/26/Kont/Prc-FD-Rcb/ KPA/PPDTW/ VII/ Disparbud/2013 Tgl. 18 Juli 2013	99.400.000	18/07/2013	15/09/2013
74	Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor BPP Kabupaten Garut	Sipil/ Pengawasan	Kabupaten Garut	Kantor Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jl. Otto Iskandardinata No. 278 Garut	21/XII/FEATI/KONS/KPSD MP-KP/2013 Tgl. 26 Maret 2013	55.300.000	26/03/2013	25/04/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Perencanaan Pembangunan BPP Baru untuk 4 (empat) lokasi dan Perencanaan Bangunan Lumbung Pangan Masyarakat untuk 20 (dua puluh) lokasi, Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.	Sipil/Perencanaan	Kabupaten Garut	Kantor Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jl. Otto Iskandardinata No. 278 Garut	602.2\SPPP.04/Prc/KPSD MP-KP/2013 Tgl. 10 Maret 2013	49.000.000	10/03/2013	10/04/2013
TAHUN 2017									
1	Gedung Kantor Lantai 3 Kejaksaan Negeri Garut	Bidang Arsitek/Sub Bidang Arsitektur Lainnya	Kab. Garut	Kejaksanaan Negeri Garut	Jl. Jend Ahmad Yani No. 23 Garut	013/PWS/SPPP-PPK/0.216/Cu.2/03/ 2017, Tanggal 9 Maret 2017	55.000.000,-	9/3/2017	12/6/ 2017
2	Pembuatan Peta Digitasi Geologi Teknik	Bidang Pertambangan dan Energi	Kota Bandung	Kantor Pusat Lingkungan Geologi	Jl. Diponegoro No. 57 Bandung	04/P2K/SPK/PDGT/91/III/2017 tanggal 19 Maret 2017	41.470.000,-	19/3/2017	5/6/2017
3	SID Jaringan Irigasi D.I Tanah Bawah & Terap Bakam	Bidang Sipil/Sub Bidang Sipil Keairan	Kepulauan Bangka Belitung	DPU DirJen SDA	Jl. Jendral Sudirman No. 8 Pangkal Pinang	12/PKK/IRAB_BB/ 2017 tanggal 23 Maret 2017	95.950.000,-	23/3/2017	18/6/2017
4	Perencanaan pada Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Bidang Kepariwisata/Sub Bidang Penyiapan dan Impelementasi Proyek Wisata	Kab. Garut	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Garut	Jl. Ciledug No.120 Garut	05/SPPP/KPA.Keg.PPSD PP-VII/ Disparbud/Banprop/IV/07, tanggal 1 April 2017	24.163.000,-	1/4/2017	10/5/2017
5	Perencanaan Pembangunan (3RKB) SLB Negeri Bekasi, Sumedang, Indramayu, Subang	Bidang Arsitek/Sub Bidang Arsitektur Lainnya	Propinsi Jawa Barat	Dinas Pendidikan	Jl Dr. Rajiman No. 6 Telp (022) 4264813, Fak (022) 4264881	393/KPSP-SLB/ Kontrak/IV/2017, tanggal 5 April 2017	52.800.000,-	5/4/2017	12/6/2017

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Perencanaan dan Pemasangan Rambu Kasuar Pelabuhan 1 Unit di Jagoh Propinsi Kep. Riau	Bidang Sipil/Sub Bidang Pra-Disain dan Disain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jangoh Kep. Riau	Dinas Pehubungan Propinsi Kep. Riau	Jl. DI. Panjaitan Kom-plek Bintan Centre Blok G No.14 Tanjungpinang	002/SPPP/DISHUB/IV/2017, tanggal 5 April 2017	24.007.000,-	5/4/2017	5/7/2017
7	Perencanaan Teknis Fisik : 1. Penataan TPA Penembong 2. Pembangunan dan Rehabilitasi TPS 3. Rehabilitasi Bangunan & tugu Batas Kabupaten 4. Rehabilitasi Bangunan Taman Kota	Bidang Sipil/Sub Bidang Pra-Disain dan Disain Engineering Bangunan	Subang	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Subang	Jl. K.S.Tumbun No.16 Subang (0260) 411106	01/640/Dis PU-KP/DAU/KKLJK/ 2017 tanggal 10 April 2017	57.500.000,-	10/4/2017	11/5/2017
8	Perencanaan Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut TA 2017	Bidang Kepariwisata/Sub Bidang Penyiapan dan Impelementasi Proyek Wisata	Kabupaten Garut	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut	Jl. Ciledug No. 120 Garut	05/SPPP/KPA.Keg. POPU BGD.CI/Disparbud/ IV/2017 tanggal 11 April 2017	35.541.000,-	11/4/2017	10/5/2017
9	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Cikaso	Bidang Sipil/Sub Bidang Pra-Disain dan Disain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Kab. Sukabumi	Dinas Bina Marga Kab. Sukabumi	Jl. Pasangrahan No. 3 Desa Baniwangi Kec. Pelabuhanratu	602.1/SP/PjPK/PT/APBD/ BM/IV/2017, tanggal 20 April 2017	83.100.000,-	20/4/2017	20/6/2017
10	Penyusunan DED dan Pengembangan Ekowisata Mangrove Kota Langsa	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Konsultansi Lingkungan	Kota Langsa Aceh Tengah	BRR Pemberdayaan Ekonomi & Pengembangan Usaha Wilayah III Kab Aceh Tengah	Jl. Tekengon-Bireun Km.2 Paya Tumpi Takengon Aceh Tengah	128/SPK-K/ 888941/VII/2017, tanggal 20 April 2017	332.530.000,-	20/4/2017	13/12/2017

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Perencanaan Rehabilitasi Lantai Asrama Praja di Kampus IPDN	Bidang Sipil/Sub Bidang Pra-Disain dan Disain Engineering Bangunan	Kabupaten Sumedang	Institut Pemerintah Dalam Negeri	Jl. Raya Jatinangor KM 20 Telp (022) 7798252-7798253	011/94.2/Bek/SPJ/IV/2017, tanggal 20 April 2017	83.184.000,-	20/4/2017	6/6/2017
12	Pembuatan CD Interaktif Kesenian Unggulan Wayang Golek	Bidang Kepariwisata/Sub Bidang Penyiapan dan Impelementasi Proyek Wisata	Kota Bandung	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Jl. L.L. RE. Martadinata No.299 Bandung	910/Kep.76-Dalprog 2017, tanggal 3 Mei 2017	73.500.000,-	3/5/2017	12/7/2017
13	Rancangan DED Lab. Apotek	Bidang Sipil/Sub Bidang Pra-Disain dan Disain Engineering Bangunan	DKI Jakarta	Dirjen Pengembangan Penelitian Jkt	DKI Jakarta	322/N/211.1432/ 2017, tanggal 5 Mei 2017	98.000.000,-	5/5/2017	5/5/2017
14	Pembangunan Gedung (Rumah Dinas) untuk Pejabat Eselon IV sebanyak 3 Unit dan Eselon III sebanyak 1 Unit	Bidang Sipil/Sub Bidang Pra-Disain dan Disain Engineering Bangunan	Bandung	Depinfo Dirjen Pos Dan Telekomuni-kasi Bandung	Jl. Purbasari No. 1 Arcamanik Bandung	KU.003/14.11/ Balmon.Bdg/V/2017, tanggal 15 Mei 2017	16.000.000,-	15/5/2017	14/8/2017
15	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Kab. Cianjur	Bidang Telematika/Sub Bidang Telematika Lainnya	Kabupaten Cianjur	Sekretariat Daerah	Jl. Siti Jenab No. 31 Tlp (0263) 261892	31/SPK-UM/V/2017 tanggal 21 Mei 2017	134.540.000,-	21/5/2017	21/8/2017
16	Pembuatan Bangunan Peralatan Pilot Plant Pemanfaatan Batubara, Keg. Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana & Prasarana Sub kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Bidang Pertambangan dan Energi/Sub Bidang Pertambangan dan Energi Lainnya	Bandung	Dep. Energi dan Mineral Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	Jl. Jenderal Sudirman No. 623 Bandung	28/91.07/III/06/P2K-P3TMB/2017, tanggal 25 Mei 2017	22.729.850,-	25/5/2017	20/8/2017

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Sosialisasi Permendagri No. 24 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Kajian Re-vitalisasi Pola Pelayanan Pada Unit Pelayanan Satu atap	Bidang Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik	Kota Bandung	Pemkot Bandung Unit Pelayanan Satu Atap	Jl. Cianjur No. 34 Bandung	027/234/SPK/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	74.580.000,-	31/5/2017	29/6/2017
18	Perencanaan (Feasibility Study) Overpass Padasuka	Bidang Sipil/ Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain dan Desain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Bandung	Dinas Tata Kota Bidang Bina Marga	Kompek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jl. Rd Demang Harjakusumah Gedung C Lantai 2 Cimahi	621/10/KPA.FS/BM-Distakot/2017 tanggal 31 Mei 2017	93.376.000,-	4/6/2017	1/9/2017
19	Pembangunan Jalan Lingkungan PSU, Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Sub kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	Bidang Sipil/ Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra Desain dan Desain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Bandung	Departemen Energi dan Mineral Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	Jl. Jenderal Sudirman No. 623 Bandung	28A/91.07/III/06/P2K-P3TMB/2017, tanggal 5 Juni 2017	30.864.350,-	5/6/2017	5/9/2017
20	Pembuatan Software Otomatisasi Akses Data PPPTGMB "LEMIGAS"	Bidang Telematika	LEMIGAS Jakarta	Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas"	Jl. Rasuna Syaid No. 16 Jkt	14.Perj/94/RT JKN/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017	149.226.000,-	5/6/2017	6/10/2017
21	Survey Dan Analisis Potensi Bio-Energi	Bidang Jasa Survey	Propinsi Jawa Barat	Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat	Jl. Soekarno Hatta No. 576 Bandung	21.01/Kep/05-TTG/Bailit/2017, tanggal 15 Juni 2017	119.945.000,-	15/6/2017	12/9/2017
22	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Suar Single Pipe 8 Unit di Sedanau	Bidang Sipil/Sub Bidang Pra-Disain dan Disain Engineering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Kepulauan Riau	Dinas Perhubungan Kep. Riau	Jl. DI. Panjaitan Komplek Bintang Centre Blok G No. 14 Tanjungpinang	042/SPPP/HUBPOSTEL/V/2017, tanggal 19 Juni 2017	42.900.000.-	19/6/2017	14/9/2017

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Jawa Barat	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung	602/34/SPPP/Keg-PERANSERTA/TRK/2017 tanggal 21 Juni 2017	179.018.000,-	21/6/2017	19/11/2017
24	Penyusunan Profil Subang	Bidang Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik	Subang	Bapeda Subang	Jl. Dewi Sartika No. 2 Subang	999.42/088/KK-PPD/BAP/2017, tanggal 22 Juni 2017	89.487.000,-	22/6/2017	18/9/2017
25	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Konsultansi Lingkungan	Sukabumi	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi	Jl. Raya Cisolok Km. 10 Palabuhanratu Sukabumi	027/03-SLHD/BLH/ 2017, tanggal 28 Juni 2017	49.750.000,-	28/6/2017	25/9/2017
26	Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Permukiman Baros - Cigugur	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Cimahi	Dinas Tata Kota Cimahi	Jl. Demang Hardja-kusumah Blok Jati Gd. C Lt. II Cimahi	17/SPJK/RTRK-pmlm/PETARU/2017 tanggal 28 Juni 2017	97.009.000,-	28/6/2017	23/10/2017
27	Penyusunan Data Informasi dan Pengembangan Teknologi Lingkungan	Bidang Telematika	Jawa Barat	BPLHD Propinsi Jawa Barat	Jl. Naripan No. 25 Bandung	31/SPK/DIPL/PSDAL/2017, tanggal 29 Juni 2017	72.874.000,-	29/6/2017	26/9/2017
28	Penyusunan Buku Pengembangan Data & Informasi Lingkungan	Bidang Jasa Analisis Engineering/Sub Bidang Jasa Komposisi, Kemurnian dan Analisis	Kabupaten Subang	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	Jl. Dewi Sartika No. 2 Subang	01/SPJK-SoER/BPLH/2017 tanggal 29 Juni 2017	91.564.000,-	29/6/2017	17/9/2017
29	Studi Kelayakan Potensi Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	Bidang Pertambangan dan Energi	Kabupaten Garut	BAPPEDA Kabupaten Garut	Jl. Patriot No.8 Garut	05/KPA-PLTMH/Bappeda/2017, tanggal 29 Juni 2017	167.955.000,-	29/6/2017	27/10/2017

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kegiatan Penataan Sistem Kesehatan	Bidang Telematika	Kota Bandung	Dinas Kesehatan Kota Bandung	Jl. Supratman NO. 73 Telp. (022) 4203752	602/24-PPK.Simbada/VI/07, tanggal 30 Juni 2017	73.993.700,-	30/6/2017	26/9/2017
31	Penyusunan Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL) Kawasan Olah Raga Purnawarman	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta	Jl. Purnawarman Timur 11 A. Purwakarta	05.3/SPPP/II/2017 tanggal 4 Juli 2017	115.445.000,-	4/7/2013	1/11/2017
32	Penyusunan Masterplan Obyek Wisata Kedah Kabupaten Gayo Lues	Bidang Pariwisata/Sub Bidang Penyiapan dan Impelementasi Proyek Wisata	Kabupaten Gayo Lues	BRR Pemberdayaan Ekonomi & Pengembangan Usaha Wilayah II Kab. Aceh Tengah	Jl. Tekengon - Bireun Km.2 Paya Tumpi Te-kengon Aceh Tengah	129/SPK-K/888941/II/2017, tanggal 20 Juli 2017	97.999.550,-	20/7/2017	17/9/2017
33	Pembuatan Maket Kabupaten Sukabumi	Bidang Arsitek	Sukabumi	Dinas Tata Ruang Kota Sukabumi	Jl. Siliwangi No. 59 Sukabumi	050/PJ.PK/MPM/VI/07, tanggal 24 Juli 2017	24.500.000,-	24/7/2017	23/10/2017
34	Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Kota Bandung	Departemen Pekerjaan Umum	Jl. Kawalayaan Indah No. 4 Bandung	KU.08.08-PTBG-JB.09/PL-06, tanggal 27 Juli 2017	49.081.000,-	27/7/2017	22/10/2017
35	Bantuan Teknis (BANTEK) Penyehatan PDAM Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	Bidang Sipil/ Sub Bidang Teknik Sipil Keairan	Propinsi Sumatera Selatan	Proyek PDAM Kabupaten OKI	Jl. Rambutan Ujung No.309 Ilir Palembang	05/PKK.SU/PPKAM-SS/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017	189.350.000,-	2/8/2017	29/11/2017
36	Identifikasi Potensi Irigasi Air Bawah Tanah Disekitar Waduk Jatigede	Bidang Sipil/ Sub Bidang Teknik Sipil Keairan	Propinsi Jawa Barat	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Jl. Braga No. 137 Telp. (022) 4210756	600/208/OP/2017 tanggal 3 Agustus 2017	98.500.000,-	3/8/2017	30/11/2017
37	Pembuatan SOTK dan Persiapan Rekrutmen Direksi	Bidang Pendidikan	Tangerang	BKPMD Kabupaten Tangerang	Jl. Gedung Lingkup PU Lt. 3 Pemda Tiga Raksa	37/K/PPTK-BKPMD/VI/2017, tanggal 8 Agust 2017	184.000.000,-	8/8/2017	8/11/2017
38	Pekerjaan Penyusunan Road Map Pembangunan Tanaman Pangan	Bidang Pertanian dan Perdesaan/Sub Bidang Tanaman Pangan	Kota Cimahi	Dinas Perekonomian dan Koperasi Pemkot Cimahi	Jl. Raden Demang Hardjakusumah Cimahi Telp (022) 6631816	027/1456.A/Perekop/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017	48.950.000,-	9/8/2017	9/11/2017

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Penyusunan Grand Design Sistem Informasi Penanaman	Bidang Telematika	Kabupaten Majalengka	Dinas Koperasi, UKM, dan Penanaman Kab. Majalengka	Jl. Babakan No. 422 Telp/Fak (0233) 281536 Majalengka	518/200/Diskop.UKM PM, tanggal 20 Agust 2017	250.000.000,-	20/8/2017	19/10/2017
40	Bantek Penyehatan PDAM	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Konsultansi Lingkungan	Prop Sumsel	PDAM	Jl. Sudirman Km. 105	044/SPK/PDAM/06/ 2017	196.000.000,-	10/9/2017	10/9/2017
41	Penyusunan Pedoman Pengukuran Kinerja BUMD Propinsi Jawa Barat	Bidang Jasa Bantuan Teknik	Propinsi Jawa Barat	Sekretariat Daerah	Jl. Diponogoro No.22 Bandung	06/SPK.KPA/PK-BUMD/Sarek/ 2017, tanggal 5 Sept 2017	148.133.000,-	5/9/2017	4/12/2017
42	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireun	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Kab.Bener Meriah, Bireun	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	Jl. Sp.Teritit Pondok Baru Redelong Nanggroe Aceh Darusalam	35/PAN-PBJ/06/BAPP /2017, tanggal 10 Sept 2017	192.500.000,-	10/9/2017	8/11/2017
43	Penyusunan DED Kota Tangerang Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang	Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Sipil	Banten	Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta karya	Jl. Kemang Pusri No. 34 Serang	KU.07.02/PK.PKPP/SU/S U-03/IX/2017, tanggal 12 Sept 2017	93.995.000,-	12/9/2017	11/11/2017
44	Pekerjaan Pembuatan Peta Air Bawah Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur Skala 1:100.000	Bidang Teknik Sipil/Sub Bidang Teknik Sipil keairan	Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi	Dinas Pertambangan dan Energi	Jl. Arief Rachman Hakim Telanaipura No. 30A Jambi	01/SPP-ABT/Dispertamben/ 2017 tanggal 12 September 2017	197.500.000,-	12/9/2017	11/11/2017
45	Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Bidang Pertambangan dan Energi	Bidang Pertambangan Energi	Propinsi Jawa Barat	Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat	Jl. Soekarno Hatta No. 576 Bandung	011.01/SPK/1-BP/VII/2017	169.500.000,-	14/9/2017	14/9/2017

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Penyusunan Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL) Kawasan Tanggul Boom – Mendale Kota Takengon	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Kota Takengon	BAPPEDA Kota Takengon	Jl. Pahlawan No. 737 Takengon Aceh Tengah	050/09.23/07, tanggal 26 Sept 2017	181.500.00,-	26/9/2017	21/12/2017
47	Penyusunan DED Penyediaan Air Bersih Pulau Jemaja	Bidang Sipil/ Sub Bidang Teknik Sipil Keairan	Tanjung pinang	Departemen Pekerjaan Umum	Jl. Karisma D4 Permata IV Tanjungpinang	1357.0/033-05.0/-/2017, tanggal 27 Sept 2017	49.885.000,-	27/9/2017	24/12/2017
48	Studi Kelayakan Pendirian Stasiun Oceanografy di Pulau Pongok dan Tanjung Kerasak Kabupaten Bangka Selatan	Bidang Sipil/ Sub Bidang Pra-Desain dan Desain Engineering Bangunan	Kabupaten Bangka Selatan	Badan Bappeda Kabupaten Bangka Selatan	Komplek Perkantoran Terpadu Gn. Namak-Toboali	05-JK/PA/SPMK-BAPPEDA/ APBA 2017, tanggal 28 Sept 2017	116.000.000,-	28/9/2017	27/12/2017
49	Pengadaan Design Development dan Detail Engineering Design (DED) Kampus STMB Telkom	Bidang Arsitek	Propinsi Jabar	STMB Telkom	Jl. Geger Kalong Hilir No. 47 Bandung	67/STMB Tel-09/HK-22/2017, tanggal 27 Sept 2017	190.000.000,-	27/9/2017	27/11/2017
50	Penyusunan DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Situ Panjalu Kabupaten Ciamis	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Ciamis	DPU Dirjen Cipta Karya Jawa Barat	Jln. Kawalayaan Indah No. 4 Bandung	KU.08.08/SPP.PRK.Jbr/C K/x/69/2017, tanggal 3 Okt 2017	190.000.000,-	3/10/2017	30/11/2017
51	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian Bidang Padi Palawija Dinas pertanian Kab. Majalengka	Bidang Pertanian dan Perdesaan/ Sub Bidang Tanaman Keras, Tanaman Pangan	Kabupaten Majalengka	Dinas Pertanian kab. Majalengka	Jl.Kh.Abdul Halim No. 31 Tlp. 0233-281636 Majalengka	900/740/ Distan/2017, tanggal 6 Okt 2017	49.550.000,-	6/10/2017	6/10/2017
52	Penyusunan DED Penyediaan Air Bersih Pulau Jemaja	Bidang Sipil/ Sub Bidang Teknik Sipil Keairan	Pulau Natuna	Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta karya	Jl. Karisma D4 Permata IV Tanjungpinang	45.1.4.4/KONTRAK/ P3KP/2017 tanggal 11 Oktober 2017	49.885.000,-	11/10/2017	24/11/2017

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Perencanaan Lokasi Terminal Ciawi, Cineam, Salopa dan Sukarame	Bidang Transportasi/Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi	Tasikmalaya	Bappeda Tasikmalaya	Jl. Sudirman Km. 105	119/527/Bap/2017 dan 027/MPS/X/2017, tanggal 11 Okt 2017	49.500.000,-	11/10/2017	24/12/2017
54	Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Majalengka	Bidang Transportasi/Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi	Kabupaten Majalengka	Dinas Perhubungan Kab. Majalengka	Jl. Pangeran Muhammad Km 5 Simpeureum Majalengka	SPK/Dishub/020/SPK/X/07, tanggal 22 Okt 2017	154.500.000,-	22/10/2017	18/12/2017
55	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Melalui Potensi Lokal dan Pameran di UPT Bukit Anda, Kab. Bangka Selatan	Bidang Telematika	Bangka Selatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Pulau Pongok Pangkalpinang Bangka Selatan	06/SPK/P4T/2017, tanggal 22 Okt 2017	39.500.000,-	22/10/2017	20/12/2017
56	Profil Kota Bandung sub Bidang Penyusunan situs Web Kota Bandung	Bidang Telematika	Kota Bandung	Bappeda Kota Bandung	Jl. Tamansari 57 Bandung	015/234/SPK/Bapp/V/2017	158.000.000,-	Mei 2017	27/10/2017
57	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Konsultansi Lingkungan	Kab. Sukabumi	Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kab. Sukabumi	Jl. Bhayangkara No. 195 Pelabuhanratu Sukabumi	660/004-PJPK/07, tanggal 1 Nop 2017	64.130.000,-	1/11/2017	1/12/2017
58	Zonasi Wilayah dan Energi Kabupaten Belitang Timur	Bidang Pertambangan Energi	Belitang timur	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Belitang Timur	Komp. Perkantoran Terpadu Pemkab Belitang Timur	02/KPJK/ZON.APBD/DPE/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017	149.500.000,-	2/11/2017	4/12/2017
56	Pengawasan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Bidang Arsitek	Bandung	Dinas Pendidikan	JL. Jend Ahmad Yani No. 239	055. Pws/01./ P.A-RHB/07, tanggal 9 Nop 2017	45.182.000,-	9/11/2017	20/12/2017

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Perencanaan Pembangunan Sekolah Se Jawa Barat	Bidang Pendidikan	Propinsi Jawa Barat	Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat	Propinsi Jawa Barat	145/20.1675/PEN/ 2017, tanggal 15 Nop 2017	153.000.000,-	15/11/2017	15/11/2017
61	Pembuatan DED Jalan Lingkar Warungkondang	Bidang Transportasi/Sub Bidang Pengembangan Sarana Transportasi	Kabupaten Cianjur	Dinas Bina Marga Kabupaten Cianjur	Jl. Adi Sucipta No. 2 Cianjur	620/2059/DBm Tanggal 22 Nopember 2017	99.212.300,-	22/11/2017	22/12/2017
62	Kegiatan Pengembangan PS SLB Jawa Barat	Bidang Pendidikan	Propinsi Jawa Barat	Dinas Pendidikan	Jl. Dr. Rajiman No. 6 Telp (022) 4264813	910/Kep.02-Keu/2017, tanggal 4 Des 2017	152.000.000,-	4/12/2017	4/12/2017
63	Pembangunan Migrasi Data Website dan Pembangunan Elektronik Mail Server	Bidang Telematika	Kabupaten Cirebon	SETDA Kabupaten Cirebon	Jl. Suna Kalijaga No.7 Cirebon	027.4/64-APBD-Pj,PK/2017, tanggal 18 Des 2017	81.000.000,-	18/12/2017	24/12/2017
TAHUN 2016									
1	Penyusunan Kajian Kewaspadaan Pangan dan Gizi (KPG) di Kabupaten Purwakarta	Bidang Kesehatan/Sub Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Kesehatan	Kabupaten Purwakarta	Bappeda Kabupaten Purwakarta	Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta	050/1/SPK.KPG/ 2016, tanggal 22 Maret 2016	99.800.000,-	22/3/2016	20/6/2016
2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kuningan	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Kab. Kuningan	DPU. Cipta Karya Kab. Kuningan	Kabupaten Kuningan	102.1/172-SPPP/PAN/DCK, tanggal 24 April 2016	173.052.000,-	24/4/2016	23/10/2016
3	Perencanaan Rehabilitasi Prasarana BPBPAT Cijengkol Subang	Bidang Sipil/Sub Bidang Desain Engineering Bangunan	Subang	Dinas Perikanan Bandung	Jl. Wastukencana No. 17 Bandung	602.21/1992/APBD, tanggal 2 Mei 2016	14.960.000,-	2/5/2016	31/5/2016
4	Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Fisik 1. Puskesmas Kasemen 2. Puskesmas Kilasah 3. Puskesmas Waringin Kurung	Bidang Arsitek	Kab. Serang	Dinas Kesehatan Kab. Serang	Jl. Kimas jong No 11 Telp (0254) 201526	870/738-11/TU/2016, tanggal 12 Mei 2016	32.500.000,-	12/5/2016	27/6/2016

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penyusunan DED Penataan Kawasan Cikapundung Bandung	Bidang Sipil/Sub Bidang Teknik Sipil Keairan	Bandung	Dep. Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya	Jl. Kawalayaan Indah No. 4 Bandung	KU.08.08/SPP.PRK.Jbr/CK/V/10/2016, tanggal 29 Mei 2016	49.500.000,-	29/5/2016	12/6/2016
6	System Data Base Keuangan Dispenda Kota Gorontalo	Bidang Telematika	Kota Gorontalo	Dinas Penanaman Daerah	Jln. Bonang No. 34 Kota Gorontalo	769/29-APM-PPK/KPMD/2016	178.540.000,-	14/6/2016	14/6/2016
7	Perencanaan dan Kolam Ikan Gedung Pakuan	Bidang Sipil/Sub Bidang Desain Engineering Bangunan	Propinsi Jawa Barat	Setda Propinsi Jawa barat	Jl. Diponogoro No. 8 Bdg	32/SPK/Setda-Pan/VI/2016, tanggal 1 Juni 2016	135.000.000,-	1/6/2016	26/9/2016
8	Perencanaan Rehabilitasi 20 SD di Kec. Pangalengan Paket (XIX)	Bidang Sipil/Sub Bidang Desain Engineering Bangunan	Kabupaten Bandung	Dinas Permukiman & Tata Wilayah	Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 022-5891184	602.I/507/KRK/TB/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016	61.397.000,-	15/6/2016	10/7/2016
9	Sistem Informasi PPK & Evaluasi PPK-IPM Kab. Tasikmalaya	Bidang Telematika	Kabupaten Tasikmalaya	Bappeda Kab. Tasikmalaya	Kaupaten Tasikmalaya	30 Juni 2016	98.600.000,-	30/6/2016	23/11/2016
10	Penyusunan Manuskrip SNI Produk Logam Tekstil dan Aneka	Bidang Ekonomi	DKI Jakarta	Direktorat Jendral Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka	Jl. Rasuna Syaid No.12 Jkt	612/1590.A/Dirjen ILMT/06/2016, Juni 2016	149.500.000,-	30/8/2016	30/8/2016
11	Pembuatan Software Sistem Informasi Peningkatan IPM 80 Kabupaten Sukabumi	Bidang Telematika	Kab. Sukabumi	Bappeda Kabupaten Sukabumi	Jl. Ahmad Yani No 1. Kabupaten Sukabumi	012/Satlak29-IPM-PPK/2016	78.000.000,-	30/8/2016	30/8/2016
12	Digitasi Peta Kelayakan Lingkungan Pertambangan	Bidang Telematika	Propinsi Jawa Barat	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Jalan Dipenogoro No. 57 Bandung 40122	053.01/SPK/7-BP/VII/2016, Juli 2016	133.605.000,-	12/9/2016	12/9/2016
13	Renovasi Gedung UPT Cibaduyut	Bidang Sipil/Sub Bidang Desain Engineering Bangunan	Bandung	Diperindag Provinsi Jawa Barat	Jl. Asia Afrika No. 146 Bandung	12/SK/PPK//KRG-CBD/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016	13.696.000,-	18/7/2016	21/12/2016

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Pembuatan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kebun dan Pabrik Teh Kertasari	Bidang Jasa Analisis Engineering/Sub Bidang Jasa Komposisi, Kemurnian dan Analisis	Medan	PT. PP London Sumatera Indonesia. Tbk.	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 16 Cirebon	01/PROCESS/CONT/2017, 8 Agustus 2016	50.930.000,-	8/8/2016	17/11/2016
15	Pengukuran Tapak Batas Ge-nangan Waduk Jatigede Elevesi + 262,5 m Guna Keperluan Pembebasan Tanah	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Kabupaten Sumedang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)	Jl. Braga No.137 Bandung	600/PINLAK.139a/SPK/2016, tanggal 9 Agust 2016	49.725.000,-	9/8/2016	18/9/2016
16	Rehabilitasi 14 (Empat Belas) SD Kecamatan Rancabali dan Kec. Ciwidey	Bidang Sipil/Sub Bidang Desain Engineering Bangunan	Kabupaten Bandung	Dinas Permukiman & Tata Wilayah	Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 022-5891184	602.2/1420.b/KRK/TB/VIII/2016, tanggal 15 Agust 2016	128.152.000,-	15/8/2016	11/10/2016
17	Penyusunan Pola Pengembangan Komoditi Agribisnis Strategi di Kabupaten Indramayu	Bidang Pertanian dan Perdesaan	Kabupaten Indramayu	Bapeda Kabupaten Indramayu	Jl. Letjend. S. Parman No. 15 Indramayu	902/Kep.445.01.0619-Dal.Gram/2016, tanggal 28 Agust 2016	114.675.000,-	28/8/2016	28/11/2016
18	Pengawasan Rehabilitasi 17 (Tujuh Belas) SD di Kec. Pameungpeuk, Banjaran dan Kec. Canguang	Bidang Sipil/Sub Bidang Desain Engineering Bangunan	Kabupaten Bandung	Dinas Permukiman & Tata Wilayah	Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 022-5891184	602.2/1620/KRK/TB/VIII/2016, tanggal 28 Agust 2016	134.030.000,-	28/8/2016	24/10/2016
19	Penyusunan Strategi Ketahanan Energi/Blue Print Pengelolaan Energi Jawa Barat	Bidang Pertambangan Energi	Propinsi Jawa Barat	Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat	Jln. Soekarno Hatta Nomor 576 Bandung	026.01/SPK/7-BP/VIII/2016, Agustus 2016	197.301.500,-	6/11/2016	6/11/2016
20	Pengawasan Perbaikan Penyekat Ruang untuk Penempatan Peralatan Secara Terintegrasi	Bidang Sipil/Sub Bidang Teknik Sipil Keairan	Bandung	Departemen Energi&Sum-ber Daya Mineral Republik Indonesia	Jl. Dr. Junjuran no. 236 Bandung	284/spk/p2k-psl/pppgi/2016, tanggal 14 Sept '06	24.500.000,-	14/9/2016	12/12/2016

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Cirebon	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Konsultansi Lingkungan	Kota Cirebon	Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cirebon	Jl. Dr. Wahidin Sudi-rohusodo No. 16 Cirebon	04/Keg.SoER/KPLH/2016, tanggal 16 Sept 2016	49.500.000,-	16/9/2016	14/11/2016
22	Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Bidang Telematika	Kota Bandung	Dinas Kesehatan Prop. Jawa Barat	Jl. Supratman No.73 Bandung	602/24-PPK. simbada/VI/06	73.993.000,-	15/9/2016	15/9/2016
23	Pembuatan Peta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Cimahi	Bidang Telematika	Kota Cimahi	Dinas Tata kota	Jln. Cihanjuang Blok Jati Telp. 6631031	14/SPJK/PETA-PPR/KPPR/2016	148.000.000,-	22/9/2016	22/9/2016
24	Perencanaan Teknik (DED) Sarana Air Minum dan Sanitasi	Bidang Sipil/Sub Bidang Teknik Sipil Keairan	Kabupaten Serang	DPU Kab. Serang	Jl. Samaun Bakri Serang	056.1/3822/DPUK/ 2016	49.900.000,-	13/10/2016	13/10/2016
25	Penyusunan Profil Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Jawa Barat	Bidang Pengembangan Pertanian dan Perdesaan/Sub Bidang Perikanan	Propinsi Jawa Barat	Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat	Jl. Wastukencana NO. 17 Bandung Telp 022-4203471	602.1/5901/APBD, tanggal 3 Okt 2016	69.550.000,-	3/10/2016	3/12/2016
26	Penyusunan Kegiatan Updating dan Upgrading Website WWW. Tasikmalaya.Go.id	Bidang Telematika	Kabupaten Tasikmalaya	Dinas Penelitian Pengembangan & Pengelola Elektronika	Jl. Oto Iskandardinata No. 17 Telp. (0265) 334789	489/361/Litbang & PDE/X/ 2016, tanggal 19 Okt 2016	188.100.000,-	19/10/2016	8/12/2016
27	Instalasi Air Minum/Bersih	Bidang Sipil/Sub Bidang Teknik Sipil Keairan	Kab. Serang	Dinas Pekerjaan Umum	Jln. Sama'un Bakri	0564/2048/DPUK/2016, tanggal 24 Okt 2016	130.190.000,-	24/10/2016	20/12/2016
28	Pembuatan Software Sistem Informasi Peningkatan IPM 80 & Sistem Informasi & Evaluasi Kota Sukabumi	Bidang Telematika	Kota Sukabumi	Bapeda Kota Sukabumi	Jl. Cikole Dalam No. 23 Sukabumi	023/99a.1/ppk/2016, tanggal 27 Okt 2016	98.600.000,-	27/10/2016	24/11/2016

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Pekerjaan Pembekalan II Persiapan Peserta Program Magister Teknik di Rookee India	Bidang Pendidikan	Propinsi Jabar	DPU Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia	Jln. Abdul Hamid-Cicaheum Bandung 40193 Telp. (022) 7206892.	32/SPMK/Hb-P/XI/2016, tanggal 6 Nop 2016	49.907.000,-	6/11/2016	5/12/2016
30	Perencanaan Teknis Detail Design Sarana Kesehatan (Paket IV)	Bidang Sipil/Sub Bidang Desain Engineering Bangunan	Kab. Serang	DPU Kab. Serang	Jl. Samaun Bakri Serang	056.6/4609/DPUK/2016, tanggal 13 Nop 2016	49.775.000,-	13/11/2016	11/12/2016
31	Survey Geolistrik Kelautan Pe-sisir Madura	Bidang Petambangan Energi	Propinsi Jawa Barat	Pusat Penelitian Pengembangan Geologi Kelautan	Jln. Dr. Junjuran N0. 236 Bandung Telp (022) 6032020	368/P2K/PPPGL/2016, tanggal 14 Nop 2016	195.827.500,-	14/11/2016	15/12/2016
32	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembuatan DED Jalan Lingkar Warungkondang Kota Cianjur	Bidang Sipil/Sub Bidang Teknik Sipil Transportasi	Kabupaten Cianjur	Dinas Bina Marga	Jl. Adi Sucipta No. 2 Cianjur	620/2059/DBm, tanggal 22 Nop 2016	99.212.300,-	22/11/2016	11/12/2016
33	Perencanaan Pembuatan Sumur Air Dalam	Bidang Sipil/Sub Bidang Teknik Sipil Keairan	Kab. Bandung	Balai Besar Pulp Dan Kertas	Jl. Raya Dayeuhkolot No.132 Kabupaten Bandung	12/Prc/Artesis/VI/BBPK/06 tanggal 31 Nopember 2016	17.350.000,-	31/11/2016	31/12/2016
34	Sistem Informasi PPK & Evaluasi PPK-IPM Kabupaten Bandung	Bidang Telematika	Kab. Bandung	Bappeda Kabupaten Bandung	Jl. Raya Soreang	612/29-APM-PPK/KPMD/2016	98.600.000,-	24/11/2016	24/11/2016
35	Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Bandung	Bidang Sipil/Sub Bidang Desain Engineering Bangunan	Kabupaten Bandung	Dinas Permukiman & Tata Wilayah	Jln Raya Soreang Km 17 Telp. (022) 5891184 Soreang	602.1/507/KRK/TB/ VI/2016	161.397.000,-	5/12/2016	5/12/2016

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Pengawasan Revitalisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Bidang Sipil/Sub Bidang Desain Engineering Bangunan	Kota Bandung	Dinas Pendidikan Kota Bandung	Jln. Jend. Ahmad Yani No. 239 Telp. 7208007	01/068/PINLAK.REV/2016	117.012.000,-	15/12/2016	15/12/2016
37	Sistem Data Base dengan Menggunakan Operating Linux	Bidang Telematika	Kota Bandung	Kantor Penanaman Daerah Kota Bandung	Jl. Cianjur No.34 Bandung	842/29-APM-PPK/KPMD/2016	78.540.000,-	11/12/2016	11/12/2016
TAHUN 2015									
1	Pekerjaan Pembuatan 3 (tiga) Sumur Monitoring di PT. Paiton energi Probolinggo Jawa Timur	Bidang Sipil/Sub Bidang Sipil Keairan	Jawa Timur	PT. Wahana Sap-taprakarsa	Jl. Ranca Kendal No. 20 Cigadung Bandung	031/SP-WS/V/2015, tanggal 4 Mei 2015	149.500.000,-	4/5/2015	12/12/2015
2	Penyusunan AMDAL Sentra Grosir Cikarang Bekasi	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Konsultansi Lingkungan	Bekasi	PT. Adimakmur	Jl. Raya Cikarang Bekasi	042/AM-/UKL-UPL/05, tanggal 15 Juni 2015	98.000.000,-	15/6/2015	15/9/2015
3	Penyusunan Analisa Data Produksi dan Turunannya (Hasil olahan Perkebunan	Bidang Pertanian dan Perdesaan/Sub Bidang Perkebunan dan Mekanisasi Pertanian	Propinsi Banten	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prop. Banten	Jl. Raya Cilegon Km.2 Kepandean Serang	612/1590.A/Hutbun-APBN. Tanggal 15 Juni 2015	119.000.000,-	15/6/2015	2/12/2015
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Tol Sadang	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Konsultansi Lingkungan	Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta	Jl. Purnawarman Timur No. 11A Purwakarta	08.1/SPPP/VI/2015 Tanggal 30 Juni 2015	119.200.000,-	30/6/2015	30/11/2015

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (BWK) I Kota Banjar	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Kota Banjar	Bappeda Kota Banjar	Jl. Raya Majenang No. 15 Banjar	612/1590.A/Bapp-Pan/VII, tanggal 7 Juli 2015	138.500.000,-	7/7/2015	3/10/2015
6	Penyusunan Metode Ekonomi untuk Perencanaan & Evaluasi Pembangunan Regional	Bidang Keuangan/Sub Bidang Keuangan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Bappeda Kabupaten Purwakarta	Jl. Gandanegara No. 25 Kabupaten Purwakarta	050/01/SPKPMEPERR/VIII/2015, tanggal 25 Agust 2015	149.582.500,-	25/8/2015	22/11/2015
7	Penyusunan Buku Peluang Investasi dan Kelayakan Usaha Agrobisnis Perkebunan di Propinsi Banten	Bidang Pertanian dan Perdesaan/Sub Bidang Perkebunan dan Mekanisasi Pertanian	Propinsi Banten	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prop. Banten	Jl. Raya Cilegon Km.2 Kepandean – Serang	01/Hutbun-D RS/X/APBN/2015. tanggal 20 Okt 2015	116.000.000,-	20/10/2015	20/12/2015
8	Penyusunan Analisa Data Produksi dan Turunannya (Hasil Ioan Perkebunan)	Bidang Pertanian dan Perdesaan/Sub Bidang Perkebunan dan Mekanisasi Pertanian	Propinsi Banten	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Jl. Raya Cilegon Km. 2 Kapandean Serang Telp (0254)220616	525/77.6/SPPJK-Hutbun/X/2015, tanggal 5 Okt 2015	116.050.000,-	5/10/2015	4/12/2015
9	Penyusunan Perangkat Informasi Rekapitulasi Hasil Konseling	Bidang Telematika	Propinsi Jawa Barat	Pemerintah Prop. Jawa Barat Sekertariat Daerah	Jl. Ponogoro No. 22 Bandung	800/69.A/Peg.2	175.000.000,-	18/11/2015	18/11/2015
10	Renovasi Gedung Kantor Di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Jawa Barat	Bidang Arsitektur	Propinsi Jawa Barat	Dinas Perindustrian & Perdagangan Prop. Jawa Barat	Jl. Asia Afrika No.146 Bandung	91/Kep.184-Dal Prog/2015	113.696.000,-	15/12/2015	15/12/2015

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TAHUN 2014									
1	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan koridor sekitar Stasiun Kereta api Kab. Bogor	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Cibinong	Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Kab. Bogor	Jl. Komp. Setu Cikaret-Cibinong Telp. (021) 765124	922/65/DRTLH-Pan/V, tanggal 28 Mei 2014	116.500.000,-	28/5/2014	28/5/2014
2	Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Purwakarta	Bidang Transportasi	Kabupaten Purwakarta	Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta	Jl. Veteran No. 1 Purwakarta, Tlp. (0264) 200105	612/1590.A/Dishub-Angk, tanggal 7 Juli 2014	160.000.000,-	7/7/2014	6/9/2014
3	Kajian Pemberdayaan Teknologi Semen Murah Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan sumber daya manusia Di Papua	Bidang Jasa Analisis Engineering/Sub Bidang Jasa Komposisi, Kemurnian dan Analisis	DKI Jakarta	Proyek Pengembangan Sumber Daya Pembangunan Kawasan Timur Indonesia	Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta	116/Pan/PWKL/VII/2014, tanggal 09 Juli'04	178.000.000,-	9/7/2014	29/11/2014
4	Pemboran Aplorasi Air Bawah Tanah Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kab. Madang	Bidang Sipil/Sub Bidang Sipil Keairan	Jawa Timur	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jl. Tidar N0.123 Surabaya	22/P2JT/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014	197.600.000,-	10/7/2014	18/10/2014
5	Pembuatan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Kantor Dinas di Pelabuhanratu Pusat Pemerintahan Kabupaten Sukabumi	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Konsultansi Lingkungan	Kabupaten Sukabumi	Dinas Permukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi	Jl. Raya Cisolok Km. 10 Cimaja Palabuhan-ratu	06/PINLAK-KD/VIII/2014, tanggal 12 Agust 2014	78.600.000,-	12/8/2014	11/10/2014
6	Penyusunan Data RTRW Kabupaten Bangka Barat	Bidang Tata Lingkungan/Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban	Kabupaten Bangka	Bappeda Kabupaten Bangka	Bangka	602.1/KEG-RTRW/2014, tanggal 15 Agust 2014	198.750.000,-	15/8/2014	12/11/2014

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TAHUN 2013									
1	Sistem Informasi Monitoring Lahan Tanaman Pangan.	Bidang Pertanian dan Perdesaan/Sub Bidang Tanaman Pangan	Propinsi Jawa Barat	Kanwil. Dep. Pertanian Prop. Jawa Barat	Jl. Surapati Bandung	22 April 2013	197.200.000,-	22/4/2013	21/7/2013
2	Sistem Informasi Manajemen Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung	Bidang Telematika	Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung	Jl. Wastukencana No. 2 Bdg	5 Maret 2013	149.500.000,-	5/3/2013	2/6/2013
3	Visualisasi Asset Pemerintah Kota Bandung	Bidang Telematika	Propinsi Jawa Barat	Pemerintah Kota Bandung	Jl. Wastukencana No. 2 Bandung	05 Mei 2013	144.000.000,-	5/5/2013	4/11/2013
4	Penerbitan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang Kota Bandung	Bidang Keuangan	Propinsi Jawa Barat	Pemerintah Kota Bandung	Jl. Wastukencana No. 2 Bandung	13 Mei 2013	116.000.000,-	13/5/2013	13/8/2013
5	Desain Rehabilitasi Partisipatif D.I Gadung Cs. Di Kab. Subang Prop. Jawa Barat	Bidang Sipil/Sub Bidang Teknik Sipil Bangunan	Propinsi Jawa Barat	Proyek Irigasi Andalan Jabar	Jl. Braga No. 137 Bandung	19 Mei 2013	112.000.000,-	19/5/2013	15/12/2013
6	Pembangunan sistem informasi geografis (GIS) Tahap I	Bidang Telematika	Kabupaten Karawang	Bappeda Kab. Karawang	Jl. Ahmad Yani No. 1 Karawang	4 Juni 2013	189.800.000,-	4/6/2013	21/12/2013
7	Inventarisasi dan Identifikasi kawasan Kars di Jawa Barat	Bidang Tata Lingkungan	Propinsi Jawa Barat	Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Jawa Barat	Jl. Soekarno Hatta No. 367 Bandung	14 Juni 2013	115.000.000,-	14/6/2013	14/10/2013
8	Pembuatan Dokumen Pembangunan dengan sistem komputerisasi	Bidang Telematika	Kabupaten Indramayu	Bappeda Kabupaten Indramayu	Jl. Ahmad Yani No.7	12/15.A/Bapp-Pan/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013	178.500.000,-	21/6/2013	19/11/2013
9	Studi Kelayakan Jalan Palwad AP.02 Kabupaten Karawang	Bidang Sipil/Sub Bidang Teknik Sipil Transportasi	Karawang	Bappeda Kabupaten Karawang	Karawang	050/30/Proy.Jln-Palwad/Bapp/ 2013, tanggal 27 Juni 2013	91.879.000,-	27/6/2013	26/12/2013

No	Nama Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Tugas		Kontrak		Tgl Selesai Menurut	
				Nama	Alamat	No & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Analisa Pengembangan dan Pemberdayaan Pemasaran Produk Usaha Masyarakat	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Cianjur	Bappeda Kabupaten Cianjur	Jl. Siti Jenab No. 29 Cianjur	073/230/Sel/VI/ Bappeda, tanggal 29 Juni 2013	97.000.000,-	29/6/2013	21/11/2013
11	Pengembangan Data Ware House Sigan dan Siimdis PT. PLN Didtribusi Jawa Barat dan Banten APJ Majalaya	Bidang Telematika	Kabupaten Bandung	PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Majalaya	Jl. Jaksa Naranata No. 1 Baleendah Bandung	2 Sept 2013	125.700.000,-	2/9/2013	22/12/2013
12	Penyusunan Database GIS untuk Optimasi Pengembangan Sumber Daya Air SWS 04.09 Mempawah-Sambas	Bidang Telematika	Pontianak	Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir, DPU Kalbar	Jl. Achmad Sood Pontianak	07 Sep 2013	187.600.000,-	7/9/2013	1/12/2013

2.6. TENAGA AHLI PERUSAHAAN

No.	Nama	Tgl/Bln/Thn lahir	Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
	TEAM LEADER						
1	Dr. Bayu Erfianto, MT.	17 November 1973	S3. T.Elektro & Informatika Institut Teknologi Bandung, 2017	Team Leader	13	Ahli Informatika	332003/I1.A/PP/III/IJ Z/3/2017



No.	Nama	Tgl/Bln/Thn lahir	Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
TENAGA AHLI							
1	Ilhamdaniah, Mt, P.hD	16 November 1977	Doctor of Philosophy State University of New York at Buffalo, 2019	Tenaga Ahli	10	Ahli GIS	-
2	Hardi Mardiana, ST	28 Maret 1987	S1. Universitas Majalengka 2012	Tenaga Ahli	8	Ahli Sarana Prasarana	I-15-12-1-0002
3	Risandy Wibowo, ST	02 Juli 1989	S1. Universitas Majalengka 2012	Surveyor	5	Surveyor	I-15-12-1-0005
4	Tatang Wahyudin, ST	17 April 1976	S1. Universitas Majalengka 2012	Surveyor	5	Surveyor	I-15-12-2-0017
5	Oktaviyani Ika Putri, ST	4 Oktober 1984	S1. Planologi UNDIP, 2008	Surveyor	8	Surveyor	11658/ST
TENAGA PENDUKUNG							
1	Monterico Adrian, MT	31 Juli 1987	S2. Informatika ITB 2013	Tenaga Pendukung	13	Assisten Ahli Informatika	235017/I1A/AP/IV/IJ Z/2/2013
2	Linda Hevi Triani, Amd	22 Juni 1993	D3 Geografi UGM 2015	Tenaga Pendukung	5	Operator GIS	06475/SV/2015
3	Ihsan Ibadurohman	10 Januari 1996	SMK	Tenaga Pendukung	3	Administrasi	DN-02 Mk 0162011

3.1 PEMAHAMAN SECARA UMUM

Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka 2005-2025 salah satunya adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing. Dalam hal ini, Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Majalengka diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Untuk itu, dalam mewujudkan Kabupaten Majalengka dengan struktur penduduk seimbang, Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk mencapai momentum demografi berupa kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Hal inilah yang disebut dengan *demographic deviden* yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk

pada fase ini betul-betul menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Pertanyaan besar adalah kapan dan bagaimana mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang tersebut. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu dalam mewujudkannya diperlukan suatu *grand design* atau rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk agar kondisi penduduk tumbuh seimbang segera terwujud yang dimulai dengan kajian situasi kependudukan daerah.

Hal pokok yang perlu dilaksanakan agar struktur penduduk tumbuh seimbang dapat terwujud adalah kepedulian semua pihak, baik unsur pemerintah, sektor swasta, maupun unsur masyarakat. Melalui kerja keras, terintegrasi dan berkesinambungan sejalan dengan semangat otonomi daerah, implementasi prinsip "Pembangunan Berwawasan Kependudukan" secara konsisten dan berkelanjutan merupakan paradigma yang tidak dapat ditawar lagi. Lebih dari itu, dengan menggabungkan amanat UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, telah memberikan gambar bahwa aspek-aspek kependudukan beserta matryanya dan lingkungan hidup, perlu digaungkan dengan prinsip "Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan".

Sebagai simpulan, diperlukan suatu rencana besar yang memuat kebijakan dan program operasional baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang mampu menjadi dasar dan tolok ukur pembangunan kependudukan di Kabupaten Majalengka. Prinsip Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan adalah paradigma dari rencana besar yang disusun tersebut. Untuk itu, perlu dibuat pengantar rancangan induk pembangunan kependudukan dalam bentuk "Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka". Arah dan target capaian pengendalian kuantitas penduduk

adalah pilar utama dalam rancangan induk tersebut yang dimulai dengan kajian situasi kependudukan daerah.

3.2 Pemahaman Terhadap Tujuan

Dalam KAK disebutkan bahwa tujuan kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah Tercapainya kualitas penduduk yang tinggi untuk mencapai Majalengka RAHARJA (Religius, Adil, Makmur dan Sejahtera). Serta terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

3.3 Pemahaman Terhadap Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Serta terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi dan berbudaya tinggi.

3.4 Pemahaman Terhadap Ruang lingkup

Ruang lingkup yang tertuang pada dokumen ini mencakup :

1. 5 Pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan.
2. Dokumen ini berlaku bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan merencanakan Pembangunan Daerah serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, lembaga non pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Dan tahapan Pekerjaan yang tercakup dalam kegiatan ini antara lain:

1. Persiapan antara tahap tim konsultan terdiri dari tenaga ahli yang mencakup multi disiplin yang berkompeten dalam bidangnya, memiliki wawasan serta menghayati betul tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengumpulan data dari OPD terkait serta melakukan peninjauan berdasarkan kajian-kajian sebelumnya di kabupaten lain.
2. Survey, output yang dihasilkan dari data-data yang dibutuhkan berdasarkan hasil kajian persiapan kepada OPD terkait;
3. Perencanaan Awal, Perencanaan awal adalah hasil analisis berdasarkan hasil survey dan persiapan terkait situasi kependudukan di kabupaten majalengka
4. Perencanaan Akhir, Perencanaan teknis akhir adalah hasil perbaikan semua hasil perencanaan awal yang terdiri atas proyeksi situasi kependudukan di Kabupaten Majalengka

3.5 Pemahaman Terhadap Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Metodologi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Tahapan persiapan merupakan tahap koordinasi dan mobilisasi tenaga ahli dan peralatan, perizinan survey, penyusunan format isian, dan koordinasi dengan instansi terkait;
- Tahapan Pengumpulan Data merupakan tahapan mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lapangan maupun yang diperoleh dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
- Tahapan Analisis Data merupakan tahapan pengolahan data dan selanjutnya dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian tersebut.

- Penyusunan Laporan Pendahuluan merupakan laporan hasil rona awal dari survey lapangan untuk menentukan konsep perencanaan secara umum yang diajukan serta beberapa sasaran pekerjaan yang dihasilkan/desain infrakstruktur yang paling baik untuk dapat dilaksanakan pembangunannya;
- Penyusunan Laporan Akhir merupakan hasil perbaikan semua hasil laporan yang terdiri atas tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis data dan laporan pendahuluan.

Pemahaman dari metodologi pelaksanaan kegiatan ini bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 ini dilakukan dengan tahapan yang dimulai dengan persiapan terhadap maksud dan tujuan pekerjaan yang akan dilakukan sehingga perlu adanya pemahaman terhadap penyusunan program kerja (alur pikir dan jadwal) dan penyusunan instrumen pelaksanaan maupun perencanaan yang dilibatkan serta tahap Penyusunan Kerangka/Struktur/Model perencanaan spasial maupun aspasial. Baru setelah itu dilakukan pengumpulan data primer maupun sekunder dengan pengelompokan pada data spasial maupun aspasial.

3.6 Pemahaman Terhadap Output Yang Dihasilkan

Output yang diinginkan dari Penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 ini sebagai berikut :

- Laporan Pendahuluan
- Laporan Akhir

Output yang demikian berdasarkan pemahaman menurut Konsultan memang harus dihasilkan dari kegiatan ini. Akan tetapi output ini harus menjadi data yang bermanfaat untuk pengembangan perencanaan dan bahan pendukung perwujudan pembangunan Majalengka yang dinamis dan sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.



TANGGAPAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA

4.1. Tanggapan Umum

Melihat Kerangka Acuan Kerja bahwa Penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka ini merupakan inisiatif untuk membuat suatu analisis komprehensif terkait situasi kependudukan dan kondisi ideal yang diharapkan di Kabupaten Majalengka. Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka juga merupakan dasar dalam pembuatan RPJPD yang akan dilakukan 2 tahun mendatang dan RPJMD yang baru.

Ketersedian Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka diharapkan dapat terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka sebagai acuan situasi dan kondisi ideal kependudukan.

4.2. Tanggapan Terhadap Tujuan

Tanggapan dari Konsultan untuk mengembangkan Profil Pembangunan Kependudukan ini mutlak diperlukan data dan informasi baik spasial maupun non spasial yang akurat, baik dari segi data geografis murni maupun data tematik seperti kependudukan, dan data tematik lainnya, serta dapat dipertanggung-jawabkan. Keakuratan data dan kemampuan pengolahan data yang tentunya sangat besar jumlah dan ragamnya, akan menentukan efektivitas dari sebuah perencanaan.

4.3. Tanggapan Terhadap Sasaran

Tanggapan Konsultan dalam hal ini, bahwa Sasaran disusunnya Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka ini agar terwujudnya suatu pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Serta terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi dan berbudaya tinggi.

Juga penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka akan mampu memudahkan organisasi pemerintah daerah dalam merencanakan dari segi kependudukan sehingga daya dukung dan daya tampung serta jangkauan fasilitas sarana dan prasarana umum dapat sesuai sasaran kependudukan yang ada.

4.4 Tanggapan Terhadap Ruang lingkup

4.4.1 Lingkup Materi Pekerjaan

Dalam KAK telah disampaikan ruang lingkup kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 yang dijelaskan secara umum dan secara khusus.
- Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka menjelaskan analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan serta proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan sebagai acuan dalam perencanaan dari sisi kependudukan di Kabupaten Majalengka.

Pada dasarnya menurut konsultan untuk menyusun Profil Pembangunan Kependudukan harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemahaman KAK
- b. Identifikasi Kondisi Lapangan
- c. Kompilasi data lapangan
- d. Analisis
- e. Proyeksi data lapangan
- f. FGD
- g. Revisi dan Finalisasi
- h. Finalisasi dan Printout
- i. Presentasi dan Pelaporan

Data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Data spasial
 - peta administratif Kabupaten Majalengka
 - peta administratif kecamatan dan kelurahan pada Kabupaten Majalengka
 - peta geografis Kabupaten Majalengka
 - peta kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka
- b. Data non spasial
 - data demografis
 - data kuantitas penduduk Kabupaten Majalengka
 - data kualitas penduduk Kabupaten Majalengka
 - data persebaran dan mobilitas penduduk Kabupaten Majalengka
 - data pembangunan keluarga Kabupaten Majalengka
 - data administrasi kependudukan Kabupaten Majalengka

4.4.2 Lingkup Lokasi Pekerjaan

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 km² atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 km²). Berada pada Bagian Barat antara 108° 03'- 108° 19' Bujur Timur, bagian Timur antara 108° 12'-108° 25' Bujur Timur, Bagian Utara antara 6° 36'-6° 58' Lintang Selatan dan bagian Selatan antara 6° 43'-7° 03' Lintang Selatan.

Batas wilayah di utara dengan Kabupaten Indramayu, selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan, di sebelah barat dengan Kabupaten Sumedang. Wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 Kecamatan, 13 Kelurahan serta 330 Desa.

Ditinjau dari kondisi topografis, sebesar 13,21 persen luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada daerah perbukitan terjal, 18,53 persen berada pada daerah berbukit bergelombang dan 68,26 persen berada pada daerah landai atau dataran rendah.

4.5 Tanggapan Terhadap Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Tanggapan dari metodologi pelaksanaan kegiatan ini bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka dilakukan dengan tahapan yang dimulai dengan persiapan terhadap maksud dan tujuan pekerjaan yang akan dilakukan sehingga perlu adanya penguasaan bahan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penyusunan program kerja (alur pikir dan jadwal) dan penyusunan instrumen pelaksanaan yang dilibatkan.

Baru setelah itu dilakukan secara lebih teliti dan akurat yakni identifikasi kondisi lapangan berupa pengumpulan data sekunder. Kompilasi data perlu dilakukan dengan metode yang sistematis, efisien dan informatif karena sebagai bahan untuk proyeksi kependudukan secara komprehensif.

Analisis adalah hasil rona awal dari identifikasi kondisi lapangan dan kompilasi data lapangan untuk menentukan analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan. Proyeksi data lapangan adalah hasil proyeksi dari analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan sebagai gambaran proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan yang ada di Kabupaten Majalengka.

4.6 Tangapan Terhadap Output yang Dihasilkan

Tanggapan mengenai Keluaran yang diinginkan dari Penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka diharapkan mampu menampilkan berbagai informasi sebagai berikut :

- Analisis kuantitas penduduk Kabupaten Majalengka
- Analisis kualitas penduduk Kabupaten Majalengka
- Analisis Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Majalengka
- Analisis Pembangunan Keluarga Kabupaten Majalengka
- Analisis Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
- Proyeksi kuantitas penduduk Kabupaten Majalengka
- Proyeksi kualitas penduduk Kabupaten Majalengka
- Proyeksi Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Majalengka
- Proyeksi Pembangunan Keluarga Kabupaten Majalengka
- Proyeksi Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka

Pemahaman dari Konsultan, output demikian yang memang harus dihasilkan dari kegiatan ini. Akan tetapi output ini harus menjadi data yang bermanfaat untuk pengembangan perencanaan dan bahan pendukung perwujudan pembangunan Majalengka yang dinamis dan sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Apresiasi inovasi disusun sebagai bentuk konstruktif yang positif dari pemahaman dan tanggapan konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja. Bentuk konstruktif ini ditujukan untuk menyalurkan keluaran atau hasil yang lebih berdaya guna dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan Kabupaten Majalengka. Jadi konsultan tidak semata-mata berpatokan pada Kerangka Acuan Kerja yang telah ada, tetapi mencoba untuk lebih mengembangkannya sesuai dengan efisiensi dan optimalisasi program maupun kebijakan yang harus dilaksanakan.

Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Majalengka 2005-2025 salah satunya adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing. Dalam hal ini, Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Majalengka diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Untuk itu, dalam mewujudkan Kabupaten Majalengka dengan struktur penduduk seimbang, Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk mencapai momentum demografi berupa kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Hal inilah yang disebut dengan demographic deviden yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk pada fase ini betul-betul menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Pertanyaan besar adalah kapan dan bagaimana mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang tersebut. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu dalam mewujudkannya diperlukan suatu grand design atau rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk agar kondisi penduduk tumbuh seimbang segera terwujud yang dimulai dengan kajian situasi kependudukan daerah.

Penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka telah sejalan dengan RPJMD Kabupaten Majalengka yaitu Pendidikan Merupakan Misi Pertama Bupati dan Wakil Bupati yaitu, **“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)”**.

5.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Untuk itu, dalam mewujudkan Kabupaten Majalengka dengan struktur penduduk seimbang, Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk mencapai momentum demografi berupa kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Hal inilah yang disebut dengan demographic deviden yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk pada fase ini betul-betul menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Pertanyaan besar adalah kapan dan bagaimana mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang tersebut. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu dalam mewujudkannya diperlukan suatu grand design atau rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk agar kondisi penduduk tumbuh seimbang segera terwujud yang dimulai dengan kajian situasi kependudukan daerah.

Hal pokok yang perlu dilaksanakan agar struktur penduduk tumbuh seimbang dapat terwujud adalah kepedulian semua pihak, baik unsur pemerintah, sektor swasta, maupun unsur masyarakat. Melalui kerja keras, terintegrasi dan berkesinambungan sejalan dengan semangat otonomi daerah, implementasi prinsip "Pembangunan Berwawasan Kependudukan" secara konsisten dan

berkelanjutan merupakan paradigma yang tidak dapat ditawar lagi. Lebih dari itu, dengan menggabungkan amanat UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, telah memberikan gambar bahwa aspek-aspek kependudukan beserta matryanya dan lingkungan hidup, perlu digaungkan dengan prinsip "Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan".

Sebagai simpulan, diperlukan suatu rencana besar yang memuat kebijakan dan program operasional baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang mampu menjadi dasar dan tolok ukur pembangunan kependudukan di Kabupaten Majalengka. Prinsip Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan adalah paradigma dari rencana besar yang disusun tersebut. Untuk itu, perlu dibuat pengantar rancangan induk pembangunan kependudukan dalam bentuk "Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka". Arah dan target capaian pengendalian kuantitas penduduk adalah pilar utama dalam rancangan induk tersebut yang dimulai dengan kajian situasi kependudukan daerah.

5.2 Aspek Hukum / Legal

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33 dan pasal 34);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025);
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
19. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jawa Barat 2015- 2035;



20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka.

6.1 Latar Belakang

Dalam menangani masalah penyediaan informasi yang sesuai, pendekatan yang digunakan adalah metode analisis dan proyeksi kependudukan. Beberapa alasan kenapa dalam Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini menggunakan metode analisis dan proyeksi kependudukan adalah 1) Membuat analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan, 2) Membuat proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan. 3) Membuat dokumen rancangan yang dapat digunakan dalam penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).

6.2 Gambaran Profil Pembangunan Kependudukan

Disini dijelaskan mengenai Gambaran Profil Pembangunan Kependudukan yang akan digunakan dalam Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.

6.2.1 Profil Pembangunan Kependudukan

Profil Pembangunan Kependudukan selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Profil Pembangunan Kependudukan adalah gambaran kuantitas dan kualitas penduduk pada masa kini, untuk selanjutnya diproyeksikan kondisinya pada masa depan. Terdapat lima pilar penting yang dibahas yakni pengendalian

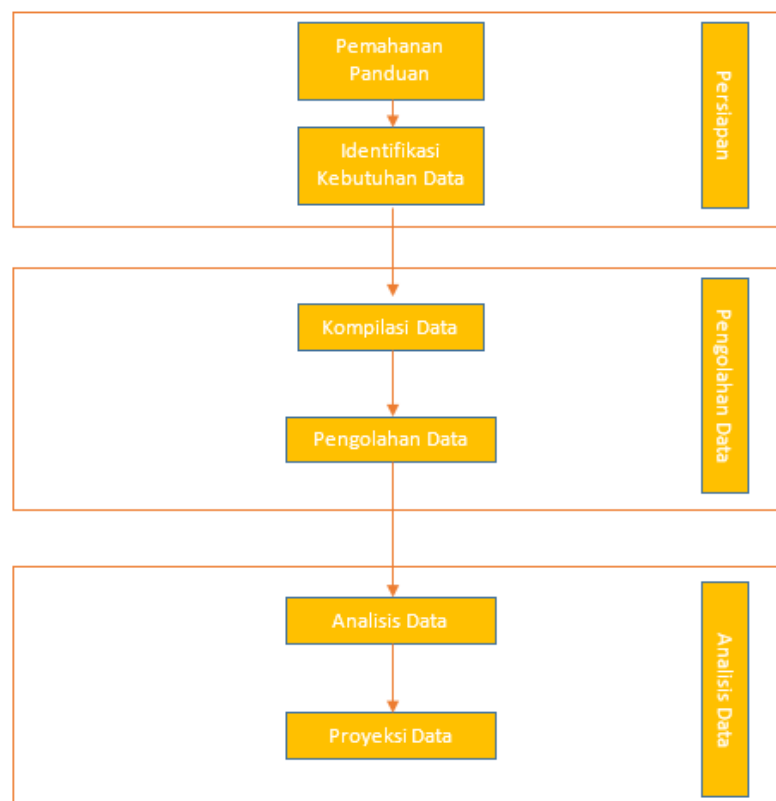
kuantitas, pengembangan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas dan pembangunan basis data kependudukan. Diharapkan ke depan akan terwujud penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk terwujudnya Masyarakat Majalengka yang religius, adil, harmonis dan sejahtera. Secara operasional, dokumen ini merupakan bagian integral dari pembangunan di berbagai bidang.

6.3 Pendekatan Penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka

Pendekatan dalam Penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka secara garis besar akan melalui tahapan sebagai berikut (lihat Gambar 6.1):

Gambar 6.1

Pendekatan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka



1. Persiapan

Pada tahap ini, pertama-tama akan dilakukan kajian terhadap kerangka acuan kerja yang menjelaskan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan studi awal (*desk study*) sebagai bahan untuk mempersiapkan dan memobilisasi kebutuhan tenaga dan peralatan. Dengan demikian, pekerjaan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya akan berjalan secara sistematis. Dilakukan pendalaman panduan penyusunan dokumen dan identifikasi kebutuhan data yang terdapat dalam panduan penyusunan dokumen.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data diperoleh dari pengumpulan data sekunder di melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka yang selanjutnya diolah dan menjadi bahan dalam pembuatan analisis dan proyeksi kependudukan.

3. Analisis Data

Analisis data ditempuh berdasarkan panduan penyusunan dokumen untuk menyusun analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan dan sebagai bahan untuk penyusunan proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan.



RENCANA KERJA

Berdasarkan pemahaman Konsultan terhadap kegiatan dan Kerangka Acuan Kerja, maka Konsultan membuat rencana kerja dan membagi kegiatan ini dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam kegiatan ini konsultan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

7.1. Pekerjaan Persiapan

Untuk pelaksanaan pendahuluan akan dilakukan kegiatan Persiapan, yang terbagi dalam:

- Koordinasi Dan Diskusi Dengan Tim Teknis Dan Pemberi Kerja
- Penyusunan instrumen pelaksanaan yang dilibatkan
- Mobilisasi Tenaga Ahli
- Koordinasi Tim Konsultan
- Kajian Pustaka
- Penyusunan program kerja

7.2. Pengumpulan Data

7.2.1 Data Spasial

- peta administratif Kabupaten Majalengka
- peta administratif kecamatan dan kelurahan pada Kabupaten Majalengka
- peta geografis Kabupaten Majalengka
- peta kepadatan penduduk Kabupaten Majalengka

7.2.2 Data non Spasial

- Data kuantitas penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2021
- Data kualitas penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2021
- Data Persebaran dan Mobilitas penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2021
- Data Pembangunan Keluarga Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2021
- Data Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka Tahun 2017-2021

7.3 Tahap Kompilasi, Analisis, dan Proyeksi Data Kependudukan

- Analisis kuantitas penduduk Kabupaten Majalengka
- Analisis kualitas penduduk Kabupaten Majalengka
- Analisis Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Majalengka
- Analisis Pembangunan Keluarga Kabupaten Majalengka
- Analisis Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
- Proyeksi kuantitas penduduk Kabupaten Majalengka
- Proyeksi kualitas penduduk Kabupaten Majalengka
- Proyeksi Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Majalengka
- Proyeksi Pembangunan Keluarga Kabupaten Majalengka
- Proyeksi Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka

7.4 Pelaporan

Pada tahap ini dilakukan pelaporan sebagai berikut :

a. Laporan Pendahuluan, berisi:

- Pemahaman konsultan tentang Kerangka Acuan Kerja
- Kerangka pemikiran dan metode kerja
- Organisasi kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan penyedia jasa
- Draft dan tata cara pengumpulan dan pencarian data
- Studi banding
- Studi Literatur
- Konsep awal

Laporan ini harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan, sebagai bahan diskusi / seminar.

b. Laporan Akhir, berisi:

- Latar Belakang penyusunan dokumen
- Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka
- Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kabupaten Majalengka
- *Draft* laporan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka

Laporan ini harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) berakhir sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan, untuk dibahas dalam seminar draft Akhir.

8

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pada Kerangka Acuan Kerja disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini periode penugasannya adalah 1,5 (satu setengah) bulan atau 45 (empat puluh lima) hari kalender. Pemahaman KAK berupa persiapan, studi literatur, konsep awal dan metode pengumpulan data akan dilaksanakan segera setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan dan akan berlangsung selama 2 minggu dengan mulai menentukan parameter survey dan penentuan jadwal survey yang akan dilakukan oleh konsultan untuk selanjutnya memulai pengumpulan data, termasuk inventarisasi.

Lalu dilakukan identifikasi kondisi lapangan yang diikuti dengan analisis untuk kebutuhan data profil pembangunan kependudukan sehingga dapat sejalan dengan alur dan konsep yang telah ditentukan. Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan analisis dilakukan input data dan hasil pengumpulan dari data terkini (*uptodate*) serta kompilasi data lapangan.

Penyusunan analisis berupa analisis spasial maupun aspasial berdasarkan kondisi lapangan yang ada juga disusun guna menghasilkan profil pembangunan kependudukan yang sesuai dengan kondisi eksisting secara riil di lapangan.

Berdasarkan proses analisis maka selanjutnya disusun proyeksi data lapangan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Tak lupa juga diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama beberapa instansi terkait untuk kesempurnaan output pada laporan yang disusun.

Revisi dan finalisasi dilakukan untuk lebih menyempurnakan dan mengevaluasi penyusunan profil pembangunan kependudukan agar terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan Kabupaten Majalengka. Jika sudah selesai maka akan berlanjut ke tahap Printout dokumen profil pembangunan kependudukan berupa laporan pendahuluan.

Mengenai pelaksanaan presentasi dan pelaporan dilakukan setiap akhir minggu bulan I (pertama) dan akhir periode proyek di minggu ke dua bulan II (kedua) dengan didahului pembahasan agar mendapat masukan dari tim teknis dan instansi terkait untuk kesempurnaan output pada laporan yang disusun. Secara tabulasi jadwal pelaksanaan kegiatan disusun pada tabel 8.1 berikut :

No	Kegiatan	Bulan I				Bulan II	
		Minggu Ke					
		I	II	III	IV	I	II
1	Pemahaman KAK						
2	Identifikasi Kondisi Lapangan						
3	Kompilasi Data Lapangan						
4	Analisis						
5	Proyeksi Data Lapangan						
6	FGD						
7	Revisi dan Finalisasi						
8	Finalisasi dan Printout						
9	Presentasi dan Pelaporan						

Tabel 8.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022, akan dibentuk suatu Tim Pelaksana yang terdiri dari 5 orang Tenaga Ahli terdiri dari Ahli Statistik untuk Team Leader, Ahli Planologi, Ahli Geografi, Administrasi, Operator Komputer.

9.1 Susunan Tenaga Ahli

9.1.1 Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan kualifikasi masing – masing tenaga ahli adalah sebagai berikut :

1) Team Leader (Ahli Statistik)

Team Leader disyaratkan seorang S1 jurusan Statistik lulusan Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi/disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang statistik, Pengalaman kerja profesional sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. *Team Leader* bertugas memimpin tim, bertanggung jawab atas koordinasi tim serta pembuat proyeksi data kependudukan secara komprehensif yang berkoordinasi dengan tenaga ahli lain.

2) Ahli Planologi

Ahli planologi disyaratkan seorang lulusan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan wilayah dan kota khususnya perencanaan kependudukan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

3) Ahli Geografi

Ahli berpendidikan terakhir minimal S1 Geografi lulusan Universitas Negeri atau Swasta yang terakreditasi/disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Geografi dan GIS dengan pengalaman kerja profesional sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Ahli geografi bertugas dan bertanggung jawab membuat kompilasi data-data kependudukan dan analisa situasinya.

9.1.2 Tenaga Pendukung

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, selain diperlukan tenaga ahli diperlukan juga tenaga pendukung, sebagai berikut:

a) Administrasi dan Pelaporan

Administrasi yang disyaratkan adalah seorang lulusan minimal D3/S1 Universitas Negeri atau Swasta yang disamakan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun. Bertanggungjawab dalam semua hal-hal yang bersifat administrasi yaitu menyimpan, mencatat dan menerima dokumen.

b) Operator Komputer

Operator yang disyaratkan adalah seorang lulusan minimal D3/S1 Universitas Negeri atau Swasta yang disamakan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun. Bertanggungjawab dalam semua hal-hal yang berkaitan dengan mengetik, dan menginput data melalui komputer.

TABEL 9.1
Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun Anggaran 2022

No	Kualifikasi	Nama Yang diusulkan
1	Team Leader (Ahli Statistik)	Sarah Indira, S.Stat.
2	Ahli Planologi	Angger Kwarazmi Khamaisya, ST., IAP.
3	Ahli Geografi	Mica Alphabettika, S.Si.
4	Administrasi	Khairunnisa Susilo, S.Pd.
5	Operator Komputer	Syaeful Jihad Ibrahim, S.I.kom.

9.2 Tenaga Ahli dan Tanggungjawabnya

1) *Ketua Tim (Team Leader)*

Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. *Team Leader* bertugas memimpin tim, bertanggung jawab atas koordinasi tim serta pembuat rencana secara komprehensif yang berkoordinasi dengan tenaga ahli lain.

2) **Ahli Planologi**

Ahli planologi bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan wilayah dan kota khususnya perencanaan kependudukan.

3) **Ahli Geografi**

Ahli geografi bertugas dan bertanggung jawab membuat kompilasi data-data kependudukan dan analisa situasinya.

4) **Administrasi**

Bertanggungjawab dalam semua hal-hal yang bersifat administrasi yaitu menyimpan, mencatat dan menerima dokumen.

5) **Operator Komputer**

Bertanggungjawab dalam semua hal-hal yang berkaitan dengan mengetik, dan menginput data melalui komputer.

Selengkapnya tugas dan tanggungjawab tenaga ahli disajikan pada Tabel 9.2 Berikut :

TABEL 9.2
URAIAN TUGAS TENAGA AHLI
Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	POSISI
1	Sarah Indira, S.Stat.	Team Leader
	<u>LINGKUP PENUGASAN :</u> ▪ Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. ▪ Melakukan Koordinasi Terhadap Internal Anggota Tim. ▪ Menyusun Rencana Kerja dan Pemantauan Pekerjaan agar Penyelesaian Akhir Tepat Waktu. ▪ Bertanggung Jawab Terhadap Koordinasi dan Asistensi dengan Pemberi Tugas dan Team Teknis. ▪ Bertanggung Jawab Terhadap Koordinasi Kemajuan Pekerjaan Tiap Tahap Pelaksanaan.	

NO	NAMA	POSISI
	- Bertanggung Jawab Terhadap Kejelasan Arah Studi dengan Menerangkan Inter relasi bidang antar tenaga ahli, sehingga kajian terpadu. - Memimpin Team Dalam Asistensi, presentasi. - Memimpin tim dalam kerjasama dengan Laboratorium atau lembaga penelitian lain. - Menyusun analisis menyeluruh tentang Hasil Kajian kelayakan. - Menyusun hasil kajian profil pembangunan kependudukan - Bertanggung Jawab Terhadap Serah Terima Akhir Pekerjaan.	
2	Mica Alphabettika, S.Si.	Ahli Geografi
	<u>LINGKUP PENUGASAN :</u> - Mempersiapkan rencana kerja, khususnya dibidang Geografi; - Mengumpulkan dan menganalisis data yang berhubungan dengan bidang geografi kependudukan; - Membuat peta-peta rencana berdasarkan konsep yang dibuat ahli planologi; - Mengumpulkan data-data kondisi eksisting lapangan.	
3	Angger Kwarazmi Khamaisya, ST., IAP.	Ahli Planologi
	<u>LINGKUP PENUGASAN :</u> - Mempersiapkan rencana kerja, khususnya dibidang Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi; - Mengumpulkan dan menganalisis data yang berhubungan dengan bidang Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi; - Membantu ketua tim dalam penyusunan analisis situasi kependudukan dan proyeksi kependudukan - Membantu ketua tim dalam berkoordinasi dengan tenaga ahli lain berdasarkan konsep dan rencana yang telah dibuat.	

NO	NAMA	POSISI
4	Khairunnisa Susilo, S.Pd.	Administrasi
	▪ Mempersiapkan rencana kerja dan rincian tugas; ▪ menyimpan, mencatat dan menerima dokumen; ▪ Bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan administrasi.	
7	Syaeful Jihad Ibrahim, S.I.kom.	Operator Komputer
	<u>LINGKUP PENUGASAN :</u> ▪ Bertanggungjawab dalam semua hal-hal yang berkaitan dengan mengetik, dan menginput data melalui komputer	

10

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

Tenaga ahli akan dimobilisasi (diberi penugasan) selama 45 (empat puluh lima) hari yaitu Team Leader / Statistik, Ahli Planologi, Ahli Geografi, Administrasi, dan Operator Komputer. Sehingga total orang bulan tenaga ahli yang akan digunakan dalam pekerjaan ini adalah 7 OB.

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Tim Pelaksana yang diusulkan oleh konsultan dan rencana mobilisasinya (jadwal penugasan) disampaikan pada tabel 10.1.

No	Nama	Minggu					
		1	2	3	4	5	6
1.	Ahli Statistik (Team Leader)						
2.	Ahli Planologi						
3.	Ahli Geografi						
4.	Administrasi						
5.	Operator Komputer						

Tabel 10.1. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam KAK telah dijelaskan, bahwa pekerjaan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga (jasa konsultan) untuk pelaksanaan "*Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administarasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022*" Pekerjaan ini merupakan kegiatan yang bersifat normal dengan mengambil subyek Kabupaten Majalengka, yang di koordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

Selain itu, di dalam KAK juga di jelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan konsultan harus berkonsultasi kepada Pengguna Anggaran dan Tim Teknis secara periodik dan berkoordinasi terutama dalam merumuskan bahan-bahan masukan/arahan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Mengingat waktu pelaksanaan ini hanya 45 (empat puluh lima) hari kalender, maka kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pekerjaan ini sangat menentukan dalam mencapai produk akhir yang diharapkan.

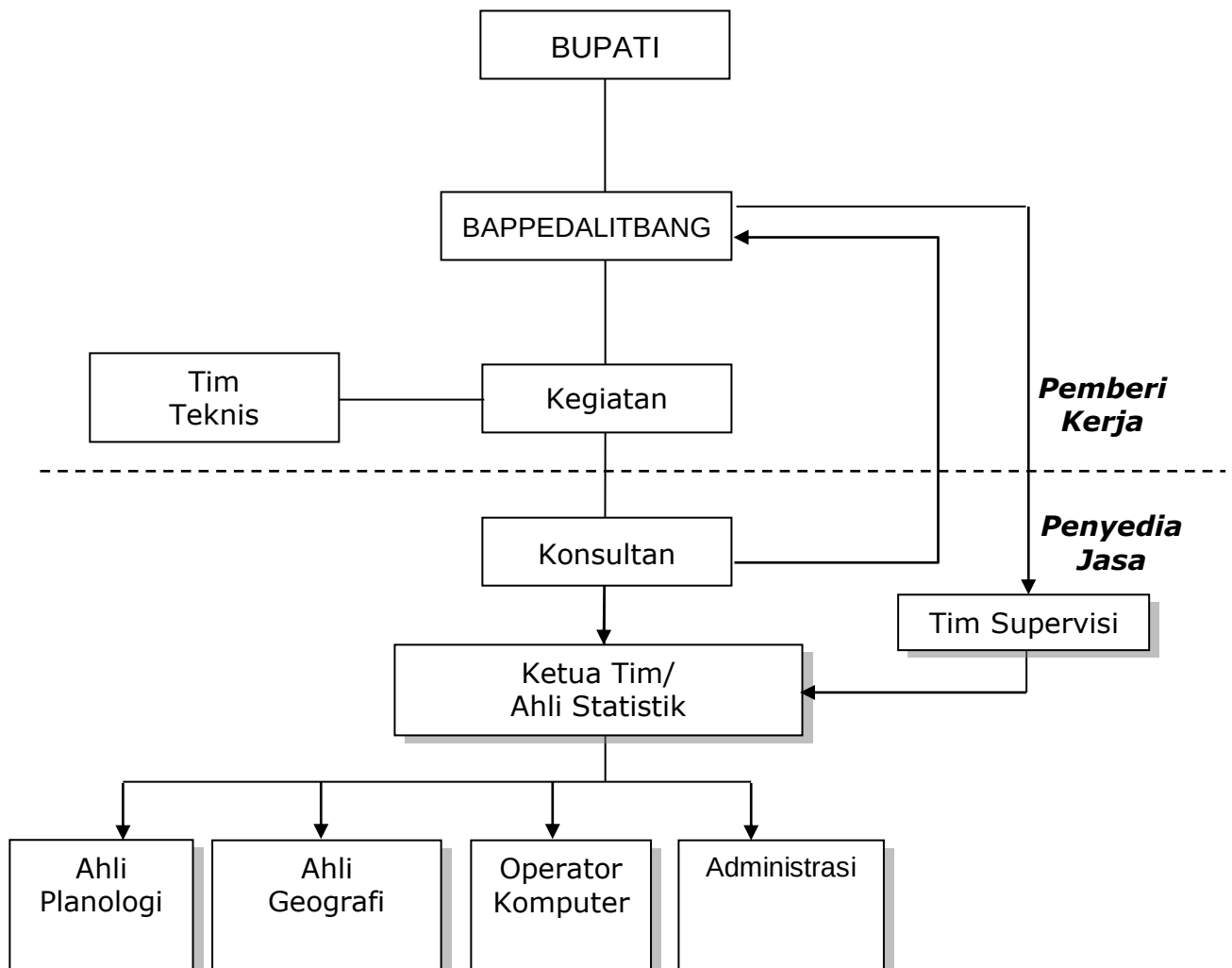
Seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keluaran sebagaimana ditetapkan dalam KAK menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana (konsultan), baik yang menjadi tanggung jawab murni maupun yang berfungsi sebagai fasilitator atau *supporting*. Dalam pelaksanaannya, Tim Pelaksana akan senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi secara intensif dengan wakil dari struktural pemberi tugas /Tim Teknis sekurangnya 3 (tiga) kali khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan kunjungan ke instansi terkait maupun ke daerah,

serta dalam upaya mencapai kesepakatan muatan masing-masing tahapan pelaporan. Untuk itu, Tim Pelaksana akan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis laporan dan saat penyerahan sebagaimana yang dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Tim Pelaksana juga akan senantiasa bekerja sama atau memfasilitasi hubungan baik dengan aparat dan instansi terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini, terutama dalam pengumpulan data dan informasi, klarifikasi kondisi aktual dilapangan, dan pembahasan laporan didaerah, serta dalam penyelenggaraan sosialisasi.

Struktur organisasi Pelaksanaan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 11.1. dan 11.2.

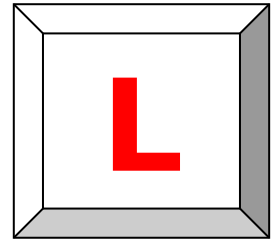
Gambar 11.1
Struktur Organisasi Kegiatan Jasa Konsultansi



Gambar 11.2
Struktur Organisasi Perusahaan Pelaksana Jasa Konsultansi



PELAPORAN



Untuk memantau kemajuan kegiatan/pelaksanaan dan penyajian hasil-hasil pekerjaan maka dilakukan pentahapan sistem pelaporan Kegiatan Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administarasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. Dengan demikian maka pekerjaan akan dituangkan dalam bentuk explorasi, observasi dan analisis serta penyusunan laporan – laporan standar (laporan pendahuluan dan laporan akhir/final report), dengan perincian sebagai berikut :

a. Laporan Pendahuluan, berisi:

- Pemahaman konsultan tentang Kerangka Acuan Kerja
- Kerangka pemikiran dan metode kerja
- Organisasi kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan penyedia jasa
- Draft dan tata cara pengumpulan dan pencarian data
- Hasil analisis situasi kependudukan Kabupaten Majalengka
- Hasil analisis capaian pembangunan kependudukan Kabupaten Majalengka

Laporan ini harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan, sebagai bahan diskusi / seminar.

b. Laporan Draft Akhir, berisi:

- Hasil analisis situasi kependudukan Kabupaten Majalengka
- Hasil analisis capaian pembangunan kependudukan Kabupaten Majalengka
- Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Majalengka
- Hasil proyeksi kondisi ideal kependudukan Kabupaten Majalengka
- *Draft* laporan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka

Laporan ini harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) berakhir sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan, untuk dibahas dalam seminar draft Akhir.

c. Produk Akhir, berisi:

- Laporan keseluruhan proses kegiatan penyusunan Profil Pembangunan Kependudukan Kabupaten Majalengka.

Staf pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administarasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan akan banyak membantu untuk kelancaran pekerjaan. Konsultan menugaskan staf pendukung khusus untuk menangani pekerjaan yang terpisah dari kegiatan lain agar tidak mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan. Staf pendukung tersebut utamanya adalah sebagai berikut :

1. Operator Komputer

Operator komputer disyaratkan seorang lulusan Diploma (D3) Sederajat, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang komputer seperti mengetik dan menginput data melalui komputer dan mahir menggunakan beberapa perangkat lunak komputer dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

2. Administrasi

Administrasi dengan latar pendidikan Diploma (D3) Sederajat, dengan pengalaman kerja memadai untuk bidang administrasi bertugas membantu pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan administrasi proyek dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Konsultan mengusulkan staf pendukung dengan kualifikasi sebagai berikut :

TABEL 13.1
STAF PENDUKUNG PT. ANDRA CIPTA CONSULT

No	Spesifikasi yang dibutuhkan	Nama Yang diusulkan	Kelulusan	Jumlah Personil
1	Operator Komputer	Syaeful Jihad Ibrahim, S.I.kom.	Ilmu Komunikasi UMY 2022	1 Orang
2	Administrasi	Khairunnisa Susilo, S.Pd.	Pendidikan Geografi UPI 2019	1 Orang

14

FASILITAS PENDUKUNG

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, konsultan akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Adapun fasilitas yang akan disediakan oleh konsultas mencakup kebutuhan sarana kerja, perlengkapan survey, analisis laboratorium sarana transportasi dan alat komunikasi.

Adapun daftar fasilitas pendukung selengkapnya disajikan pada Tabel 14.1. sebagai berikut:

Tabel 14.1. Daftar Perlengkapan Dan Peralatan PT. Andra Cipta Consult

No	Jenis>Nama Alat	Merk/Model/Type	Jumlah	Kondisi	Status	Lokasi Saat ini	Ket
A	PERALATAN KANTOR						
1	Kursi + Meja Tamu	President	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
2	Filing Cabinet	President	3	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
3	Meja Komp + Kursi	Elephant	5	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
4	Meja Tulis + Kursi	Elephant	6	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
5	Komputer						
	a. Pentium II	Intel	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
	b. Pentium III	Intel dan Zyrex	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
	c. Pentium IV	Smart	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
6	Note Book Pentium III	Toshiba	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
7	Printer						
	a. Canon	BJ 1000 SP	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
	b. Epson Stylus	C 200	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
	c. Minolta Laser	Magic Color 2300DI	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
8	Digitizer	Calcomp	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
9	Scanner	Acer & Umax	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
10	Plotter	Calcomp	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
11	Mesin Pemotong Kertas	ITO SPC	4	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
12	Meja Gambar	Lokal	6	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
13	Lettering Set	Kent	3	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
B	PERALATAN LAB :						
1	Atterberg	Lokal	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
2	Botton Graph	Delph	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	



No	Jenis/Nama Alat	Merk/ Model/Type	Jumlah	Kondisi	Status	Lokasi Saat ini	Ket
3	Direct Shear Test	Lokal	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
4	Extruder Undisturbed	Lokal	3	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
5	Picno Meter	Lokal	10	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
6	Timbangan Halus	Lokal	4	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
7	Timbangan Kasar	Lokal	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
C	PERALATAN SURVEY :						
1	Theodolit T2 Wild	Wild	3	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
2	Water Pas	Sokhisha	3	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
3	Theodolit T 0	-	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
4	Pita Ukur Baja	Wild	4	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
5	EDM	Sokhisha	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
6	Total Station	Sokkia	2	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
7	Water Pump	TONE NAS 2	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
8	Kamera	Cannon	5	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
9	Salinometer	Beckman	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
10	Tripoder	Reytone	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
D	KENDARAAN :						
1	Mobil	Toyota Kijang	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
		Toyota Kijang	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
		Honda Accord	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	
2	Motor	Honda Supra	1	Baik	Milik Sendiri	Bandung	

Berdasarkan uraian pendahuluan, pengalaman perusahaan, pemahaman KAK, tanggapan KAK, apresiasi dan inovasi, pendekatan dan metodologi, rencana kerja, serta kualifikasi tenaga ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *PT. Andra Cipta Consult* memperlihatkan kesiapan dan kualitasnya dalam Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. *PT. Andra Cipta Consult* adalah perusahaan yang memiliki latar belakang keikutsertaan kecintaan, kepedulian dan partisipasi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, *PT. Andra Cipta Consult* siap untuk selalu berkomunikasi aktif dengan berbagai pihak terutama pemberi tugas dalam melaksanakan pekerjaan ini.
2. *PT. Andra Cipta Consult* memiliki pengalaman perusahaan yang ditunjang dengan pengalaman tenaga ahli yang sangat baik meliputi pengalaman dalam pembangunan maupun pengembangan perencanaan kawasan, pengalaman proyek di indonesia, pengalaman manjerial, dukungan fasilitas utama, dan kapasitas perusahaan dengan tenaga ahli yang berpengalaman, handal dan profesional dibidangnya.
3. Dengan keunggulan pemahaman KAK secara teoritis atau normatif tersebut, maka *PT. Andra Cipta Consult* mampu menanggapi KAK dengan sangat baik.

4. Dengan ketajaman tanggapan KAK tersebut di atas, PT. Andra Cipta Consult mampu memberikan apresiasi dan inovasi KAK yang lebih baik. Apresiasi dan inovasi ini ditunjukkan dengan kemampuan pemahaman lapangan dibuktikan dengan ketajaman pemaparan analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan. Selain itu mampu menyusun proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan terkait Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Inovasi tersebut diuraikan dengan sangat baik pada aspek metodologi meliputi pendekatan, metode analisis dan pengumpulan data serta rencana kerja yang sistematis dan rinci.
6. *PT. Andra Cipta Consult* memiliki tenaga ahli yang sangat memenuhi kentuan KAK dan memiliki komitmen tinggi dengan pekerjaan sehingga siap berkomunikasi aktif dengan berbagai pihak terutama dengan pemberi tugas dalam pekerjaan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PT. Andra Cipta Consult sangat siap menyambut tawaran kerjasama Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi Sub Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Kajian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini.